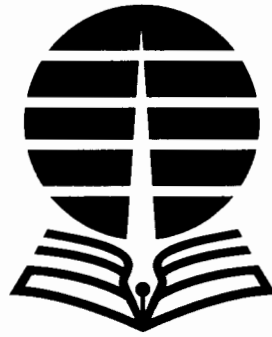


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

DWITA SETYAWATI ARMA

NIM.500645243

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016**

ABSTRACT

EMPOWERMENT PROGRAM EVALUATION AND FAMILY WELFARE IN WEST KOTAWARINGIN

Dwita Setyawati Arma
Dwita15s@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

This study aimed to evaluate the program and Family Welfare Empowerment (PKK) in West Kotawaringin and analyze factors inhibiting and PKK supporters in implementing the program. Empowerment and Family Welfare in implementing 10 programs outlined in the activities of the working group (WG) Empowerment and Family Welfare consisting of four (4) Working Group. This research was conducted at the Family Welfare Empowerment Office West Kotawaringin. This research method is qualitative analysis eksplanatif level with the number of informants as many as 18 people consisting of PKK districts as many as 14 people, PKK villages and districts were 3 people and the Community Development Agency West Kotawaringin 1. The data collection is done by observation, interview and documentation. Instrument in this study using a camera and recorder. The validity of the retrieval of data and information using triangulation data. Program evaluation activities at the stage of implementation (on-going). Evaluation model used is the formative evaluation. From the research, found that the implementation of the program Working Group I, appreciation and practice of Pancasila has been implemented fairly well, although the results are less effective for training Kadarkum so no need to continue the program while the program of mutual cooperation has been implemented with good despite a lack of coordination between administrators. Working Group II, education and skills and the development of cooperatives lives have been implemented fairly well through the coaching and training of early childhood education and UP2K so the program is very nice to be continued only for the training of early childhood education to be implemented for the next village who do not have early childhood. Working Group III, program food, clothing and household governance through coaching and competitions TOGA has been implemented quite well even though the results have not been up but this program is great to be continued because it is very helpful for families. WG IV, through guidance and counseling as well as training of health cadres ODF has been implemented quite well. supporting factor is the implementation of the program of cross-sector collaboration, funding, facilities and high morale of the board. While inhibiting factor is the knowledge / HR cadres still limited, facilities and infrastructure are inadequate, no funds PKK operations in districts and villages, and the turn the board in total.

Keywords: Evaluation Program for Empowerment and Family Welfare

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dwita Setyawati Arma
Dwita15s@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung dalam melaksanakan program PKK. Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam melaksanakan 10 programnya dijabarkan dalam kegiatan kelompok kerja (Pokja) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang terdiri dari 4 (empat) Pokja. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis level eksplanatif dengan jumlah informan sebanyak 18 orang yang terdiri dari pengurus PKK kabupaten sebanyak 14 orang, PKK desa dan kecamatan sebanyak 3 orang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat 1 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrument dalam penelitian ini menggunakan kamera dan *recorder*. Keabsahan dalam pengambilan data dan informasi menggunakan triangulasi data. Kegiatan evaluasi program pada tahap pelaksanaannya (*on-going*). Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi formatif. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan program Pokja I, penghayatan dan pengamalan Pancasila sudah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun hasilnya kurang efektif untuk pelatihan Kadarkum sehingga tidak perlu program tersebut dilanjutkan sedangkan untuk program gotong royong sudah dilaksanakan dengan baik meskipun kurang koordinasi antar pengurus. Pokja II, program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui pembinaan dan pelatihan PAUD dan UP2K sehingga program ini sangat bagus untuk dilanjutkan hanya saja untuk pelatihan PAUD kedepan agar dilaksanakan bagi desa yang belum memiliki PAUD. Pokja III, program pangan, sandang dan tata laksana rumah tangga melalui pembinaan dan lomba TOGA sudah dilaksanakan dengan cukup baik walaupun hasilnya belum maksimal namun program ini sangat bagus untuk dilanjutkan karena sangat bermanfaat bagi keluarga. Pokja IV, melalui pembinaan dan penyuluhan ODF serta pelatihan kader Posyandu sudah dilaksanakan dengan cukup baik. faktor pendukung pelaksanaan program adalah kerja sama dari lintas sektor, dana, fasilitas dan semangat yang tinggi dari pengurus. Sedangkan faktor penghambatnya adalah pengetahuan/SDM kader masih terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadai, tidak ada dana operasional di PKK kecamatan dan kelurahan, dan pergantian pengurus secara total.

Kata Kunci: Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

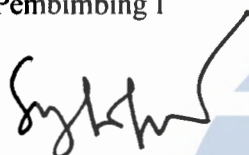
TAPM yang berjudul Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.



**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

JUDUL TAPM : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NAMA : DWITA SETYAWATI ARMA
NIM : 500645243
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I



Dr. Syamsuri, M. Si
NIP. 19790521 200604 1 014

Pembimbing II



Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd
NIP. 19581221 198303 1 008

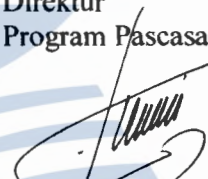
Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc., PhD.
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : DWITA SETYAWATI ARMA

NIM : 500645243

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Judul TAPM : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program
Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas
Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 26 Nopember 2016

Waktu : 11.00 – 12.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS.

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Suciati, M.Sc., PhD.

NIP : 19520213 198503 2 001

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Sangkala, M.Si

NIP : 19631111 199103 1 002

Pembimbing I

Nama : Dr. Syamsuri, M. Si

NIP : 19790521 200604 1 014

Pembimbing II

Nama : Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

NIP : 19581221 198303 1 008

KATA PENGANTAR

Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul “Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat”.

Penelitian TAPM disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Selain untuk memenuhi syarat tersebut, penulis berharap TAPM ini dapat menambah ilmu dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa penelitian TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan TAPM ini.

Berbagai hambatan dan kesulitan terjadi selama penelitian TAPM. Namun kehadirannya penulis sadari sebagai pemacu semangat untuk lebih baik lagi sehingga TAPM ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat luas yang membaca TAPM ini. Berbagai hambatan dan kesulitan tersebut penulis lewati dengan dukungan dan bantuan baik tenaga, waktu, serta pikiran dari berbagai pihak. Adapun ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis berikan kepada:

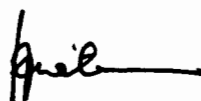
1. Allah SWT atas nikmat, karunia dan kelancaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM.
2. Kedua orangtua tercinta, Drs. H. Asyikin Noor Bakri dan Hj. R. Siti Rochaniah yang selalu mendoakan serta memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan kepercayaan kepada penulis selama menyelesaikan TAPM ini.

3. Bapak Dr. Syamsuri , M. Si selaku pembimbing I. Terima kasih atas waktu, saran, kritik dan bimbingannya sehingga TAPM ini menjadi lebih baik.
4. Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd selaku pembimbing II. Terima kasih telah selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis sehingga TAPM ini menjadi lebih baik.
5. Suami Akhmad Fauzian Noor dan anak-anak tercinta Alby Rafif Kenziera dan Adyatma Fatih Kenziera yang selalu mendoakan dan menyemangati bunda dalam menyelesaikan TAPM.
6. Seluruh pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat terima kasih atas informasi dan bantuan yang diberikan untuk penyelesaian TAPM.
7. Kepala BPMD, Kabid Kelembagaan Sosial Budaya dan Partisipasi Masyarakat BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dan seluruh staf kelembagaan terima kasih selama ini selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan TAPM.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Semoga TAPM ini memberikan manfaat bagi dunia pendidikan dan sekaligus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak yang ingin mendalami evaluasi program.

Jakarta, Desember 2016

Penulis



Dwita Setyawati Arma

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama** : Dwita Setyawati Arma
- NIM** : 500645243
- Program Studi** : Magister Administrasi Publik
- Tempat/Tanggal Lahir** : Pangkalan Bun, 15 Nopember 1984
- Riwayat Pendidikan** : 1. Lulus SD di SD Negeri 1 Kotawaringin Hilir
Tahun 1996
2. Lulus SLTP di SLTP Negeri 1 Pangkalan Bun
Tahun 1999
3. Lulus SLTA di SMU Negeri 1 Pangkalan Bun
Tahun 2002
4. Lulus DIV di STPDN Jatinangor Tahun 2006
- Riwayat Pekerjaan** : 1. Tahun 2007 s/d 2008 sebagai Kasubbid Bina
Mental dan Spiritual di Kecamatan Arut Selatan
2. Tahun 2008 s/d 2009 sebagai Kasi Pelayanan
Umum di Kelurahan Raja
3. Tahun 2009 s/d 2011 sebagai Kasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum di Kelurahan Mendawai
4. Tahun 2011 s/d 2013 sebagai Kasubbag
Protokol dan Perjalanan di Sekretariat DPRD
Kabupaten Kotawaringin Barat

5. Tahun 2013 s/d sekarang sebagai Kasubbid
Penguatan Kelembagaan dan Pelatihan
Masyarakat di BPMD Kabupaten Ktw Barat

Jakarta, Desember 2016

Dwita Setyawati Arma
NIM. 500645243



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrac	i
Abstrak	ii
Lembar Pernyataan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Evaluasi Program	12
a. Pengertian evaluasi program	12
b. Tujuan evaluasi.....	14
c. Prinsip-prinsip evaluasi.....	14

d. Metode evaluasi.....	15
e. Model evaluasi.....	16
2. Pemberdayaan Masyarakat	20
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	20
b. Tujuan dan Sasaran Pemberdayaan Masyarakat	24
c. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.....	26
d. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	29
e. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	32
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	33
a. Pengertian Strategi Pemberdayaan Masyarakat	33
b. Metode Pemberdayaan Masyarakat.....	35
4. Pemberdayaan Masyarakat sebagai upaya pengembangan kapasitas masyarakat	41
B. Penelitian Terdahulu	45
C. Kerangka Berpikir.....	57
D. Operasional Konsep.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
A. Desain Penelitian	62
B. Sumber Informasi	65
C. Instrumen Penelitian	67
D. Prosedur Pengumpulan Data	71
E. Metode Analisis Data.....	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	80
1. Gambaran Umum	80
2. Profil PKK Kabupaten.....	81
B. Hasil Penelitian.....	91
C. Pembahasan	145
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	168
A. Kesimpulan.....	168
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA	174
DAFTAR LAMPIRAN.....	178
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Pedoman Observasi	
Lampiran 3 Dokumentasi	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pemberdayaan Masyarakat.....	33
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	57
Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif.....	79
Gambar 4.1 Struktur TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ragam Metode Pemberdayaan Masyarakat	36
Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu	55
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	81
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Pengurus	90
Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana PKK Kabupaten Kotawaringin Barat	91
Tabel 4.4 Program Kerja TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat	95
Tabel 4.5 Sasaran Program Kerja TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat	96
Tabel 4.6 Pendampingan Lintas Sektor Terkait	160



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	178
Lampiran 2 Pedoman Observasi.....	215
Lampiran 3 Dokumentasi.....	216



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan akan berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah dan di lain pihak ada partisipasi aktif seluruh masyarakat. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat di capai dengan baik. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik apabila diawali proses penyusunan program yang terencana.

Mengutip pendapat Martinez (1982) yang menyatakan bahwa:

“pembangunan (perdesaan) yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil *“trial and error”* tetapi akibat dari perencanaan yang baik, oleh karena itu perlu untuk selalu di ingat bahwa, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya”.

Pembangunan merupakan segala upaya yang terus-menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Menurut Riyadi (1981) dalam buku Totok Mardikanto (2013) pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat serta individu-individu di dalamnya yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.

Yang di maksud dengan kesejahteraan di sini, bukanlah sekedar terpenuhinya “kebutuhan pokok” yang terdiri dari pangan, sandang dan perumahan atau permukiman. Goulet (Todaro, 1981) mengemukakan sedikitnya tiga nilai-nilai yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Tercapainya swasembada, dalam arti kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencakup: pangan, sandang, perumahan/permukiman, kesehatan, pendidikan-dasar, keamanan, rekreasi, dan lain-lain.
2. Peningkatan harga diri, dalam arti berkembangnya rasa percaya diri untuk hidup mandiri yang tidak tergantung kepada atau ditentukan oleh pihak lain, terlepas dari penindasan fisik maupun ideologi, dan tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka.
3. Diperolehnya suasana kebebasan, dalam arti adanya kesempatan dan kemampuan untuk mengembangkan dan untuk memilih alternatif-alternatif yang dapat dan boleh dilakukan untuk mewujudkan perbaikan mutu-hidup atau kesejahteraan yang terus-menerus bagi setiap individu sebagai warga masyarakat yang sedang membangun itu, tanpa adanya rasa takut dan tekanan dari pihak-pihak lain.

Pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, tetapi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh warga masyarakatnya. Dalam pengertian “pemerintah” maupun “masyarakat” termasuk didalamnya adalah aparat pemerintah, aktivis lembaga swadaya masyarakat, pekerja sosial atau para *innovator* dan tokoh-tokoh (*informal*) masyarakat.

Dalam upaya mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional agar masyarakat lebih sejahtera setiap tahunnya maka program pemberdayaan masyarakat itu sangat penting dilakukan di Indonesia sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tersebut diperlukan organisasi/penggerak yang akan melaksanakan apa saja program-program pemerintah dalam pembangunan. Salah satu penggerak yang dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat tersebut adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di setiap jenjangnya.

Berdasarkan sejarah singkat PKK bahwa PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar *Home Economic* di Bogor pada tahun 1957, yang menghasilkan rumusan 10 segi kehidupan keluarga. Sekitar tahun 1967 kehidupan sebagian masyarakat Jawa Tengah sangat menyedihkan dan memprihatinkan, khususnya daerah Dieng Kabupaten Wonosobo diantaranya banyak yang menderita *Honger Odeem* (HO). Kenyataan tersebut menyentuh hati Ibu Isriati Moenadi sebagai istri Gubernur Jawa Tengah. Sehingga Pada tanggal 27 Desember 1972 Gubernur Jawa Tengah merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Sesuai era reformasi dan GBHN 1999 adanya paradigma baru pembangunan serta otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Tim Penggerak PKK Pusat telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK pada tanggal 31 Oktober 2000 di Bandung, yang menghasilkan kesepakatan bahwa

pengertian dan nomenklatur Gerakan PKK berubah dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK bahwa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah mitra pemerintah dalam menjalankan seluruh kebijakan dan program pemerintah yang di buat. PKK bukanlah sebuah organisasi melainkan gerakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Upaya agar dapat membina masyarakat secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin maka diperlukan program-program pemberdayaan masyarakat yang terencana sampai menyentuh ke lingkup unit yang terkecil dalam masyarakat. Lingkup unit yang terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Kondisi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai arti yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi keluarga dapat merupakan barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Program pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor utama dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Di sini, masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemu-kenali solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.

Penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat, termasuk wanita, namun demikian, ini tidak berarti menafikan partisipasi pihak-pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh

masyarakat, menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat dan sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui PKK Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kader PKK kecamatan, kelurahan dan desa. Melalui kader-kader PKK diharapkan mampu melaksanakan program-program yang ada sampai ke tingkat bawah yakni keluarga di perdesaan dan perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan mental spiritual dan fisik material.

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan tugasnya mengacu pada 10 Program PKK yaitu :

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pendidikan dan Keterampilan
4. Pengembangan Kehidupan berkoperasi
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

6. Kesehatan
7. Pangan
8. Sandang
9. Perencanaan Sehat
10. Kelestarian Lingkungan Hidup

Adapun program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 yaitu:

1. Tahun 2013 terdiri dari Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pelatihan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), Pelatihan Posyandu, Lomba Menu 3B dan Serba Ikan, Lomba 10 Program Pokok PKK, Lomba UP2K, Lomba Posyandu, Lomba TOGA, Lomba Kadarkum, Lomba PAUD dan Peringatan HUT PKK.
2. Tahun 2014 terdiri dari Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pelatihan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), Pelatihan Posyandu, Pelatihan LP3PKK, Lomba Jambore Kader PKK, Lomba Menu 3B dan Serba Ikan, Lomba 10 Program Pokok PKK, Lomba UP2K, Lomba Posyandu, Lomba TOGA, Lomba Kadarkum, Lomba PAUD, dan Peringatan HUT PKK.
3. Tahun 2015 terdiri dari Pelatihan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pelatihan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Pelatihan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM), Pelatihan Posyandu, Pelatihan

LP3PKK, Lomba Jambore Kader PKK, Lomba Menu 3B dan Serba Ikan, Lomba 10 Program Pokok PKK, Lomba UP2K, Lomba Posyandu, Lomba TOGA, Lomba Kadarkum, Lomba Cerdas Cermat PKK, Lomba PAUD, dan Peringatan HUT PKK.

Dari berbagai program yang ada di atas, tujuannya adalah agar masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat ini menjadi maju dan sehat melalui program pendidikan yang dimulai sejak dini, peningkatan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan keluarga, keindahan dan kesejukan di halaman rumah, masyarakat yang sehat dari penyakit menular dan tidak menular, terciptanya keluarga yang sejahtera lahir dan batin, taat dan patuh terhadap perundang-undangan, serta meningkatkan pengetahuan kader dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar hidupnya lebih sejahtera dimana semua kebutuhan diharapkan tersedia di satu wilayah saja.

Pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat mutlak dilakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan itu telah mencapai tujuan yang diinginkan karena program yang dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat adalah program yang telah direncanakan oleh masing-masing kelompok kerja (pokja) I sampai dengan pokja IV. Menurut Rossi (1979) evaluasi program adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang mereka rumuskan itu, jika program tersebut kelak akan dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK merupakan upaya memandirikan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat dan sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Program yang ada di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat seharusnya mampu mendorong percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat secara mandiri namun pada kenyataannya ini tidak dapat berjalan dengan optimal. Karena masyarakat dalam hal ini keluarga/setiap individu masih ada yang belum mampu menggali potensi yang ada dengan baik.

Disamping pelaksanaan program yang dilakukan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri, dibutuhkan peran serta lintas sektor yang ada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang menangani secara teknis program pemerintah sebagai koordinator teknis dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Kedudukan PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan adalah sebagai mitranya pemerintah dalam menggerakkan atau mendorong masyarakat untuk melakukan semua program-program yang menjadi program prioritas pemerintah.

Program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi program-program dari pokja I sampai dengan pokja IV. Dari hal tersebut maka akan dilakukan analisis terhadap evaluasi program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat. Apakah pelaksanaan programnya sudah sesuai dengan pedoman PKK dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya pelaksanaan program PKK yang telah dilaksanakan setiap tahunnya diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat dan kader PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Dari hal tersebut di atas yang melatarbelakangi Peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam tentang **“Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah :

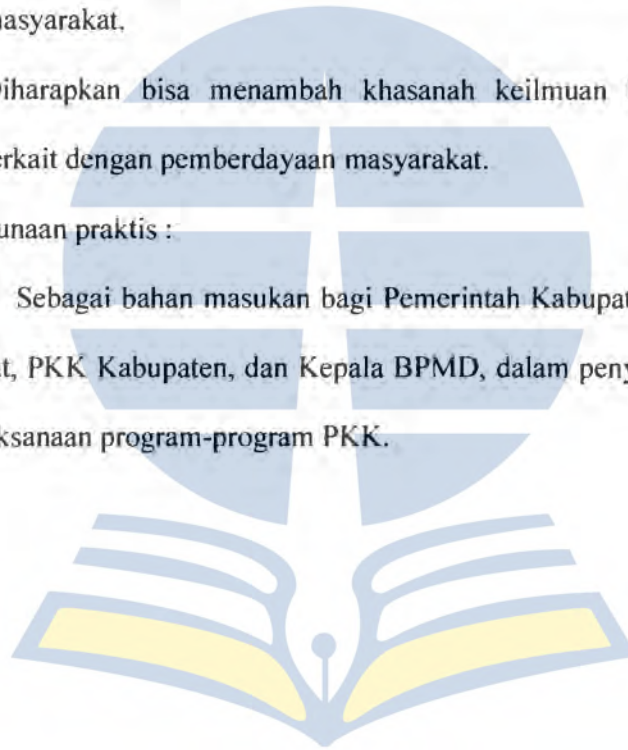
1. Untuk menganalisis pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis :
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan konsep-konsep pemberdayaan kepada masyarakat.
 - b. Diharapkan bisa menambah khasanah keilmuan bagi masyarakat terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
2. Kegunaan praktis :

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, PKK Kabupaten, dan Kepala BPMD, dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan program-program PKK.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Evaluasi program

a. Pengertian evaluasi program.

Kata “evaluasi” dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan penilaian yaitu suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai sesuatu obyek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang sedang di amati. Dalam buku Totok Mardikanto menurut Seepersad dan Henderson (1984) mengartikan evaluasi adalah kegiatan sistematis yang dimaksudkan untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap sesuatu obyek berdasarkan pedoman yang telah ada. Sedangkan menurut Soumelis (1983) mengartikan evaluasi adalah sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek. Sehingga evaluasi sebagai kegiatan terencana dan sistematis yang meliputi:

- 1) Pengamatan untuk pengumpulan data atau fakta.
- 2) Penggunaan “pedoman” yang telah ditetapkan.
- 3) Pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.
- 4) Penilaian dan pengambilan keputusan.

Evaluasi program menurut Rossi (1979) adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini

bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang di berikan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang mereka rumuskan itu, jika program tersebut kelak akan dilaksanakan. Karena itu, di dalam evaluasi program, selain di evaluasi tentang bagaimana proses perumusan program juga di evaluasi tentang semua unsur program, yang menyangkut: pengumpulan data/informasi, analisis keadaan, perumusan masalah, tujuan, dan cara-cara mencapai tujuan yang menyangkut: kegiatan yang akan dilaksanakan, metode yang akan diterapkan, penerima manfaat kegiatan, volume kegiatan, tempat (lokasi) dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dan sumber dana yang akan dipergunakan.

Terkait evaluasi program ini menurut Rossi sangat menekankan pentingnya kegiatan evaluasi terhadap:

- 1) Siapa (kelompok) penerima manfaat program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi (kekhususan) kelompok penerima manfaat program tersebut.
- 2) Apa metode yang terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- 3) Apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan.
- 4) Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan itu.

Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar (2004 : 14) evaluasi program adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas perbandingan secara hati-hati terhadap data yang di observasi dengan menggunakan standard tertentu yang telah dibakukan.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas bahwa evaluasi program adalah sebuah proses untuk mengkaji program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang di berikan.

b. Tujuan evaluasi.

Menurut Stufflebeam (1971) mengemukakan bahwa tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan (*diskrepansi*) antara keadaan yang telah di capai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat di capai, sehingga dengan demikian akan dapat di ketahui tingkat efektifitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk selanjutnya dapat segera di ambil langkah-langkah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan seperti yang dikehendaki.

c. Prinsip-prinsip evaluasi.

Dalam kegiatan evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yaitu:

- 1) Kegiatan evaluasi harus merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan program.
- 2) Setiap evaluasi harus memenuhi persyaratan seperti obyektif, menggunakan pedoman tertentu yang telah dibakukan, menggunakan metode pengumpulan data yang tepat dan teliti serta menggunakan alat ukur yang tepat dan dapat dipercaya.
- 3) Setiap evaluasi, harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula.
- 4) Evaluasi harus dinyatakan dalam bentuk:
 - a) Data kuantitatif, agar jelas dapat diketahui tingkat pencapaian tujuan dan tingkat penyimpangan pelaksanaannya.
 - b) Uraian kualitatif, agar dapat diketahui faktor-faktor: penentu keberhasilan, penyebab kegagalan dan faktor penunjang serta penghambat keberhasilan tujuan program yang direncanakan.
- 5) Evaluasi harus efektif dan efisien.

d. Metode evaluasi.

Menurut Ernest R. Alexander dalam Aminudin (2007) metode evaluasi diklasifikasikan menjadi lima yakni :

- 1) *Before and after comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
- 2) *Actual versus planned performance comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*).

- 3) *Experintal (controlled) model*, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi yang di teliti.
- 4) *Quasi experimental models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang di teliti.
- 5) *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana.

e. Model Evaluasi.

Menurut Scriven (1999) ada dua model evaluasi yakni:

1) *Goal free evaluation*.

Dalam melaksanakan evaluasi program, evaluator tidak perlu memperhatikan apa yang menjadi tujuan program, yang perlu diperhatikan dalam program tersebut adalah bagaimana kerjanya (kinerja) suatu program, dengan jalan mengidentifikasi penampilan-penampilan yang terjadi (pengaruh) baik hal-hal yang positif (yaitu hal yang diharapkan) maupun hal-hal yang negatif (yang tidak diharapkan).

2) Evaluasi formatif-sumatif.

Evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk memastikan

tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan untuk melakukan perbaikan suatu produk atau program. evaluasi formatif dilakukan untuk memberikan informasi evaluatif yang bermanfaat untuk memperbaiki suatu program. ada dua faktor yang mempengaruhi kegunaan evaluasi formatif, yaitu kontrol dan waktu.

Evaluasi sumatif yaitu penilaian hasil-hasil yang telah dicapai secara keseluruhan dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan. Waktu pelaksanaan pada saat akhir proyek sesuai dengan jangka waktu proyek dilaksanakan. Untuk evaluasi yang menilai dampak proyek, dapat dilaksanakan setelah proyek berakhir dan diperhitungkan dampaknya sudah terlihat nyata.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yakni:

- a) Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana

dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

- c) Evaluasi pada tahap pasca-pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Terkait dengan model-model evaluasi, Tayibnapis (2008) mengemukakan bahwa:

1) Model CIPP.

Stufflebeam (Tayibnapis, 2008) mengartikan evaluasi sebagai proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.

Karena itu, ia membagi evaluasi dalam empat macam, yakni:

- (1) *Context evaluation to serve planning decision* yang berkaitan dengan tujuan program.
- (2) *Input evaluation structuring decision* yang berkaitan dengan sumberdaya, alternatif pemanfaatannya, serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan.

- (3) *Process evaluation to serve implementing decision* yang berkaitan dengan proses untuk mengimplementasikan keputusan.
- (4) *Product evaluation to serve recycling decision* yang berkaitan dengan tindak lanjut.

2) Model UCLA.

Menurut Alkin (1969) menyampaikan lima macam evaluasi yakni:

- (1) *System Assessment*, yang berkaitan dengan keadaan atau posisi sistem;
- (2) *Programme Planning*, yang membantu pemilihan program;
- (3) *Programme Implementation*, yang memberikan informasi tentang seberapa jauh program telah dikenalkan;
- (4) *Programme Improvement*, yang memberikan informasi tentang seberapa jauh program telah berfungsi, dan telah dilaksanakan;
- (5) *Programme Certification*, yang memberikan informasi tentang nilai atau guna kegiatan.

3) Model Brinkerhoff.

Brinkerhoff (1983) mengemukakan tiga golongan evaluasi, yaitu:

- (1) *Fixed and Emergent Evaluation*, yang berkaitan tetap atau perkembangan rancangan evaluasi, masalah dan kriteria evaluasi dan seberapa jauh akhirnya dipertemukan.

(2) *Formative vs Sumative Evaluation*, yang berkaitan dengan kebutuhan dan kegunaan evaluasi.

(3) *Experimental and Quasi Experimental Design vs Natural/Unobtrusive Inquiry*, yang berkaitan dengan proses intervensi, manipulasi.

4) Model Stake.

Stake (1967) menekankan dua dasar evaluasi, yaitu *description* dan *judgment* serta adanya tiga tahap program, yaitu; *Antecedents (Context)*, *transaction (process)*, dan *Outcomes (output)*.

2. Pemberdayaan masyarakat

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan adalah mendapatkan kekuasaan untuk membuat suara mereka di dengar, untuk memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi anda, untuk menggunakan keahlian anda di tempat kerja untuk meningkatkan kinerja dan kinerja seluruh organisasi. Menurut Mikkelsen (1995:66-68), dalam penjelasannya tentang Model Logika Mendasari Strategi *Partisipatoris*, menyatakan bahwa “pemberdayaan adalah model pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan organisasi setempat (jangkauan keatas yang intergratif)”. Pengertian ini memiliki beberapa asumsi. **Pertama**, masyarakat harus memperoleh proyek pembangunan yang mereka sendiri tentukan. **Kedua**, masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan

pikiran serta kehendak mereka. **Ketiga**, tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antara kelompok masyarakat diredam melalui pola demokrasi setempat. **Keempat**, pembangunan menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat. **Kelima**, pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang mutlak perlu untuk mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk pembangunan kesejahteraan yang ditetapkan oleh masyarakat, kecuali masyarakat itu memiliki kemampuan untuk memaksa pemerintahnya.

Menurut Totok Mardikanto (2013:61) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Penerima manfaat program pemberdayaan masyarakat adalah kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat, termasuk wanita dan pihak-pihak lain. Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf, dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memperhatikan dampak lingkungan, tidak

menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat serta berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Perkembangan konsep pemberdayaan pada tahun 1950-an, para teoritis motivasi melihat adanya perhatian yang meningkat pada kesejahteraan individu dan tugas yang akan dikerjakan. Hal ini membawa konsekuensi pada pentingnya nilai-nilai individu dan hubungan antar pribadi serta pengaruhnya terhadap kinerja. Dalam hal ini terlihat adanya gerakan yang dipimpin Amerika terhadap teori motivasi yang didasarkan pada kerja (*work-based theory of motivation* (Foy, 1994:21).

Sementara itu Pranarka (1996:45-47) menggambarkan pemberdayaan sebagai sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat. Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan turut mempercepat proses pemberdayaan. Kebanyakan model sejarah menekankan kualitas

hidup bagi individu. Pemberdayaan menekankan, sebagaimana dikemukakan, berhubungan dengan peningkatan kemampuan individu untuk bertindak bagi kepentingan organisasi. Ia berusaha menciptakan suatu hubungan yang lebih jelas antara motivasi dan efektifitas organisasi.

Secara konseptual, ada 5 (lima) prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan eksistensinya, pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelola.
- 2) Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan (*Empowerment encourages community members to share in the self-esteem that occurs as a neighbourhood that other have abandoned takes on a new life* (Rubins, 1993:432).
- 3) Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik (termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 4) Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya (*resources*), khususnya dalam hal dana, baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sumber-sumber lainnya, seperti donasi dan sponsor pembangunan sosial (*to accomplish their agenda of economic empowerment for those*

in need, the empowerment must bring together resources from government, charities, and private investor) (Rubin, 1993:433).

- 5) Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai 'katalis' yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro, dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro (*People empowerment boards bridge the gap between city wide development goals and those within neighbourhoods*) (Rubin, 1993 : 433).

Dari konsep pemberdayaan di atas dapat di tarik kesimpulan antara lain:

- 1) Pemberdayaan sangat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, baik pada tahap perencanaan program, pelaksanaan, maupun pada tahap pengembangannya;
- 2) Pemberdayaan selalu tidak memisahkan antara pembangunan fisik proyek dengan pelatihan keterampilan;
- 3) Sumber dana bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat umumnya berasal dari anggaran pemerintah, partisipasi pihak swasta, dan dari partisipasi masyarakat sendiri.

b. Tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan bukanlah hanya penguatan individu (orang perorangan), tetapi juga pranata-pranata (sistem dan strukturnya), pembaharuan kelembagaan, penanaman nilai, peranan masyarakat di dalamnya, khususnya dalam pengambilan keputusan dan perencanaan, sekaligus merupakan pembudayaan demokrasi, demikian pula

advokasi/pembelaan yang lemah terhadap yang kuat dan persaingan yang tak sehat. Pemberdayaan tidak boleh membuat masyarakat menjadi tergantung pada pemberian. Apa yang dinikmati harus dihasilkan oleh usaha sendiri. Dengan demikian manusia menjadi semakin mandiri dan bertumbuh dalam harga diri. Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

- 1) Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil, seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang di diskrimir/dikesampingkan.
- 2) Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara *sosio ekonomis* sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Adapun sasaran program Pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian sebagai berikut :

- 1) Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama.

- 2) Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum rentan, lemah, tak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha-usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya.
- 3) Ditingkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan pendapatan mereka.

c. Ruang lingkup pemberdayaan.

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang di perintah. Dalam hal itu, menurut Ndraha, (2003:80) diperlukan berbagai program pemberdayaan:

1) Pemberdayaan politik.

Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang di perintah terhadap pemerintah, seperti telah dikemukakan di atas. Melalui *bargaining* tersebut, yang di perintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.

2) Pemberdayaan ekonomi.

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang di perintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, pemikul beban pembangunan,

kambing hitam kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan.

3) Pemberdayaan sosial budaya.

Pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.

4) Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang di perintah dan lingkungannya terhadap hubungan saling menguntungkan.

Dari tulisan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan merupakan proses sebagai akibat dari mana individu mempunyai kemandirian, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam cara-cara yang memberikannya rasa kepemilikan dan Kepenuhan dalam mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan pada awalnya digerakkan oleh kebutuhan organisasi yang berbeda dan organisasi pada awalnya cenderung diarahkan pada produktifitas. Karena pemberdayaan akan meningkatkan produktifitas individu, perhatian utama adalah *fleksibilitas* dan *responsivenees* pelanggan dan mutu adalah tujuan dari kebanyakan organisasi modern yang mengadopsi pemberdayaan sebagai suatu kebijakan.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, pemberdayaan lebih merupakan suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Untuk melaksanakan proses pemberdayaan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Para pemimpin harus mempunyai pemahaman yang jelas mengenai konsep pemberdayaan.
- 2) Konsep pemberdayaan mengasumsikan adanya perubahan dalam budaya (*culture change*), termasuk di dalamnya budaya organisasi dan perusahaan.
- 3) Para pemimpin, birokrat, manajer harus, dalam pelaksanaan konsep pemberdayaan, menyadari akan adanya perubahan peran (*role change*), di mana peran mereka mungkin saja berkurang.
- 4) Individu (masyarakat) harus mengubah dirinya dan menghilangkan '*mental conditioning, mental barriers and confort zone*' yang ada dalam diri mereka.
- 5) Proses pemberdayaan bukan suatu yang instan (*quick-fixed approach*). Proses ini membutuhkan waktu dan berbeda dari individu ke individu.

Buah dari proses pemberdayaan adalah penyadaran akan bakat/kemampuan, kemandirian, dan komitmen. Kesadaran akan bakat/kemampuan terpendam, keterampilan, kemandirian, dan komitmen merupakan *human assets* yang dapat dioptimalisasikan dalam proses pembangunan. Perubahan paradigma pembangunan ke

arah semakin besarnya peran serta masyarakat (*participatory development*) menuntut adanya kesiapan masyarakat (*human assets*).

Kesiapan masyarakat itu memungkinkan keterlibatan mereka dalam proses perencanaan dengan pendekatan *bottom-up*, di mana data:

- 1) dikumpulkan, di kaji dan di coba secara langsung.
 - 2) pemecahan masalah sudah langsung dapat di coba selama berlangsungnya proses tersebut.
 - 3) menjadi meningkat penghargaan atas masalah yang di hadapi para *stakeholder*, konteks kebudayaan, serta perubahan kondisi.
 - 4) kelemahan dan kekuatan langsung di pahami oleh masyarakat yang ikut dalam proses.
 - 5) semakin meningkat motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengambil keputusan lantaran mereka memahami masalah yang di hadapi.
- d. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

Prinsip merupakan suatu pernyataan tentang kebijakan yang di jadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Sehingga prinsip dapat di jadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Menurut Dahama dan Bhatnagar (1980) bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

- 1) Minat dan kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.

- 2) Organisasi masyarakat bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
- 3) Keragaman budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
- 4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
- 5) Kerjasama dan partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
- 6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin di terapkan.
- 7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan.
- 8) Penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) sarannya.

- 9) Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan
- 10) Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
- 11) Segenap keluarga, artinya penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian :
 - a) Pemberdayaan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga.
 - b) Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan.
 - c) Pemberdayaan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama.
 - d) Pemberdayaan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga.
 - e) Pemberdayaan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha tani.
 - f) Pemberdayaan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda.
 - g) Pemberdayaan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga, memperkuat kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya.

12) Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.

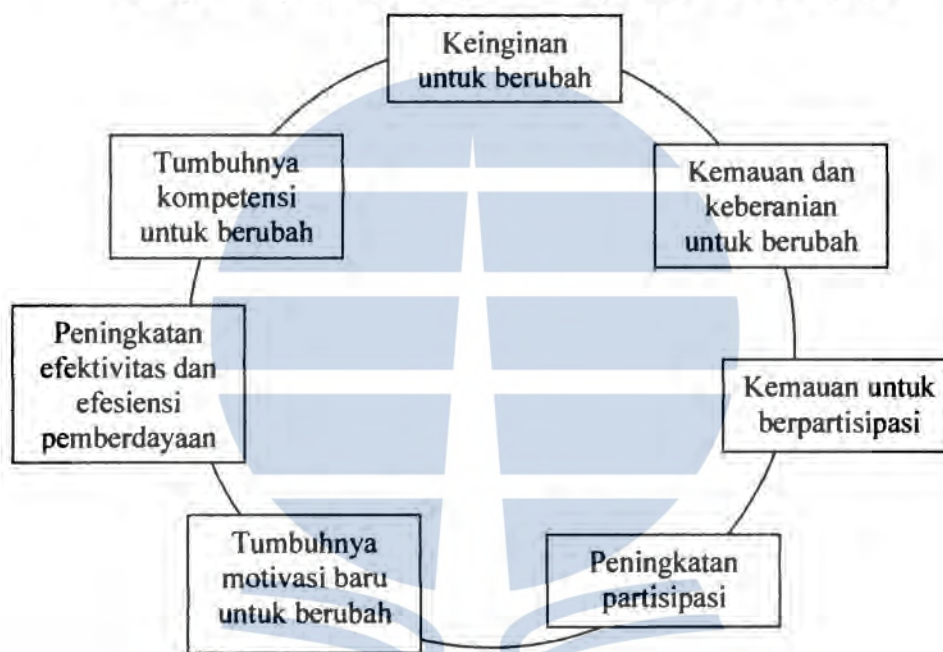
e. Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Wilson (Sumaryadi, 2004) bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari:

- 1) Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik-awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat.
- 2) Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan.
- 3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- 4) Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.

- 5) Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditujukan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan.
- 6) Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- 7) Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

Ketujuh tahapan tersebut dapat di lihat pada Gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1
Siklus Pemberdayaan Masyarakat

3. Strategi pemberdayaan masyarakat

a. Pengertian strategi pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus di capai. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu di landasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan

yang diinginkan. Dalam pengertian sehari-hari, strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan demi tercapainya suatu tujuan atau penerima manfaat yang dikehendaki.

Strategi pemberdayaan masyarakat, pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu:

- 1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan yang mengembangkan peran serta masyarakat.
- 3) Modernisasi melalui penajaman arah perubahan struktur sosial ekonomi (termasuk didalamnya kesehatan), budaya dan politik yang bersumber pada partisipasi masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Menyusun instrument pengumpulan data. Dalam kegiatan ini informasi yang diperlukan dapat berupa hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, referensi yang ada, dari hasil temuan dari pengamatan-lapangan.
- 2) Membangun pemahaman, komitmen untuk mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat.
- 3) Mempersiapkan sistem informasi, mengembangkan sistem analisis, intervensi, monitoring dan evaluasi pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat.

Menurut Ismawan (Priyono, 1996) dalam buku Totok Mardikanto bahwa ada 5 (lima) program strategi pemberdayaan yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sumberdaya manusia.
- 2) Pengembangan kelembagaan kelompok.
- 3) Pemupukan modal masyarakat.
- 4) Pengembangan usaha produktif.
- 5) Penyediaan informasi tepat-guna.

Apapun strategi pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan, harus memperhatikan upaya-upaya:

- 1) Membangun komitmen untuk mendapatkan dukungan kebijakan, sosial dan finansial dari berbagai pihak terkait.
- 2) Meningkatkan keberdayaan masyarakat.
- 3) Melengkapi sarana dan prasarana kerja para fasilitator.
- 4) Memobilisasi dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat.

b. Metode pemberdayaan masyarakat.

Dalam setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, setiap fasilitator harus memahami dan mampu memilih metode pemberdayaan masyarakat yang paling baik sebagai suatu “cara yang terpilih” untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakannya (Soesmono, 1975). Metode adalah suatu kerangka kerja untuk menyusun suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir,

menyusun gagasan, yang beraturan, berarah, dan berkonteks yang berkaitan (*relevan*) dengan maksud dan tujuan.

Dalam praktik pemberdayaan masyarakat, terdapat beragam metode, yang secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ragam Metode Pemberdayaan Masyarakat

No	Kelompok Metode	Ragam Metode	Keterangan
1	Tatap-muka	Percakapan/dialog, anjangan, anjang-karya, pertemuan, ceramah, diskusi, FGD, RRA, PRA, PLA, sekolah-lapang, pelatihan dan pameran	Individual Kelompok Massal
2	Percakapan tak langsung	Telepon, TV, Radio <i>Teleconference</i>	Individual kelompok
3	Demonstrasi	Demonstrasi cara, Demonstrasi hasil, Demonstrasi cara dan hasil	Kelompok
4	Barang cetakan	Foto, <i>pamphlet</i> , <i>leaflet</i> , folder, brosur, poster, baliho, dll	
5	Media-massa	Surat kabar, tabloid, majalah, Radio, <i>Tape-recorder</i> , TV, VCD, DVD	Media cetak Media Lisan Media Terproyeks
6	Kampanye	Gabungan dari semua metode di atas	

Selain metode-metode tersebut, ada beberapa metode pemberdayaan masyarakat “partisipatif” berupa:

1) RRA (*Rapid Rural Appraisal*).

RRA adalah metode penilaian keadaan desa secara cepat, yang dalam praktik, kegiatan RRA lebih banyak dilakukan oleh “orang luar” dengan tanpa atau sedikit melibatkan masyarakat

setempat. Menurut Chambers (1980) dalam Totok Mardikanto (2013) bahwa RRA merupakan teknik penilaian yang *relative* “terbuka, cepat, dan bersih” dibanding teknik yang cepat dan kotor berupa sekedar kunjungan yang dilakukan secara singkat oleh seorang “ahli” dari kota. RRA lebih di nilai efektif dan efisien di banding teknik yang “lama dan kotor” yang dilakukan melalui kegiatan *survey* yang dilakukan oleh tenaga professional yang dipersiapkan melalui pelatihan khusus. Teknik RRA itu sendiri meliputi:

- a) *Review/telaah data sekunder*, termasuk peta wilayah dan pengamatan lapang secara ringkas.
- b) *Observasi/pengamatan lapang secara langsung.*
- c) *Wawancara dengan informan kunci dan lokakarya.*
- d) *Pemetaan dan pembuatan diagram/grafik.*
- e) *Studi kasus, sejarah lokal, dan biografi.*
- f) *Kecenderungan-kecenderungan.*
- g) *Pembuatan kuisisioner sederhana yang singkat.*
- h) *Pembuatan laporan lapang secara cepat.*

Bahaya dari pelaksanaan kegiatan RRA adalah seringkali apa yang dilakukan oleh Tim RRA bahwa mereka telah melakukan praktik “partisipatif”, meskipun hanya dilakukan melalui kegiatan pengamatan saja dan dengan bertanya langsung kepada informan yang terdiri dari warga masyarakat setempat.

2) PRA (*Participatory Rapid Appraisal*).

PRA merupakan penyempurnaan dari RRA atau penilaian keadaan secara partisipatif. PRA lebih banyak dilakukan oleh “orang dalam” yang terdiri dari semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) dengan di fasilitasi oleh orang-luar yang lebih berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator di banding sebagai instruktur atau guru yang “menggurui”.

3) FGD (*Focus Group Discussion*).

FGD merupakan interaksi individu-individu (sekitar 10-30 orang) yang tidak saling mengenal yang oleh seorang pemandu (moderator) diarahkan untuk mendiskusikan pemahaman dan atau pengalamannya tentang sesuatu program atau kegiatan yang di ikuti dan atau di cermatinya. Pelaksanaan FGD di rancang sebagai diskusi kelompok terarah yang melibatkan semua pemangku kepentingan suatu program, melalui diskusi yang partisipatif dengan di pandu atau di fasilitasi oleh seorang pemandu dan seringkali juga mengundang narasumber.

4) PLA (*Participatory Learning and Action*).

PLA merupakan *payung* dari metode-metode partisipatif yang berupa RRA, PRA, PAR (*participatory action research*) dan PALM (*participatory learning method*). PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar (melalui: ceramah, curah-pendapat, diskusi, dll), tentang suatu topik seperti pesemaian, pengolahan lahan, perlindungan hama

tanaman, dan lain-lain yang kemudian diikuti aksi atau kegiatan riil yang *relevan* dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Melalui PLA akan di peroleh beragam manfaat, diantaranya:

- a) Segala sesuatu yang tidak mungkin dapat di jawab oleh orang luar.
 - b) Masyarakat setempat akan memperoleh banyak pengetahuan yang berbasis pada pengalaman yang di bentuk dari lingkungan kehidupan mereka yang sangat kompleks.
 - c) Masyarakat akan melihat bahwa masyarakat setempat lebih mampu untuk mengemukakan masalah dan solusi yang tepat di banding orang luar.
 - d) Melalui PLA, orang luar dapat memainkan peran penghubung antara masyarakat setempat dengan lembaga lain yang diperlukan. Di samping itu, mereka dapat menawarkan keahlian tanpa harus memaksakan kehendaknya.
- 5) SL atau Sekolah Lapang.

Sekolah lapang merupakan kegiatan pertemuan berkala yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat pada hamparan tertentu, yang diawali dengan membahas masalah yang sedang di hadapi, kemudian di ikuti dengan curah pendapat, berbagi pengalaman (*sharing*), tentang *alternative* dan pemilihan cara-cara pemecahan masalah yang paling efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.

6) Pelatihan partisipatif.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang terencana atau telah direncanakan sebelumnya. dan setiap kegiatan pemberdayaan harus mengacu pada kebutuhan yang dirasakan penerima manfaatnya, baik yang berkaitan dengan kebutuhan kini, dan kebutuhan masa mendatang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat atau memiliki relevansi tinggi dengan kebutuhannya tersebut. Pelatihan partisipatif di rancang sebagai implementasi metode pendidikan orang dewasa (POD), dengan ciri utama :

- a) Hubungan instruktur/fasilitator dengan peserta didik tidak lagi bersifat *vertical* tetapi bersifat *lateral/horizontal*.
- b) Lebih mengutamakan proses dari pada hasil, dalam arti, keberhasilan pelatihan tidak di ukur dari seberapa banyak terjadi alih pengetahuan, tetapi seberapa jauh terjadi interaksi atau diskusi dan berbagai pengalaman antara sesama peserta maupun antara fasilitator dan pesertanya.

Substansi materi pelatihan selalu mengacu kepada kebutuhan peserta. Karena itu, sebelum pelatihan dilaksanakan, selalu diawali dengan kontrak belajar, yaitu kesepakatan tentang substansi materi, urutan, tata waktu dan tempat.

4. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengembangan kapasitas masyarakat

Dalam pemberdayaan, yang menjadi titik sentralnya adalah masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan ketertinggalan. Dalam makna yang lebih luas Friedman (1992) mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi saja namun juga sektor politik, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar (*bargaining position*) baik secara nasional maupun internasional.

Dengan demikian, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai perolehan kekuatan dan kesempatan terhadap akses sumber daya untuk mencari nafkah, atau dengan kata lain pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik untuk mencapai suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai melalui perubahan sosial, yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melakukan tugas dan tanggungjawab hidupnya sehari-hari. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan potensi serta daya untuk mengembangkan dirinya kearah yang lebih baik dan

manusia pada dasarnya selalu bersifat aktif untuk meningkatkan kemampuan ataupun keberdayaan dirinya.

Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah untuk memperkuat daya (kemampuan dan posisi tawar) agar masyarakat semakin mandiri. Karena itu pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses penguatan kapasitas. Mardikanto dan Soebiato (2013) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kapasitas individu dan mengembangkan kapasitas kelembagaan atau kelompok.

Penguatan kapasitas adalah proses peningkatan kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan yang lain untuk memahami dan melaksanakan pembangunan dalam arti luas secara berkelanjutan. Penguatan kapasitas di sini adalah penguatan kemampuan yang di miliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun sistem atau jejaring antar individu dan kelompok/organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global (Mardikanto dan Soebiato, 2013:28). Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kapasitas adalah kemampuan individu, kelompok, organisasi dan kelembagaan untuk menunjukkan/memerankan fungsinya secara efektif, efisien dan berkelanjutan dan pusat pengembangan kapasitas adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pembangunan.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2013:70) bahwa pengembangan kapasitas pribadi, meliputi pengembangan kapasitas kepribadian, kapasitas

di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan. Dari ketiga bentuk pengembangan kapasitas tersebut sebagai modal dasar bagi masyarakat untuk lebih berdaya secara mandiri melalui potensi yang di miliki. Pengembangan kapasitas dunia kerja, akan merujuk pada karakteristik yang diperlukan bagi setiap individu sebelum memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas dalam melakukan pekerjaan, yang meliputi pengembangan sikap kewirausahaan, ketrampilan, motivasi kerja, studi banding dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan untuk mengembangkan kapasitas kelompok atau komunitas masyarakat adalah pemberdayaan yang dilakukan kepada sekelompok masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan berarti usaha untuk meningkatkan peran dan mengembangkan tata kelembagaan di tingkat masyarakat yang mampu mewadahi setiap gagasan, usulan dan aspirasi dari masyarakat untuk kemajuan dalam komunitasnya.

Mardikanto dan Soebiato (2013) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan lebih ditekankan pada pengembangan mutu organisasi, yang dilakukan melalui : 1) penguatan kejelasan visi, misi dan budaya organisasi; 2) kejelasan struktur organisasi, kompetensi dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif; 3) pengembangan sumber daya organisasi; dan 4) melakukan dan memfasilitasi interaksi dengan pemangku kepentingan (pemerintah).

Dalam lingkup pengembangan kapasitas pemerintah daerah, Grindle dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah meliputi tiga dimensi, yakni

pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan. Sumber daya manusia adalah sebagai faktor utama dalam pencapaian tujuan dari suatu organisasi karena manusia adalah sebagai motor yang menjalankan organisasi tersebut. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia menurut Grindle adalah inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia, secara umum berusaha untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan tanggungjawabnya secara profesional dan meningkatkan kemampuan teknisnya. Pengembangan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah melalui pengembangan sumber daya manusia lebih berfokus pada upaya untuk menyediakan tenaga atau aparatur yang profesional yang mencakup rekrutmen, pelatihan, sistem penggajian dan kondisi kerja.

Kemudian pengembangan kapasitas yang kedua adalah penguatan organisasi. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang dikelompokkan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, pengelompokan orang-orang tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip pembagian kerja, peranan dan fungsi, hubungan prosedur aturan standar kerja tanggungjawab dan otoritas tertentu (Santoso, 2012). Grindle dalam Santoso (2012) menyatakan bahwa dimensi penguatan organisasi lebih berfokus pada sistem manajemen, meningkatkan kinerja tugas dan fungsi spesifik, mikrostruktur dengan upaya yang dilakukan adalah memberikan sistem insentif, pemanfaatan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi dan struktur manajerial. Sedangkan dimensi pengembangan kapasitas yang ketiga adalah melakukan reformasi kelembagaan. Dimensi

ini lebih berfokus pada institusi dan sistem serta struktur makro dengan aktifitas yang dilakukan adalah meliputi aturan main rezim ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan hukum serta reformasi konstitusional. Dimensi ini lebih pada upaya untuk melakukan penataan kembali kelembagaan yang telah ada dengan melakukan perubahan mendasar, yakni perubahan pada tatanan kebijakan dan aturan yang lebih luas.

Pemberdayaan masyarakat berarti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa, sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya, sebagai suatu kekuatan internal serta tidak berkesan bahwa pengembangan itu adalah hasil kekuatan eksternal. Masyarakat berdaya berarti mampu, tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, melihat peluang, dapat memanfaatkan peluang itu, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan secara optimal, berani mengambil resiko atas keputusannya itu, mampu mencari dan menangkap informasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupannya serta mampu bertindak secara optimal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sungkowo Edy Mulyono (2011) tentang Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin bahwa penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis profil orang miskin yang menganggur, berusia produktif dan berpotensi di Kota Semarang; (2) menganalisis kebutuhan pasar ntuk mewujudkan usaha mandiri; (3)

memformulasikan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan usaha mandiri bagi; (4) merumuskan model pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan usaha mandiri; (5) mengestimasi biaya transaksi yang diperlukan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bagi orang miskin yang menganggur, dan berpotensi. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara kepada responden dan *key-persons*. Profil orang miskin yang menganggur di Kota Semarang, pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu fisik dan nonfisik. Secara fisik kemiskinan berupa status kepemilikan rumah, yaitu milik sendiri dan milik orang lain (kontrak), selain itu juga berupa status kepemilikan tanah, yaitu hak milik dan milik negara, serta berupa kondisi rumah, yaitu layak dan belum layak dan asset yang dimiliki berupa meja, kursi, almari, serta televisi. Kondisi rumah belum layak karena ukuran rumah kecil, dinding separuh tembok dan separuh papan, bahkan ada yang hanya dari papan atau tripleks saja.

Adapun strategi pemberdayaan masyarakat miskin yang menganggur, dan berpotensi terdapat 4 strategi sesuai skenario; skenario (1) memiliki kemauan tetapi tidak memiliki kemampuan, pelatihan di mulai dari awal sampai mampu melakukan usaha mandiri; skenario (2) memiliki kemampuan tetapi tidak memiliki kemauan, yaitu memberikan motivasi dan penyuluhan; skenario (3) memiliki kemauan dan kemampuan tetapi tidak mau berkembang karena merasa sudah cukup, kesadaran pandangan hidup melalui pendidikan keagamaan; dan skenario (4) memiliki kemauan serta kemampuan tetapi tidak mau bekerja karena malas, melalui motivasi dan pemberian contoh-contoh.

Sedangkan yang memiliki kemampuan dan kemauan, pelatihan usaha mandiri atau mencari alternatif ke wilayah lain. Adapun strategi secara keseluruhan melalui penyadaran, transformasi dan peningkatan intelektual. Sedangkan model strategi pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan perbaikan dan untuk biaya transaksi pemberdayaan yaitu biaya informasi, biaya pengambilan keputusan dan biaya operasional, perlu disesuaikan dengan kenaikan harga berlaku.

Usaha mandiri pada dasarnya diarahkan ke dunia usaha maupun dunia industri, di mana setiap usaha mandiri disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal, nasional, dan bila mana perlu internasional. Agar usaha mandiri dapat di capai maka pemerintah perlu memberikan bantuan baik berupa dana ataupun berupa informasi.

Aziz Muslim (2003) dalam Penelitiannya tentang Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat bahwa model pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan bahwa pembangunan bukan sekedar meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional (GNP) serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, tetapi yang lebih penting lagi adalah upaya meningkatkan kualitas manusia agar dapat meningkatkan partisipasi secara nyata dalam berbagai aktifitas kehidupan untuk mendorong terciptanya kegiatan produktif yang bernilai tinggi. Model pembangunan ini mencoba mengembangkan rasa keefektifan politis yang akan mengubah penerima pasif dan reaktif menjadi peserta aktif yang memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan, masyarakat yang aktif dan berkembang yang dapat turut serta dalam memilih isu kemasyarakatan.

Emiyati (2010) dalam penelitiannya tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara bahwa PPMK adalah salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digulirkan oleh pemerintah untuk memberdayakan masyarakat agar lebih berdaya, dengan memberikan dana bantuan langsung kepada masyarakat melalui pendekatan Tribina yang meliputi bina fisik, bina sosial dan bina ekonomi. Dengan adanya PPMK ini masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri. Program kegiatan yang dilakukan PPMK adalah pelatihan komputer dan dana bergulir.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PPMK adalah strategi yang berbasis aras mezzo. Strategi aras mezzo adalah salah satu strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh sekelompok klien. Strategi tersebut dilakukan melalui pelatihan komputer dan dana bergulir. Untuk pelatihan komputer, teknik pengajaran yang diberikan berupa bimbingan yaitu teori dan praktek. Teorinya adalah memberikan pengetahuan tentang teknik dan tata cara komputer. Praktek diberikan secara langsung melalui pelatihan di ruang komputer dan para peserta di uji satu persatu dengan baik. Sedangkan dana bergulir terkait dengan memberikan pinjaman modal kepada masyarakat untuk menambah modal usaha atau mengembangkan usahanya. Adapun manfaat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan komputer yaitu mereka bisa punya keahlian dibidang komputer dan dapat mengembangkan keahlian tersebut dengan membuka usaha sendiri. Sedangkan untuk dana bergulir

adalah mereka dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya dengan maju, adanya penambahan modal dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ramandita Shalifah (2013) tentang Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung Program Pemerintah Kota Bontang bahwa fungsi peran PKK adalah sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang sudah berjalan cukup baik, meskipun ada beberapa masukan bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan PKK untuk mendukung program pemerintah Kota Bontang, tetapi karena berjalannya kegiatan penyuluhan dalam memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat membantu meminimalisir masalah tersebut.

PKK merupakan salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. PKK adalah sebuah gerakan untuk membantu dan mendukung program-program pemerintah dengan mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti data warga, ibu hamil, bayi dan balita, kelahiran, kematian, sampai kegiatan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pemerintahan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengarah ada upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penerapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan kepentingan masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. PKK berperan besar dalam pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat.

Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Edi Darmawi (2014) tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong bahwa penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat di beri peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan yang diprogramkan. Pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang di hadapi serta potensi yang di miliki oleh daerahnya. dalam penelitian ini disimpulkan bahwasannya : (1) masih terdapat hambatan-hambatan kecil dalam membangun dan mengarahkan partisipasi masyarakat Desa talang Leak I, namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa tersebut telah cukup memadai dalam rangka pelaksanaan proyek PNPM-MP di desa mereka; (2) dari lima jenis partisipasi yang di kaji, ternyata bentuk partisipasi tenaga memiliki sumbangan yang sangat signifikan dalam pengerjaan proyek PNPM-MP; dan (3) Kepala Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong beserta aparatnya cukup aktif dan berhasil menjalankan fungsi dan perannya dalam mendorong dan mengarahkan partisipasi masyarakatnya sehingga cukup berhasil dalam menyelesaikan salah satu proyek PNPM-MP tersebut, sebagaimana diharapkan oleh masyarakat desanya.

Sitti Bulkis Bandjar (2009) dalam penelitiannya tentang strategi peningkatan mutu program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) di Kabupaten Maluku Tenggara bahwa program PEMP merupakan kebijakan Departemen Kelautan dan Perikanan yang sejak tahun 2000 dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum program PEMP bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi serta kegiatan ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Program PEMP di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan sejak Tahun 2001-2007 diharapkan dapat memberikan hasil yang positif kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya masyarakat nelayan. Adapun indikasi keberhasilan program PEMP tersebut akan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir, berfungsinya kelembagaan PEMP yang dibentuk, dan bergulirnya Dana Ekonomi Produktif (DEP). Namun sejauh ini, dampak dari pelaksanaan Program PEMP tersebut terlihat belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir setempat sebagaimana yang diharapkan, untuk itu dibutuhkan campur tangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Maluku Tenggara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk membantu dengan berbagai strategi kebijakan lainnya sehingga apa yang diharapkan dari pelaksanaan

program PEMP tersebut dapat tercapai. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan kajian dengan masalah utama adalah strategi peningkatan mutu program PEMP di Kabupaten Maluku Tenggara. Kajian ini telah dilaksanakan di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara sebagai kecamatan yang secara rutin dan paling banyak mendapat bantuan melalui program PEMP yaitu sejak tahun 2001-2007. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi status keberlanjutan program PEMP, mengidentifikasi elemen kinerja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program PEMP sehingga dapat dirumuskan strategi kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menunjang pelaksanaan program PEMP diwaktu mendatang. Pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder dilaksanakan dengan wawancara terhadap seluruh stakeholder yang menjadi sasaran evaluasi serta observasi lapangan. Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan status keberlanjutan dari pelaksanaan program PEMP di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara adalah dengan *metode Multi Dimensional Scalling (MDS)* dalam *Rapid Appraisal for Fisheries Status (RAPFISH)*. Metode RAPFISH digunakan untuk menentukan posisi relative dari setiap atribut pada elemen kinerja Program PEMP terhadap keberhasilan (*good*) dan kegagalan (*bad*). Metode ini didasarkan pada hasil MDS dari kinerja pelaksanaan Program PEMP di Kecamatan Kei Kecil- Kabupaten Maluku Tenggara dimana mencakup lima elemen kinerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan program PEMP, yaitu (1) Kelembagaan Program PEMP, (2) Pengelolaan LEPP-M3, (3) Kapasitas Pemanfaat Program, (4) Kemitraan, dan (5) Persepsi

Pemangku Kepentingan (*stakeholder*). Data untuk analisis ini diperoleh dari kuisioner yang di edarkan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program PEMP. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kinerja program secara menyeluruh tergolong “cukup” berdasarkan hasil analisis RAPFISH yang menunjukkan nilai 59,08. Ini berarti status keberlanjutan programnya berada pada kategori “cukup” yang juga berarti kinerja program PEMP telah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan meskipun demikian pelaksanaan program PEMP masih perlu disempurnakan dan diintensifkan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan program PEMP di Kabupaten Maluku Tenggara, dilakukan analisis Leverage dengan menggunakan RAPFISH. Dengan analisis Leverage ini dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing atribut terhadap keberhasilan elemen kinerja yang dievaluasi.

Ada lima strategi kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam memanfaatkan program PEMP yang merupakan program pemerintah yaitu (1) Strategi kebijakan penguatan kelembagaan PEMP dan SDM, (2) Strategi kebijakan sharing dana dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, (3) Strategi kebijakan peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, (4) Strategi kebijakan penataan sistem pengembalian dana bergulir, dan (5) Strategi kebijakan pengembangan kemitraan. Perancangan program dilakukan dengan menggunakan metode *Logical Framework Approach (LFA)*. Rancangan program strategi dalam rangka peningkatan Mutu Program PEMP di Kabupaten Maluku Tenggara adalah (1) Melaksanakan rapat koordinasi dan lokakarya antar elemen untuk

membahas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program PEMP, (2) Peningkatan kemampuan manajerial pengelola program PEMP maupun elemen PEMP lainnya, (3) Melakukan seleksi yang ketat dalam mengangkat TPD berdasarkan kualifikasi standar sesuai Pedoman Umum PEMP, (4) Melakukan monitoring dan supervise secara berkala, (5) Melaksanakan sosialisasi program PEMP melalui media dan berbagai sarana dan prasarana yang ada, dan (6) Peningkatan akses modal, pasar dan teknologi serta mengembangkan kelembagaan ekonomi dan jenjang kerjasama kemitraan.

Efendi Heru Setiawan (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Desa Selulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara bahwa secara keseluruhan evaluasi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di desa Selulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara telah terlaksana dengan baik, tingkat partisipasi sangat baik ditunjukkan dengan tanggapan positif dari masyarakat yang ikut serta dalam berbagai kegiatan, diantaranya pelatihan pertanian, pelatihan menjahit dasar, dan kejar paket b dan c, telah terbangun sarana-sarana pendukung yang berguna bagi kegiatan masyarakat, diantaranya gedung PAUD dan perlengkapannya, pembuatan parit dan satu jembatan ulin, tidak ada perubahan kepengurusan Tim Pengelola Kegiatan karena dinilai baik oleh masyarakat, adanya peningkatan anggaran pemerintah dari periode sebelumnya.

Hasil dari penelitian terdahulu diatas dapat dilihat secara rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

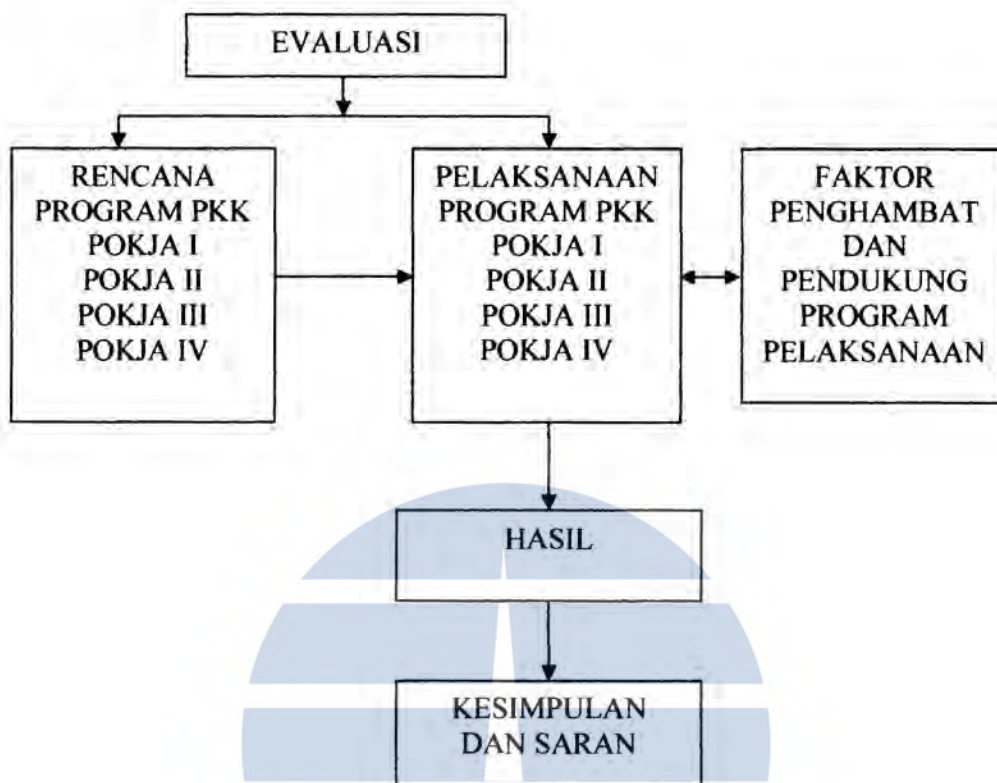
No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Sungkowo Edy Mulyono	Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Jalur Pendidikan Non Formal Untuk Mewujudkan Usaha Mandiri Bagi Orang Miskin. (2011).	Usaha Mandiri pada dasarnya diarahkan ke dunia usaha maupun dunia industri, dimana setiap usaha mandiri disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal, nasional, dan bilamana perlu internasional. Agar usaha mandiri dapat di capai maka pemerintah perlu memberikan bantuan baik berupa dana ataupun berupa informasi.
2.	Aziz Muslim	Pendekatan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. (2003).	Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pengambilan kebijakan berarti keterampilan analitis dan perencanaan akan menjadi teralihkan kepada mereka.
3.	Emiyati	Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Semper Barat Jakarta Utara. (2010).	Strategi Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PPMK adalah strategi yang berbasis aras mezzo.
4.	Ramandita Shalfiah	Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang. (2013).	Peran PKK adalah sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-program pemerintah Kota Bontang.

5.	Edi Darmawi	Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. (2014).	Partisipasi masyarakat dalam proyek PNPM-MP adalah partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi keahlian, partisipasi barang dan partisipasi uang.
6.	Sitti Bulkis Bandjar	Strategi Peningkatan Mutu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kabupaten Maluku Tenggara. (2009).	Strategi Kebijakan Mutu pelaksanaan program PEMP, perumusan strategi dilakukan dengan menggunakan Analitik Hirarki Proses (AHP). Perancangan program dilakuan dengan menggunakan metode <i>Logical Framework Approach</i> (LFA).
7.	Effendi Heru Setiawan	Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Desa Selulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. (2013).	Secara keseluruhan evaluasi program tersebut telah terlaksana dengan baik dengan dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan diantaranya melalui pelatihan, sarana-parsarana yang mendukung dan adanya anggaran yang meningkat dari periode sebelumnya.

Sumber : diolah dari berbagai jurnal penelitian



C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berdasarkan Rakernas VII PKK Tahun 2010 adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Untuk mewujudkan tujuannya, PKK merencanakan program-program yang telah disusun melalui kelompok kerja

(pokja) PKK yang terdiri dari 4 (empat) pokja sebagai pelaksana kegiatan yang terdiri dari:

1. Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program:
 - a. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 - b. Gotong Royong
2. Pokja II sebagai pelaksana kegiatan program:
 - a. Pendidikan dan Keterampilan
 - b. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
3. Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program:
 - a. Pangan
 - b. Sandang
 - c. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
4. Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program :
 - a. Kesehatan
 - b. Kelestarian Lingkungan Hidup
 - c. Perencanaan Sehat

Berdasarkan dari rencana tersebut maka tugas dari masing-masing pokja adalah melaksanakan program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, guna melihat program tersebut apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan pedoman program kerja masing-masing pokja maka perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan terhadap program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan program yang dilakukan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat telah sesuai atau menyimpang dari pedoman yang telah ditetapkan agar dapat

diketahui efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang dilaksanakan. Dari evaluasi tersebut akan dilihat apakah ada faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil temuan tersebut akan dilakukan analisis berdasarkan hasil wawancara, observasi dan data yang relevan dengan penelitian selanjutnya akan ditarik sebuah kesimpulan dan pemberian saran terhadap hasil dari penelitian.

D. Operasional Konsep

Variabel penelitian pada hakikatnya merupakan konsep yang nilainya ingin diketahui oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel yang dijabarkan dalam variabel konsep dan operasional. Adapun variabel konsep yang telah menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

1. Evaluasi program
2. PKK

Dalam mendukung dan mempertegas peneliti dalam mengungkap sebuah definisi konsep secara operasional, secara praktik, secara riil dan nyata dalam lingkup obyek penelitian yang diteliti. Adapun definisi operasional adalah:

1. Evaluasi program menurut Rossi (1979) adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan.
2. PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju

dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Dari variabel konsep dan operasional diatas sebagai indikator variabel pendukungnya adalah:

1. Evaluasi program meliputi:
 - a. Bentuk kegiatan.
 - 1) Bantuan dana.
 - 2) Pembinaan.
 - 3) Pelatihan.
 - 4) Pendampingan.
 - b. Partisipasi masyarakat.
 - 1) Keikutsertaan pasif (kehadiran) masyarakat dalam pelaksanaan program.
 - 2) Keikutsertaan aktif masyarakat dalam pelaksanaan program.
 - 3) Dampak/manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sasaran program.
2. PKK meliputi:
 - a. Pelaksanaan program PKK:
 - 1) Pembinaan kepada PKK secara berjenjang.
 - 2) Pelatihan yang diajarkan.
 - 3) Pelaporan.
 - 4) Administrasi.
 - b. Pendukung operasional:
 - 1) Dana yang menunjang.

- 2) Sarana dan Prasarana.
 - 3) Dukungan Lintas Sektor.
- c. Sumber Daya Manusia:
- 1) Tingkat Pendidikan pengurusnya.
 - 2) Tingkat Pemahaman program kegiatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam mengadakan suatu Penelitian, desain atau metode Penelitian merupakan hal yang sangat menentukan bagaimana suatu Penelitian dapat dilaksanakan. Sehingga apa yang Peneliti kaji dalam penelitiannya akan terungkap untuk kemudian di susun menjadi karya ilmiah yang sistematis. Mendapatkan kebenaran ilmiah dalam suatu karya ilmiah, maka sebelum melaksanakan penelitian perlu adanya metode yang dipergunakan dalam penelitian. Dengan memperhatikan tujuan dan kegunaan penelitian serta mempertimbangkan kendala-kendala yang di hadapi, maka desain penelitian yang akan digunakan Peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis level eksplanatif.

Menurut Miles dan Huberman (1994:6) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang melibatkan peneliti dalam hidup dan kehidupan masyarakat yang di teliti, tanpa mengganggu kehidupan mereka”. Penelitian kualitatif berangkat dari lapangan yang khusus untuk di tarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1992:21-22) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang di amati”.

Penelitian eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahnya sudah cukup, artinya sudah ada beberapa teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian

empiris yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Penelitian yang bisa berbentuk eksperimen selalu bertolak dari suatu hipotesa yang di peroleh dari suatu teori tertentu. Tujuan dari penelitian eksplanatif ini adalah menguji berbagai hipotesa tertentu dengan maksud membenarkan atau memperkuat hipotesa itu, mencari sebab-musabab dari suatu gejala, dan menentukan sifat dari hubungan antara satu atau lebih gejala atau variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Kelebihan dari Penelitian eksplanatif adalah penelitian dapat di kuasai oleh peneliti, sehingga dapat memperoleh ketepatan dalam pengukuran variabel-variabel yang di teliti. Sedangkan kelemahannya adalah sampai di manakah hasil penelitian tersebut berlaku.

Tipe penjelasan yang biasa adalah sebagai berikut:

1. *Causal explanations* merupakan penjelasan tentang apa penyebab dari beberapa peristiwa atau fenomena. Penjelasan kausal merupakan tipe yang sangat umum dari penjelasan yang digunakan jika hubungan adalah satu tentang sebab dan akibat.
2. *Structural explanations* merupakan penjelasan tentang apa peran abstrak atau universal, kode atau hukum yang memberi keterangan memuaskan tentang hubungan antara ciri-ciri dari sistem dan peran-peran yang menciptakan strukturmya.
3. *Interpretive explanation* yang bertujuan untuk membantu pemahaman.

Ada dua tipe utama penelitian eksplanasi, yaitu penelitian asosiasi yang disebut juga dengan nama penelitian *kovariasional*, dan penelitian kausal. Ini berhubungan dengan makna yang terkandung dalam hubungan antar-variabel

yang mungkin bermakna sebagai asosiasi (tidak menjelaskan sebab-akibat) atau hubungan kausal (menjelaskan sebab-akibat). Baik dalam penelitian korelasional maupun kausal, perhatian utama menentukan arah, besar atau kekuatan hubungan, dan bentuk-bentuk hubungan-hubungan yang diobservasi.

1. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian sebagai pusat perhatian penelitian dimaksudkan sebagai batas yang berguna untuk mencegah terjadinya pembiasan dalam mempersepsikan dan membahas masalah yang sedang diteliti. Pentingnya penetapan fokus penelitian diungkapkan oleh Lexy Moleong (2010) ada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Batas menentukan kenyataan ganda yang kemudian mempertajam fokus.
- b. Penetapan fokus dapat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus.

Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian, penting artinya dalam usaha memberi batasan penelitian. Dengan mengacu pada permasalahan yang ada, maka penetapan fokus penelitiannya sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari No.127 Pangkalan Bun sebagai lokasi penelitian. Penetapan lokasi penelitian di dasari oleh beberapa pertimbangan. Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa kesesuaian dengan substansi penelitian karena berdasarkan observasi awal ini banyak berhubungan dengan pengurus PKK dan upaya apa saja yang dilakukan oleh PKK dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera dan di kelompok PKK kecamatan/kelurahan dan desa untuk lebih mengetahui program PKK secara berjenjang. Pertimbangan lainnya adalah aksesibilitas dan kedekatan peneliti yang relatif besar terhadap lokasi penelitian dan substansi penelitian sehingga memudahkan proses penelitian.

B. Sumber Informasi

Menurut Loftland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian sumber data penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah informan yang akan di wawancarai oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan

data dokumen dan peristiwa dengan kelengkapan sumber data sebagai berikut:

1. Informan

Menurut Muhammad B dan Suwardi (2006) kata-kata dan tindakan orang-orang yang di amati atau di wawancarai merupakan data utama. Adapun informan yang akan di ambil informasinya oleh peneliti adalah :

a. Ketua	: 1 Orang
b. Wakil Sekretaris	: 1 Orang
c. Wakil Bendahara	: 1 Orang
d. POKJA I	: 3 Orang
e. POKJA II	: 3 Orang
f. POKJA III	: 3 Orang
g. POKJA IV	: 2 Orang
h. Kepala BPMD Kab. Ktw Barat	: 1 Orang
i. Kader PKK Kecamatan	: 2 Orang
j. Kader PKK Desa	: 1 Orang
Jumlah	: 18 Orang

Dari data informan di atas peneliti juga merupakan sumber informan karena peneliti bekerja di lokasi penelitian. Informan-informan tersebut adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan memadai mengenai masalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemilihan informasi ini didasarkan atas subyek penelitian yang menguasai masalah, memiliki data dan bersedia memberikan data. Penggalan informasi berakhir jika telah terjadi pengulangan informasi dan mencapai tingkat kejenuhan.

2. Dokumen.

Data dokumen dalam penelitian ini meliputi Surat Keputusan kepengurusan PKK, Struktur Organisasi PKK, Tugas dan Fungsi PKK, Foto-foto kegiatan, dan arsip surat dan arsip data. Di dalam penelitian ini juga terkumpul buku laporan tahunan PKK Kabupaten.

3. Peristiwa.

Peristiwa-peristiwa yang dianggap relevan dengan penelitian yang diamati secara serius baik pada observasi awal pada tahun 2014 ketika pertama kali peneliti bergabung di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK seperti pembinaan, pelatihan, lomba-lomba dan sosialisasi ke PKK Kecamatan, Kelurahan dan Desa, yang kemudian di perdalam lagi pada observasi mendalam pada saat penelitian dilaksanakan antara bulan Agustus sampai dengan Nopember 2016. Selanjutnya pengamatan dan observasi tersebut di catat dan di analisa sesuai dengan kebutuhan penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan diri sendiri sebagai instrument penelitian, yaitu dengan mengadakan perencanaan, pengamatan di lapangan dan melakukan wawancara kepada informan dalam rangka pengumpulan data primer. Instrumen yang terpenting dalam penelitian

kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Menurut Moleong (2010) bahwa peneliti adalah sebagai salah satu instrumen dalam penelitian kualitatif. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti *recorder dan kamera*. Tetapi kegunaan atau pemanfaatan alat-alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Peneliti sebagai instrumen (disebut "*Participant-Observer*") di samping memiliki kelebihan-kelebihan, juga mengandung beberapa kelemahan. Kelebihannya antara lain, pertama, peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dengan demikian, peneliti akan lambat laun "memahami" makna-makna apa saja yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata (*verstehen*). Ini adalah salah satu tujuan yang hendak di capai melalui penelitian kualitatif.

Kedua, peneliti akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi, data telah jenuh, dan penelitian dihentikan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak di batasi oleh instrumen (misalnya kuesioner) yang sengaja membatasi penelitian pada variabel-variabel tertentu saja.

Ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus menerus, dan secara gradual "membangun" pemahaman yang tuntas tentang sesuatu hal. Ingat, dalam penelitian kualitatif, peneliti memang "mengkonstruksi" realitas yang tersembunyi (*tacit*) di dalam masyarakat. Sementara beberapa kelemahan peneliti sebagai instrumen adalah:

Pertama, sungguh tidak mudah menjaga obyektivitas dan netralitas peneliti sebagai peneliti. Keterlibatan subjek memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti akan secara tidak sadar mencampur adukkan antara data lapangan hasil observasi dengan pikiran-pikirannya sendiri.

Kedua, pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama ini sangat di pengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Peneliti juga harus memiliki sensitifitas/kepekaan dan “*insight*” (wawasan) untuk menangkap simbol-simbol dan makna-makna yang tersembunyi. Lyotard (1989) mengatakan “lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis”.

Ketiga, peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya, diterima atau ditolak. Tetapi peneliti kualitatif harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat *plural* (beragam), sering tidak terduga sebelumnya, dan sulit ditentukan kapan selesainya. Ancar-ancar waktu tentu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal (waktu) dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif.

Obyektivitas dan keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh. Validitas data kualitatif mengacu pada ketepatan data yang diperoleh, apakah bisa di percaya atau tidak, semakin dapat di percaya, semakin valid. Sedangkan reliabilitas data kualitatif, lebih mengarah pada keajengan data. Artinya ketika data itu ditanyakan kepada orang lain hasilnya akan sama. Begitu juga kalau data itu ditanyakan pada waktu yang berlainan, hasilnya juga akan sama.

Menurut Moleong (2010) untuk pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan intepretasinya dengan mengupayakan temuan, dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan di setuju oleh subyek penelitian atau informan. Pengambilan data penelitian dilakukan secara terus menerus baik melalui pengamatan maupun wawancara. Pengamatan dilakukan secara berulang-ulang, selain untuk menemukan hal-hal yang konsisten, juga dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi kriteria *reliabilitas* data (tepatnya *triangulasi* data). Tanpa melakukan *triangulasi* data, maka data yang di peroleh akan bersifat dangkal dan lemah. Dangkal, karena hanya kulitnya saja yang bisa di peroleh, sementara isi intinya belum diperoleh. Lemah, karena data tersebut belum bisa di percaya sepenuhnya, karena belum melewati *ceck*, *recek*, dan *cross ceck*.

Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam buku sugiyono (2005) *triangulasi* dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Berdasarkan sumber data yang akan diteliti maka Peneliti menggunakan triangulasi Wiliam Wiersma sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih *kredibel*.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berusaha melakukannya sealam mungkin melalui pendekatan yang sangat intens kepada para pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Barat, kader PKK kecamatan, kader PKK kelurahan dan kader PKK desa serta para pejabat pemerintah yang

berwenang dalam hal ini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Kotawaringin Barat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*)

Peneliti melakukan orientasi di lingkungan Kantor PKK Kabupaten Kotawaringin Barat untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat oleh PKK. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dengan peran informan sehingga dapat mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan informan. Peneliti memiliki keuntungan dalam melakukan pendekatan karena sebelumnya sudah lebih mengenal beberapa informan yang terpilih.

2. Ketika berada di lokasi penelitian (*Getting Along*)

Peneliti menjalin hubungan pribadi yang lebih akrab dengan seluruh informan dengan cara memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuan penelitian dengan tetap memperhatikan karakteristik masing-masing informan. Hampir semua informan telah dikenal sebelumnya oleh peneliti sehingga proses ini berjalan dengan mudah. Didalam proses ini peneliti memperoleh informasi selengkapny serta menangkap makna intisari dari berbagai informasi yang diperoleh. sementara itu untuk berhubungan dengan informan dari PKK kelurahan dan kecamatan serta keluarga sasaran, peneliti menggali informasi dengan cara yang sangat informal dengan memberikan kesempatan

seluas-luasnya kepada informan untuk berbicara, sehingga penggalian informasi dapat berjalan dengan sangat akrab.

3. Proses pengumpulan data (*Logging The Data*)

Berdasarkan jenis dan sumber data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi di gunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila informan yang di amati tidak terlalu besar. Observasi ini dilakukan dengan melibatkan diri secara aktif dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yakni tinggal di lokasi penelitian dalam waktu yang relatif cukup lama, sehingga mengetahui secara langsung aktivitas dan interaksi masyarakat dalam hal yang di teliti.

Observasi dilakukan di Kantor PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sejak tahun 2014, peneliti tertarik dengan masalah bagaimana pelaksanaan program PKK dalam memberdayakan masyarakat. Observasi telah lama dilakukan karena peneliti juga sebagai pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari observasi awal

telah diidentifikasi beberapa masalah yang selanjutnya menjadi permasalahan penelitian dan di perdalam lagi pada observasi mendalam pada saat penelitian dilaksanakan antara bulan Agustus sampai dengan Nopember 2016. Selanjutnya pengamatan dan observasi tersebut di catat dan di analisa sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Wawancara.

Dalam wawancara di maksud adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Menurut Guba dan Lincoln (1981:169-170) wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Cirinya kurang tertata dengan baik, baik urutannya, temanya, maupun caranya. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang sulit untuk digali.

Berdasarkan dengan penetapan informan, wawancara akan dilakukan kepada elemen sebagai berikut: Ketua PKK Kabupaten, Wakil Sekretaris, Wakil Bendahara, Pokja I, II, III, dan IV, kader PKK Kecamatan, kader PKK Kelurahan, kader PKK Desa, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Kotawaringin Barat. Wawancara dilakukan di tempat kerja dan rumah sesuai dengan pekerjaan informan masing-masing. Wawancara dilakukan selama bulan Agustus sampai Nopember 2016. Untuk data-data dan informasi tertentu, peneliti melakukan *cross-check* guna mendapatkan kejenuhan data. Sebagian data dan informasi penelitian tidak diperoleh melalui wawancara melainkan melalui dokumen-dokumen, sehingga pada jenis data tersebut wawancaranya dilakukan untuk konfirmasi dan pelengkap.

c. Dokumentasi.

Menurut Arikunto (2002:135) “ Dokumentasi adalah dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”.

Teknik ini digunakan untuk menghimpun berbagai informasi dari bahan dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang mendukung analisa tentang program pemberdayaan masyarakat. Dokumen tersebut berupa data surat keputusan, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan dan foto-foto kegiatan. Data diperoleh di Kantor PKK Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengumpulan data dilakukan selama masa penelitian, yaitu bulan Agustus sampai Nopember 2016.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data yang diperoleh akan mempunyai arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Moleong (2010) “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema”.

Berdasarkan tipe penelitian diskriptif, maka setelah data terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan data yang diperoleh ke dalam bentuk yang mudah di baca dan di pahami yang pada dasarnya merupakan upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya di analisa secara kualitatif, artinya data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta interpretasi secara mendalam. Data yang ada di analisa serinci mungkin sehingga diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang memadai.

Teknik analisis data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif (dalam Miles dan Hubberman 1994). Dalam model analisa ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu : Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, dengan komponen-komponen analisa data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, maka peneliti menggunakan alat-alat bantu berupa catatan, *tape recorder* dan pedoman

wawancara (*interview guide*). Dalam hal ini saya selaku peneliti akan melakukan wawancara pada implementor yang berdasarkan pedoman wawancara. Data tersebut berupa:

- a. Pelaksanaan program PKK di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program PKK.
- c. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program PKK.

Pengumpulan data ini dilakukan sekaligus saat melakukan wawancara.

2. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh kemudian direduksi oleh peneliti dengan cara: pengkodean, klasifikasi data, menelusuri tema-tema, dan menulis memo. Selanjutnya, dilakukan pilihan terhadap data yang diperoleh di lapangan, data mana yang relevan dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir secara lengkap tersusun.

a. Penyajian data.

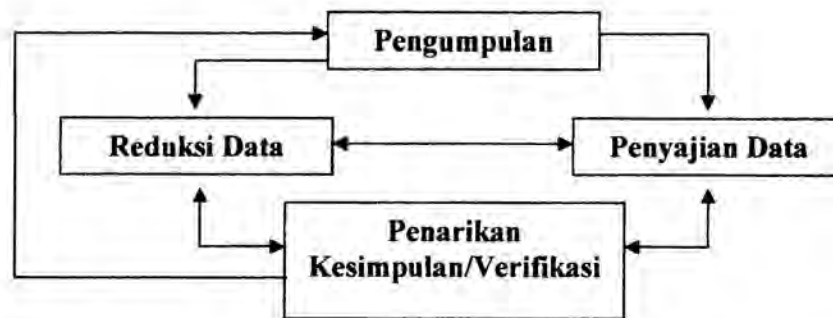
Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahap seperti ini, peneliti akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus

dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dan data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat di tarik kesimpulan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan berbagai jenis matrik, grafik, dan bagan atau bentuk kumpulan kalimat. semuanya di rancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang pacu, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menarik kesimpulan yang tepat.

b. Menarik kesimpulan/verifikasi.

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan makan tenaga yang relatif lebih banyak dengan peninjauan kembali atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data lain.

Secara bagan, Model interaktif komponen-komponen analisa data tersebut dapat dijelaskan dalam gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1
Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman (1994)

Reduksi data, pengujian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Tiga jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data, dimana data merupakan proses siklus interaktif. Peneliti bergerak di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data. Selanjutnya bergerak bolak balik di antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Kotawaringin Barat

Secara astronomis Kabupaten Kotawaringin Barat terletak diantara 1°19' sampai dengan 3°36' Lintang Selatan, 110°25' sampai dengan 112°50' Bujur Timur. Terletak di antara tiga kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Seruyan. Secara administratif batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Sukamara
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Sedangkan jumlah desa ada 81 desa dan 13 kelurahan dengan jumlah rukun tetangga (rt) sebanyak 1.118. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 269.629 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 142.742 dan perempuan sebanyak 126.887. Sedangkan untuk luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap luas Kabupaten (%)
1	2	3	4	5
1	Kotawaringin Lama	Kotawaringin Hulu	1.218	11,32
2	Arut Selatan	Pangkalan Bun	2.400	22,31
3	Kumai	Kumai	2.921	27,15
4	Pangkalan Banteng	Karang Mulya	1.306	12,14
5	Pangkalan Lada	Pandu Sanjaya	229	2,13
6	Arut Utara	Pangkut	2.685	24,96
	Jumlah		10.759	100,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Profil PKK Kabupaten

Lokasi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat berada di ibukota Pangkalan Bun yang beralamatkan di jalan Pangeran Antasari nomor 127 Pangkalan Bun. PKK Kabupaten Kotawaringin Barat berada di Kecamatan Arut Selatan yang merupakan kecamatan ketiga terluas dari enam kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. PKK dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui program-programnya yang telah di susun. Pelaksanaan program tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK dan Hasil Rakernas VII Tahun 2010 tentang Pedoman PKK.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berdasarkan Rakernas VII PKK Tahun 2010 adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri. Kesejahteraan keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang di bentuk berdasarkan perkawinan sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota, antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya.

Tim Penggerak PKK (TP-PKK) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendalian dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK. Anggota TP-PKK adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai TP-PKK. Pembina adalah unsur pendukung pelaksanaan program PKK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK. Penasehat PKK adalah tokoh/pemuka masyarakat yang karena keahliannya, pengetahuan dan pengalamannya mau membantu untuk keberhasilan pelaksanaan gerakan PKK.

Sebagai acuan atau arah dalam melaksanakan programnya PKK Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada Visi dan Misi yang telah di susun. Adapun Visi dan Misi dari PKK Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

a. Visi gerakan PKK.

Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

b. Misi gerakan PKK.

- 1) Meningkatkan mental spriritual, perilaku hidup dengan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak azasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang selaras, serasi dan seimbang di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- 2) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan yang diperlukan, dalam upaya mencerdaskan kehidupan masyarakat serta pendapatan keluarga;
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri, Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK, sandang dan perumahan serta tata laksana rumah tangga yang sehat;

- 4) Meningkatkan derajat kesehatan, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana dalam semua aspek kehidupan dan perencanaan ekonomi keluarga dengan membiasakan menabung;
- 5) Meningkatkan pengelolaan Gerakan PKK baik kegiatan pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat;
- 6) Menjadikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sejahtera, maju, adil dan mandiri menuju kejayaan.

c. Tujuan gerakan PKK.

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

d. Sasaran gerakan PKK.

Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang mental spiritual dan fisik material.

e. Penyelenggaraan Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dilakukan dengan 10 Program Pokok PKK meliputi :

- 1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
- 2) Gotong Royong

- 3) Pangan
- 4) Sandang
- 5) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
- 6) Pendidikan dan Keterampilan
- 7) Kesehatan
- 8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- 9) Kelestarian Lingkungan Hidup
- 10) Perencanaan Sehat

f. Tugas dan fungsi TP-PKK.

Adapun tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil Rakernas VII Tahun 2010 yaitu:

1) Tugas.

- a) Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
- b) Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK.
- c) Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/Kelompok-kelompok PKK di bawahnya.
- d) Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Pembina TP-PKK setempat dan kepada Ketua Umum/Ketua TP PKK setingkat di atasnya.

- e) Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.
- 2) Fungsi.
- a) Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK.
 - b) Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, Pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

Secara khusus tugas dan fungsi TP PKK kabupaten adalah:

- 1) Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas VII PKK dan Rakerda sesuai dengan 10 program Pokok PKK.
- 2) Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP-PKK kecamatan.
- 3) Melakukan monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP-PKK kecamatan dalam pelaksanaan program.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.
- 5) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja TP-PKK.
- 6) Menerima, mengolah dan mengirimkan laporan tahunan dan laporan khusus kepada TP-PKK Provinsi dan ketua Pembina TP PKK kabupaten.
- 7) Mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota Pembina TP PKK kabupaten.

- 8) Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, LSM, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

10 Program Pokok PKK tersebut di bagi dalam kelompok kerja (Pokja) sebagai pelaksana kegiatan yang terdiri dari :

1) Pokja I sebagai pelaksana kegiatan program :

- a) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- b) Gotong Royong.

2) Pokja II sebagai pelaksana kegiatan program :

- a) Pendidikan dan Keterampilan.
- b) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

3) Pokja III sebagai pelaksana kegiatan program :

- a) Pangan.
- b) Sandang.
- c) Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga.

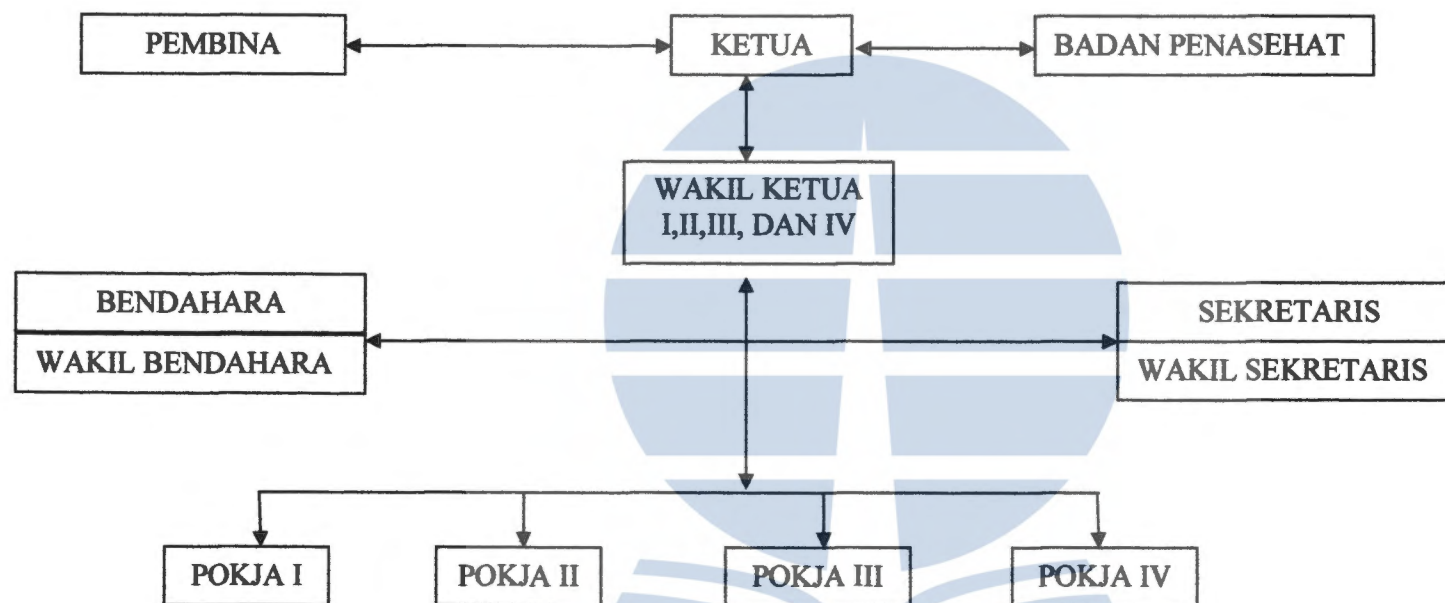
4) Pokja IV sebagai pelaksana kegiatan program :

- a) Kesehatan.
- b) Kelestarian Lingkungan Hidup.
- c) Perencanaan Sehat.

Sebagai dasar pelaksanaan harus di bentuk suatu kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat. Struktur kepengurusan PKK kabupaten, kecamatan dan kelurahan ditetapkan oleh Bupati sedangkan untuk desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Kepala Desa dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK membentuk kelompok PKK dusun/lingkungan/rw, rt dan kelompok dasawisma.

Struktur kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana pada Gambar 4.1 sebagai berikut:





Gambar 4.1
Struktur TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat
Sumber : Data Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 11/II/Tahun 2013 tentang perubahan pertama kali susunan pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat masa bhakti 2001-2016 dan untuk tahun 2015 Ketua PKK Kabupaten Kotawaringin Barat Ny. Hj. Yustina Ujang Iskandar, SH, MH mengalami pergantian ke Ny. Desmalasanti Bambang Purwanto dengan Keputusan Pj.Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah nomor: 04/KEP/PKK PROV/X/2015 tentang pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dan pergantian beberapa anggota yang baru dengan Surat Perintah Tugas Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat nomor: 31/Skr/PKK.KTB/I/2015 an. Titiek Sriyanti, nomor: 9/ST/PKK.KTB/I/2016 an. Adi Budiarto, SP dan nomor: 10/ST/PKK.KTB/I/2016 an. Samsudin, SKM, M.Si. Jumlah pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 39 orang dan di bantu oleh tenaga sekretariat sebanyak 3 orang. Dari data pengurus yang ada, jumlah berdasarkan pendidikan terakhir dapat dikelompokkan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Pengurus

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	25
2	S1	10
3	S2	6
4	S3	1

Sumber: Data TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

Sedangkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekretariat Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Sarana dan Prasarana PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Ket
1	Kantor	1 Unit	Baik
2	Aula Pertemuan	1 Unit	Baik
3	Komputer	2 buah	Baik
4	Printer	1 buah	Baik
5	Kipas angin	2 buah	Baik
6	Motor roda dua	1 unit	Baik
7	Sound Sistem	1 unit	Baik
8	Meja kerja	7 buah	Baik
9	Kursi ketua	1 buah	Baik
10	Kursi lipat	100 buah	Baik
11	Lemari administrasi	8 buah	Baik
12	Papan data	7 buah	Baik
13	Kursi tamu	2 unit	Baik
14	Televisi	1 buah	Baik
15	Podium	1 buah	Baik

Sumber : Data TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

B. Hasil Penelitian

Program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki tujuan yaitu meningkatkan peran serta dan pemahaman kader PKK agar mampu menyuluh, memotivasi dan menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan program-program PKK. Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat
 - a. Visi dan Misi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan SN selaku pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat ketika peneliti menanyakan bagaimana visi dan misi PKK

Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah tercapai dan jawabannya sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Berdasarkan visi dan misi yang ada kami menuangkannya melalui program-program yang dilaksanakan di masing-masing Pokja. Jadi visi dan misi ini sudah dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dengan baik karena program sudah dilaksanakan sesuai target yang ingin di capai”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama tentang bagaimana visi dan misi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah tercapai kepada pengurus PKK lainnya NS tentang Visi dan Misi PKK apakah sudah tercapai, dan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Sudah tercapai tapi belum maksimal ya salah satunya pembinaan yang belum semua dapat di bina”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Hal senada juga disampaikan oleh informan DD selaku anggota Pokja II dalam wawancara dengan peneliti terkait visi dan misi PKK apakah sudah tercapai, dan jawabannya sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Sudah tercapai hanya belum maksimal. Karena terkendala pembinaan yang kurang ke kecamatan”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa visi dan misi PKK sudah dilaksanakan melalui program yang direncanakan dan telah dilaksanakan sesuai target yang di capai hanya saja belum maksimal karena belum tersentuhnya semua PKK Kecamatan terkait program ataupun pembinaan yang ada. Padahal PKK

Kabupaten secara berjenjang membawahi 6 kecamatan yang ada namun mengingat kecamatan juga tidak mampu melaksanakan program secara maksimal sehingga PKK Kabupaten banyak langsung turun ke desa.

b. Tugas dan fungsi PKK Kabupaten.

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus PKK Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada pedoman hasil Rakernas VII tahun 2010 bahwa ada 8 (delapan) tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat yakni:

- 1) Menyusun rencana kerja sebagai penjabaran hasil Rakernas VII PKK dan rakerda sesuai dengan 10 program pokok PKK.

Hal ini peneliti tanyakan kepada informan SN tentang bagaimana penyusunan program kerja di PKK Kabupaten dan hasil wawancaranya seperti berikut ini:

“Untuk penyusunan anggaran di Kabupaten Kotawaringin Barat diawali dengan rapat pengurus Tim Penggerak PKK dan hasil rapat di buat proposal dan diajukan ke Bupati dan apabila proposal di setujui, selanjutnya DPKD dapat menganggarkan sesuai persetujuan dari Bupati. Selanjutnya di bahas dalam forum SKPD dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Maka selanjutnya dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan dijabarkan dalam DPA/SKPD BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat karena PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dananya tersedia atau di alokasi oleh DPKD kepada BPMD”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan DD tentang bagaimana penyusunan program kerja dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Program di susun berdasarkan program yang sudah ada, untuk program yang belum dapat dianggarkan tahun ini maka akan diusulkan pada tahun berikutnya”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas bahwa peneliti telah melihat dokumen berupa penyusunan program PKK telah dilaksanakan melalui rapat dengan adanya undangan rapat dan daftar hadir serta notulen rapatnya kemudian dokumen proposal pengajuan dananya setelah di sepakati oleh semua pihak dan program yang telah di setuju kemudian dilaksanakan sesuai target. Berdasarkan hasil tersebut PKK telah menyusun program kerja dengan baik sebelum pelaksanaan yang akan dilaksanakan karena tanpa adanya program kerja yang jelas pengurus PKK tidak dapat melaksanakan programnya dan tidak dapat melihat target yang ingin di capai. Berdasarkan program kerja Tim Penggerak PKK untuk melaksanakan 10 program pokok PKK dari tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut :



Tabel 4.4
Program Kerja Tim Penggerak PKK
Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Program	2013	2014	2015
1	Lomba Menu 3B dan serba ikan	√	√	√
2	Pelatihan Kadarkum	√	√	√
3	Pelatihan UP2K	√	√	√
4	Pelatihan PAUD	√	√	
5	Pelatihan Posyandu	√	√	
6	Peringatan HKG PKK	√	√	√
7	Lomba Kadarkum	√	√	√
8	Lomba UP2K	√		
9	Lomba 10 Program Pokok PKK	√	√	√
10	Lomba UP2K	√	√	√
11	Lomba PAUD	√	√	√
12	Jambore PKK			√
13	Pelatihan LP3PKK		√	√
14	Lomba cerdas cermat PKK			√
15	Sosialisasi Dasawisma			√
16	Lomba Posyandu	√	√	√
17	Lomba Toga	√	√	√
18	Pembinaan	√	√	√
19	Monitoring	√	√	√
20	evaluasi	√	√	√

Sumber : DPA SKPD PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

Atas dasar inilah PKK kabupaten melaksanakan program-programnya yang di susun berdasarkan tugas dan fungsi dimasing-masing Pokja sebagaimana dalam sasaran program kerja Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat di lihat dalam tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Sasaran Program Kerja Tim penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Program	2013	2014	2015	Sasaran Program		
					2013	2014	2015
1	Lomba Menu 3B dan serba ikan	√	√	√	Kader PKK Kab	Kader PKK Kab	Kader PKK Kab
2	Pelatihan Kadarkum	√	√		Kader PKK Kec. Aruta: 6 org Kec. Kolam: 6 org Kec. P. Banteng: 6 org Kec. P. Lada : 6 org Kec. Kumai: 7 org Kec. Arut Selatan: 8 org	Kader PKK Kec. Aruta: 6 org Kec. Kolam: 6 org Kec. P. Banteng: 8 org Kec. P. Lada : 5 org Kec. Kumai: 7 org Kec. Arut Selatan: 7 org	
3	Pelatihan UP2K	√	√	√	Kader PKK Kec. Aruta: 6 org Kec. Kolam: 6 org Kec. P. Banteng: 6 org Kec. P. Lada : 6 org Kec. Kumai: 7 org Kec. Arut Selatan: 9 org	Kader PKK Kec. Aruta: 4 org Kec. Kolam: 4 org Kec. P. Banteng: 9 org Kec. P. Lada : 7 org Kec. Kumai: 3 org Kec. Arut Selatan: 4 org PKK Kab: 8 org	
4	Pelatihan PAUD	√	√		Kader PKK Kec. Aruta: 39 org Kec. Kolam: 39 org Kec. P. Banteng: 51 org Kec. P. Lada : 32 org Kec. Kumai: 39 org	Kader PKK Kec. Aruta: 40 org Kec. Kolam: 40 org Kec. P. Banteng: 40 org Kec. P. Lada : 40 or Kec. Kumai: 40 org	

					Kec. Arut Selatan: 39 org	Kec. Arut Selatan: 40 org	
5	Pelatihan Posyandu	√	√		Kader PKK Kec/Desa/Kel Kec. Aruta: 6 org Kec. Kolam: 8 org Kec. P. Banteng: 6 org Kec. P. Lada : 7 org Kec. Kumai: 6 org Kec. Arut Selatan: 7 org	Kader PKK Desa Kec. Arsel: 4 org Kec/Desa/Kel.Kolam: 15 org Kab Kobar: 6 org Kec/ Desa P. Lada : 10 org Kec. Kumai: 5 org	
6	Peringatan HKG PKK	√	√	√	Kader PKK se-Kobar	Kader PKK se-Kobar	Kader PKK se-Kobar
7	Lomba Kadarkum	√	√	√	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
8	Lomba 10 Program Pokok PKK	√	√	√	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
9	Lomba UP2K	√	√	√	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
10	Lomba PAUD	√	√	√	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
11	Jambore PKK			√			Kader PKK Kab/Desa/Kel
12	Pelatihan LP3PKK		√	√		Kader PKK Kab: 12 orang Kec/Desa. Kumai: 16 org Kec. Arut Selatan/Kel: 6 org	Kader PKK Kec. P. Banteng: 10 org Kec P. Lada: 10 org Kec. Arut Selatan/Kel: 10 org
13	Lomba cerdas cermat PKK			√			6 Kecamatan

14	Sosialisasi Dasawisma			√			Desa Pangkalan Tiga dan Kelurahan Madurejo
15	Lomba Posyandu	√	√	√	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
16	Lomba Toga	√	√	√	6 Kecamatan	6 Kecamatan	6 Kecamatan
17	Pembinaan	√	√	√	Kec/Desa dan Kelurahan	Kec/Desa dan Kelurahan	Kec/Desa dan Kelurahan
18	Rapat Rutin	√	√	√	Sekretariat PKK Kab	Sekretariat PKK Kab	Sekretariat PKK Kab

Sumber : DPA PKK Kabupaten Kotawaringin Barat



- 2) Memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program PKK kepada TP-PKK kecamatan.

Dalam hal ini peneliti tanyakan kepada informan SA selaku pengurus PKK terkait tugas dan fungsi PKK dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan di PKK kecamatan, desa dan kelurahan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sudah hanya untuk desa belum semuanya karena ibaratkan lahan kalau tidak pernah di datangngi ya seperti itulah tapi kalau kita kunjungi maka akan terlihat lahan itu”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan SY selaku pengurus Pokja terkait fungsi petunjuk, bimbingan dan pembinaan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Iya sampai ke desa”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.00 WIB).

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada informan lainnya YL selaku Ketua PKK Kecamatan Arut Selatan tentang apakah pernah mendapat pembinaan yang dilakukan oleh PKK kabupaten dan jawaban informan sebagai berikut:

“Pernah, dan juga apabila PKK Kabupaten mengundang ke desa wilayah binaan kami juga melaksanakan pembinaan”. (wawancara pada tanggal 7 September 2016 pukul 10.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada ibu RT selaku Ketua PKK Desa Sungai Melawen terkait pembinaan yang dilakukan oleh PKK kabupaten sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut:

“Ada, PKK kabupaten pernah membina tentang administrasi PKK di Desa Sungai Melawen”. (wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 13.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa PKK Kabupaten telah melakukan pembinaan, petunjuk, dan bimbingannya dalam melaksanakan program-program PKK di PKK kecamatan, desa maupun kelurahan. Dengan adanya pembinaan, petunjuk dan bimbingannya diharapkan mampu meningkatkan pemahaman para kader PKK di kelurahan, desa maupun kecamatan. Karena PKK Kabupaten merupakan arahan bagi PKK dibawahnya untuk melaksanakan program-program PKK.

- 3) Melakukan monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada TP-PKK kecamatan dalam pelaksanaan program.

Peneliti menanyakan tentang monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan yang dilakukan oleh PKK kabupaten kepada informan SN dalam wawancara dan jawabannya sebagai berikut:

“Untuk pengendalian kita selalu mengadakan monitoring dan evaluasi ditiap-tiap kecamatan maupun di desa dan ada waktu-waktu tertentu yang kita undang PKK kecamatan atau desa untuk melaksanakan kegiatan rapat evaluasi pengendalian kegiatan dimasing-masing desa dan kecamatan”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan RM selaku pengurus Pokja II tentang monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan oleh PKK Kabupaten dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sudah dengan melakukan monitoring ke kecamatan, desa dan kelurahan serta melakukan evaluasi terhadap hasil program yang dilaksanakan terkait peningkatan pengetahuan para kader”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa PKK Kabupaten juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program PKK apakah dapat mencapai target sesuai yang diharapkan, tanpa evaluasi dan monitoring PKK Kabupaten tentunya tidak dapat menilai bagaimana keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan data pembinaan melalui surat perintah tugas dan foto dokumentasi yang ada di sekretariat PKK Kabupaten.

4) Melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan.

Peneliti menanyakan kepada informan SN terkait bagaimana administrasi di PKK Kabupaten Kotawaringin

Barat dan jawaban hasil wawancara sebagaimana telah dikatakan berikut ini:

“Di PKK ada staf yang diperbantukan oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat jadi proses administarsi sudah berjalan dengan baik karena kami dari sekretariat itu selalu berpegang kepada aturan yang ditentukan oleh hasil Rakernas begitu juga dengan PKK kecamatan, desa, dan kelurahan”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan tentang bagaimana administrasi di Pokja seperti apa kepada informan NS selaku pengurus Pokja III sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

“Untuk masing-masing di Pokja ada laporan, setiap rapat rutin ada laporan dimasing-masing Pokja”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan tentang pertanggungjawaban administrasi yang dilakukan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini kepada informan RE selaku Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat dalam wawancara sebagai berikut:

“Selama ini cukup bagus, PKK telah melaksanakan administrasi dengan baik terutama menyangkut hal pertanggungjawaban keuangan sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang keluar apapun bentuknya rupiah tetap harus ada pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Jadi alhamdulillah PKK selama ini berjalan dengan tertib dalam hal administrasi”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan SPA terkait Bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan oleh PKK Kabupaten dan hasil wawancara peneliti dengan SPA sebagai berikut:

“Selama ini berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dalam melengkapi berkas-berkas/dokumennya untuk diajukan pertanggungjawaban keuangannya untuk di proses keuangan selanjutnya”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 15.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa selama ini PKK Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan tertib administrasi baik administrasi di sekretariat maupun administrasi keuangan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan pedoman PKK hasil Rakernas VII tahun 2010. Melalui administrasi yang baik maka kemajuan suatu program dapat di ukur melalui data yang tepat sesuai administrasi yang baik dan tertib.

- 5) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja TP-PKK.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan DS selaku Ketua TP-PKK Kabupaten terkait upaya apa saja yang dilakukan untuk peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan Kinerja TP-PKK Kabupaten sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“PKK kabupaten selalu turun kelapangan dan selalu memberikan kemudahan bagi kader-kader untuk bertanya apa yang belum diketahui melalui via telepon walaupun tidak turun kelapangan. PKK siap kapan saja membantu para kader”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB).

Hal yang sama juga peneliti tanyakan kepada informan SN tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan Kinerja TP-PKK Kabupaten dan hasil wawancaranya adalah:

“Kita selalu berupaya dengan maksimal untuk pencapaian target program yang telah di susun baik dari segi peningkatan kader melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi program dengan mengadakan lomba-lomba 10 program pokok PKK”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada SA selaku pengurus Pokja I tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan Kinerja TP-PKK Kabupaten dan hasil wawancaranya dengan peneliti sebagai berikut:

“Tidak ada untuk Pokja I karena selama ini programnya kami ikut program yang ada saja”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tentang upaya apa saja yang dilakukan untuk peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan Kinerja TP-PKK Kabupaten bahwa sudah dilakukan upaya melalui kegiatan turun ke lapangan, pelatihan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan lomba-lomba. Namun hal yang berbeda dikatakan oleh salah satu informan PKK menurut SA itu tidak ada karena selama ini menurut informan tersebut hanya mengikuti program yang dilaksanakan oleh lintas sektor. Ketika peneliti kaji lebih dalam bahwa hasil wawancara

tersebut dapat dibuktikan oleh informan SN dan DS melalui dokumen berupa laporan pelatihan, pembinaan serta dokumentasi foto kegiatan sehingga peneliti menilai masih adanya kurang koordinasi antara pengurus PKK itu sendiri.

- 6) Menerima, mengolah dan mengirimkan laporan tahunan dan laporan khusus kepada TP-PKK provinsi dan Ketua Pembina TP-PKK kabupaten.

Peneliti menanyakan hal ini kepada informan SN selaku wakil sekretaris terkait laporan tahunan PKK apakah ada di buat sebagaimana dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Ada, laporan itu memang kita kirim ke Bupati sebagai Pembina dan PKK Provinsi sebagai pertanggungjawaban kegiatan setiap akhir tahun dan itu merupakan kewajiban berdasarkan hasil Rakernas setiap kegiatan harus dilaporkan setiap akhir tahun”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut kemudian peneliti melihat dokumen laporan bahwa PKK Kabupaten Kotawaringin Barat telah membuat laporan baik laporan tahunan, laporan kegiatan maupun laporan hasil perjalanan dinasny sehingga dokumen laporan sangat menunjang data-data yang ada di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.

- 7) Mengadakan konsultasi dengan ketua dan anggota pembina TP-PKK kabupaten.

Peneliti menanyakan kepada informan DS selaku Ketua PKK terkait konsultasi kepada Ketua Pembina dan dinas

terkait selaku anggota pembina TP-PKK Kabupaten sebagaimana dalam hasil wawancaranya adalah:

“Kita selalu konsultasi dan mohon bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan program-program PKK karena kita adalah mitranya pemerintah yang sebagai penggerak dalam mendukung program-program pemerintah. Selain itu terkait dana kita selalu memohon persetujuan dukungan dana untuk kegiatan operasional kegiatan PKK”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.30 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan SN tentang apakah ada konsultasi dengan Ketua pembina PKK sebagaimana dalam hasil wawancara berikut ini:

“Tentu ada karena PKK kabupaten dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dan berkonsultasi kepada ketua pembina PKK maupun dinas terkait selaku anggota pembina PKK dalam pelaksanaan program-program yang ada di PKK kabupaten karena tanpa adanya dukungan dari pembina PKK maka program PKK tidak dapat berjalan dengan baik”. (wawancara pada tanggal 31 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa PKK Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan tugasnya sebagai mitranya pemerintah karena di setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu berkoordinasi dengan lintas terkait maupun pemerintah guna menunjang semua kegiatan PKK. Hal ini didukung data berupa dokumentasi foto kegiatan.

- 8) Mengadakan kerja sama dengan mitra kerja dari instansi terkait, lembaga kemasyarakatan, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

Peneliti menanyakan terkait apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh PKK Kabupaten kepada RM selaku pengurus Pokja II dalam wawancara sebagaimana berikut ini:

“Tentu ada, Pokja II selalu berkerja sama dengan Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan AS selaku pengurus Pokja IV tentang apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh PKK Kabupaten dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Iya, komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dengan pengelola atau pengurus PKK Kabupaten kebawah sampai dasawisma bahwa kita sudah mempunyai satu persepsi bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan secara umum menuju goals atau tujuan dari pembangunan kesehatan jadi seperti kegiatan-kegiatan desa siaga kemudian beberapa program seperti ODF (Open defecation free) stop buang air besar sembarangan itu juga merupakan upaya yang sangat sinergi dengan Pokja IV”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa PKK Kabupaten Kotawaringin Barat telah melakukan kerja sama dengan lintas sektor seperti kegiatan Open defecation free (ODF) bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan masyarakat agar memiliki kehidupan yang bersih dan sehat demi terwujudnya keluarga yang sehat dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kesehatan ingin mengajak masyarakat agar stop buang air sembarangan dan

mengarahkan mereka untuk membuang air besar maupun kecil di tempat toilet umum atau di WC masing-masing. Setiap rumah mulai sekarang diarahkan untuk memiliki wc atau kamar mandi sendiri karena rumah-rumah masyarakat terutama yang di daerah pinggiran sungai dan di desa pedalaman rata-rata belum ada wc masing-masing mereka masih menggunakan jamban di pinggiran sungai dan langsung buang ke tanah sehingga banyak menimbulkan berbagai penyakit menular dan tidak menular. Untuk mencegah hal tersebut pemerintah bersama PKK Kabupaten berkomitmen melaksanakan program ODF ini dengan cara memberikan penyuluhan, himbauan dan mengajak peran serta pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dapat mewujudkan program tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan membangun wc atau toilet maupun kamar mandi yang didanai dari pemerintah desa melalui ADD maupun melalui arisan warga.

c. Data pokja-Pokja.

1) Pokja I.

- a) Hasil wawancara tentang program penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan MC tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja I terkait

program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah pembinaan PKDRT, pelatihan kadarkum dan lomba kadarkum, pengajian, arisan dan pembinaan pola asuh anak”. (wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama terkait program penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada informan SA selaku anggota Pokja I dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Penghayatan Pancasila seperti pengajian, pelatihan kadarkum dan lomba kadarkum”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan TS selaku anggota Pokja I terkait apa saja program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

“Program penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah pembinaan pengajian, pembinaan kelompok rukun kematian dan pelatihan kadarkum”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program penghayatan dan pengamalan Pancasila apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada MC dan menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Untuk pelatihan kadarkum alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, kegiatan dilaksanakan satu hari dan untuk target peserta sudah terpenuhi, untuk pelatih kita bekerjasama dengan polisi, BPPKB dan dari PKK. Dan ada laporan kegiatan hasil dari pelatihan tersebut sebagai

pertanggungjawaban. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan kita melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksi dari Pokja I dan hasil dari pembinaan tersebut selalu kita laporkan baik secara tertulis maupun lisan kepada ibu ketua”. (wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada SA tentang pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan Pancasila apakah sudah berjalan dengan baik dan pernyataannya kepada peneliti seperti berikut ini:

“Untuk pelatihan kadarkum berjalan dengan semestinya saja dan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan untuk pembinaannya dari kita sudah baik hanya saja para kader yang ada di desa masih susah karena banyak yang masih baru-baru”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada TS tentang bagaimana pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan Pancasila apakah sudah berjalan dengan baik dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Untuk kegiatan yang ada di Pokja I seperti pelatihan dan lomba kadarkum serta pembinaan-pembinaan sudah berjalan dengan baik karena sudah dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas tentang pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dilaksanakan adalah pelatihan kadarkum, lomba kadarkum, pembinaan, pengajian dan pembinaan pola asuh anak sudah dilaksanakan cukup baik. Untuk kegiatan pelatihan keluarga sadar hukum (kadarkum)

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para kader untuk bisa memahami tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga para kader mampu melakukan penyuluhan kepada keluarga di masing-masing wilayah agar terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari kader-kader PKK kecamatan dan desa. Jumlah pelatihnya ada 4 orang yang terdiri dari PKK Kabupaten, Polres Pangkalan Bun, Bagian Hukum Setda dan BPPKB Kabupaten Kotawaringin Barat. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan kedesa-desa banyak dilakukan pembinaan keadministrasian dari Pokja I dan untuk pembinaan pengajian dan pola asuh anak adalah melakukan pembinaan ke kelompok pengajian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan melakukan penyuluhan tentang pola asuh anak yang baik. Semua kegiatan yang ada di Pokja I telah dilaksanakan dengan cukup baik.

b) Hasil wawancara tentang program gotong royong.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan MC tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja I terkait program gotong royong dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk program gotong royong kita sekarang keterkaitan dengan program PMD yang setiap tahun diadakan lomba gotong royong jadi kita mengacu pada program PMD”. (wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan SA tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja I terkait program gotong royong dan hasil wawancaranya berikut ini:

“Untuk gotong royong mengikuti juri penilaian lomba gotong royong yang bekerja sama dengan lintas sektor untuk khusus program gotong royong dari Pokja I sendiri tidak ada”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan TS tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja I terkait program gotong royong dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita mengikuti jadi juri lomba gotong royong dengan lintas sektor”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara terkait program gotong royong yang dilaksanakan oleh Pokja I adalah menjadi juri penilaian lomba gotong royong artinya secara program yang dilaksanakan oleh PKK sendiri tidak ada karena hanya mengikuti kegiatan dari lintas sektor saja. PKK Kabupaten selalu terlibat dalam menjadi juri di lomba gotong royong tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat yang diselenggarakan oleh Badan PMD Kabupaten

Kotawaringin Barat. PKK Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penilaian terkait pelaksanaan 10 program PKK di desa yang mengikuti lomba gotong royong.

Peneliti juga menanyakan kepada informan MC tentang bagaimana pelaksanaan program gotong royong apakah sudah berjalan dengan baik dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik seperti kita sebagai tim lomba gotong royong ketika memilih desa/kelurahan yang jadi juara I tingkat kabupaten alhamdulillah dari tahun 2014-2016 juara I tingkat kabupaten mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah”. (wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama tentang pelaksanaan program gotong royong kepada SA dan hasil pernyataannya sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Berjalan dengan baik untuk lomba gotong royongnya karena kita menilai sesuai dengan kriteria penilaian yang ada hanya saja untuk kegiatan gotong royong dalam Pokja I sendiri sepertinya tidak ada”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama tentang pelaksanaan program gotong royong kepada informan TS dan hasil pernyataannya sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Alhamdulillah berjalan dengan baik karena kita bekerja sama dengan tim lainnya dari lintas sektor”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan program gotong royong yang dilaksanakan PKK Kabupaten sudah dilaksanakan dengan baik ketika menjadi juri lomba gotong royong karena dari hasil penilaian lomba telah bekerja sama dengan lintas sektor sehingga menghasilkan desa/kelurahan yang layak mengikuti lomba gotong royong ke tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dan mendapatkan hasil setiap tahunnya dengan meraih juara 1 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

- c) Hasil wawancara tentang faktor pendukung pelaksanaan program Pokja I.

Berkaitan dengan pelaksanaan program Pokja I peneliti menanyakan apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program. Hal ini peneliti juga menanyakan kepada MC dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Ada yaitu ibu ketua kita yang selalu mendukung kegiatan Pokja I dan dari BPMD terkait dana kegiatan PKK”. (wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Hal yang sama ketika peneliti juga menanyakan faktor pendukung kepada SA dan jawabannya adalah:

“Kayanya tidak ada”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Sedangkan peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada TS terkait faktor pendukung dan jawabannya sebagai berikut:

“Ada, yaitu tersedianya dana”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Menurut informan MC dan TS di atas tentang faktor pendukung dalam pelaksanaan program Pokja I adalah adanya dukungan ibu ketua PKK ini sangat dirasakan oleh pengurus PKK hal ini dikarenakan disetiap kegiatan PKK Kabupaten ibu ketua selalu hadir dan mau turun kedesa-desa secara langsung sehingga mampu melihat kendala dilapangan secara langsung. Faktor pendukung selanjutnya adalah dana dengan adanya dana di PKK Kabupaten sangat membantu dalam pelaksanaan program-program PKK karena tanpa adanya dukungan dana pelaksanaan program PKK tidak dapat berjalan dengan maksimal terutama dalam hal pembinaan karena menuju lokasi desa yang akan dibina sangat jauh sehingga membutuhkan dana operasional untuk biaya perjalanannya. Sedangkan menurut informan SA berbeda bahwa tidak ada faktor pendukung dalam pelaksanaan program Pokja I. Hal ini peneliti kaji lebih dalam bahwa adanya alokasi anggaran yang ada untuk PKK Kabupaten Kotawaringin Barat terutama Pokja I dan dukungan ibu ketua PKK sehingga

peneliti menilai masih kurangnya koordinasi yang ada didalam kepengurusan di Pokja I.

- d) Hasil wawancara terkait faktor penghambat pelaksanaan program Pokja I.

Selain faktor pendukung peneliti juga menanyakan apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan program Pokja I selama ini kepada informan MC sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Ya memang kendala satu mungkin kita terkaitan dengan dana, dana kalo tidak di support dari pemda mungkin tidak bisa ya”. (wawancara pada tanggal 14 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Sedangkan informan SA mengatakan untuk faktor penghambatnya dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Kurang koordinasi antara pengurus. Misalnya ketua Pokja I tidak ada arahan atau koordinasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan faktor penghambat kepada informan TS dan hasil wawancaranya adalah:

“Terbatasnya pengetahuan pengurusnya, pengurus yang mau sosial sekarang susah, SDM yang kurang dan jangkauan yang jauh”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor penghambat dalam pelaksanaan program yang ada di Pokja I diantaranya adalah dana yang masih kurang untuk Pokja I, kurangnya koordinasi antar pengurus, terbatasnya

pengetahuan pengurus serta jiwa sosial pengurus yang sekarang di nilai sulit karena PKK merupakan organisasi sosial yang mana pengurusnya itu tidak mendapatkan gaji.

2) Pokja II.

a) Hasil wawancara tentang program pendidikan dan keterampilan.

Peneliti melakukan wawancara kepada RM selaku Ketua Pokja II tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II terkait program pendidikan dan keterampilan dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk bidang pendidikannya melaksanakan pembinaan ke lembaga-lembaga nonformal seperti PAUD, TPA, TPQ dan untuk keterampilan memberikan kepada ibu-ibu atau masyarakat terkait pemanfaatan limbah misalnya pemanfaatan barang bekas sehingga hasilnya nanti tujuannya untuk meningkatkan penghasilan keluarga”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan DD selaku anggota Pokja II apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II terkait program pendidikan dan keterampilan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Program yang berbasis pada pendidikan dan keterampilan kita menyusun program pelatihan PAUD dan Pelatihan UP2K yang di sertai dengan pembinaan maupun sosialisasi ke desa-desa’. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada informan SY selaku anggota Pokja II terkait apa saja yang dilaksanakan oleh

Pokja II terkait program pendidikan dan keterampilan dan hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

“Program pendidikan kaitannya dengan PAUD. Untuk keterampilan memberikan keterampilan kepada warga terutama anggota PKK dari kabupaten sampai ke desa yang mana fokusnya adalah *home industry*”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program yang dilaksanakan Pokja II adalah pembinaan, pelatihan PAUD dan pelatihan UP2K. Program tersebut tujuannya adalah meningkatkan keterampilan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan itu dimulai sejak dini sebagai pembentukan karakter anak karena masa emas anak pada saat mereka masih usia 0-6 tahun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di PKK Kabupaten selama satu hari kegiatan untuk pelatihan PAUD dilaksanakan dimasing-masing kecamatan.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program pendidikan dan keterampilan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan informan RM menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Iya, berkat adanya dana untuk melaksanakan kegiatan dalam hal ini pelatihan PAUD dan UP2K, secara pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana capaian target hanya saja untuk capaian sasaran belum mencukupi karena dana yang terbatas peserta kemarin hanya 40 orang saja dan kita sudah pertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan baik”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada informan DD tentang pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan apakah sudah berjalan dengan baik dan pernyataannya kepada peneliti seperti berikut ini:

“Untuk pelatihan PAUD dan Pelatihan UP2K kita sudah laksanakan dengan baik karena apa yang kita targetkan sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Dan data-datanya dapat di lihat di sekretariat hasil kegiatan tersebut”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada SY tentang bagaimana pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan apakah sudah berjalan dengan baik dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Alhamdulillah sudah, untuk tingkat kecamatan sudah keseluruhan namun untuk desa belum seluruhnya karena pengurusnya kadang-kadang ada yang ganti”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara tentang pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan apakah sudah berjalan dengan baik maka hasilnya adalah sudah berjalan dengan cukup baik sesuai capaian target yang sudah diprogramkan hanya saja menurut informan hanya di tingkat kecamatan saja untuk di tingkat desa belum. Hal ini disebabkan bahwa pengurus desa yang telah dilatih sudah tidak lagi menjadi pengurus PKK sehingga pengurus yang baru belum memahami tentang PAUD maupun tentang UP2K.

b) Hasil wawancara tentang program pengembangan kehidupan berkoperasi.

Peneliti melakukan wawancara kepada RM tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II terkait program pengembangan kehidupan berkoperasi dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita melaksanakan pembinaan ke desa-desa dalam mengelola dana untuk modal simpan pinjam bagi usaha keterampilan yang ada di desa masing-masing”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada DD selaku anggota Pokja II dengan wawancara sebagai berikut:

“Kita melakukan pembinaan ke desa-desa maupun dilingkungan sekitar kita yang kita bisa sampaikan tentang pengelolaan keuangan untuk dapat di simpan pinjamkan sesama anggota agar mampu berusaha secara mandiri”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada SY selaku anggota Pokja II terkait apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II dalam program pengembangan kehidupan berkoperasi dan hasil wawancara dengan peneliti bahwa:

“Program pengembangan kehidupan koperasi adalah diawali dengan adanya jimpitan di warga-warga di kelompok yasinan, arisan-arisan prakoperasi yang di bina untuk menjadi koperasi berbadan hukum”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.00 WIB).

Dari wawancara di atas terkait apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II dalam program pengembangan kehidupan berkoperasi bahwa dari pengurus Pokja II telah

melaksanakan program melalui pembinaan dalam hal simpan pinjam untuk modal usaha dan membina koperasi agar menjadi koperasi berbadan hukum agar modal yang diberikan dapat memberikan kenyamanan bagi para masyarakat yang melakukan pinjaman untuk modal usaha.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program pengembangan kehidupan berkoperasi apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan informan RM menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sudah baik, dimana kita sudah membina PKK desa, kelurahan dan kecamatan hanya saja untuk hasil yang diharapkan belum maksimal karena pengetahuan para kader untuk melaksanakan program ini masih dirasa susah dan kesibukan kerja dimasing-masing anggota sehingga tidak bisa fokus dalam menjalankan program yang sudah kita ajarkan”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan kepada DD tentang program pengembangan kehidupan berkoperasi apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan hasil wawancaranya berikut ini:

“Secara program sudah dilaksanakan dengan baik melalui pembinaan ke kecamatan dan bagi kader mereka sangat apresiasi sekali untuk program ini karena dapat menambah wawasan, hasil pelaksanaan dari pembinaan ini selalu kita sampaikan kepada ibu ketua PKK sebagai laporan pelaksanaan kegiatan”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Sedangkan menurut SY terkait pelaksanaan program pengembangan kehidupan berkoperasi apakah sudah

dilaksanakan dengan baik dan hasil wawancaranya seperti berikut ini:

“Secara program sudah terlaksana dengan baik hanya saja hasilnya belum maksimal karena desa-desa banyak pengurusnya berganti-ganti sehingga pembinaan itu dari nol lagi”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program pengembangan kehidupan berkooperasi telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai program yang telah direncanakan hanya saja hasil yang diharapkan belum maksimal karena pengurus PKK yang telah dilatih sudah tidak menjadi pengurus PKK lagi sehingga ilmu yang sudah disampaikan terputus dan tidak disampaikan kepada pengurus yang baru. Oleh karena itu, menyebabkan hasil yang diharapkan belum maksimal.

c) Hasil wawancara tentang faktor pendukung pelaksanaan program Pokja II.

Berkaitan dengan pelaksanaan program Pokja II peneliti menanyakan apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja II. Hal ini peneliti juga menanyakan kepada informan RM dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Itu pasti, terutama adanya dukungan dari pemerintah daerah, kemudian pengurus PKK yang siap bekerja untuk membangun masyarakat didesa seperti itu karena PKK adalah sukarelawan tidak digaji”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Hal yang sama ketika peneliti juga menanyakan kepada DD apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja II dan jawabannya adalah:

“Ada, yaitu kerja sama dari *leading sector*”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Sedangkan peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada SY terkait faktor pendukung dan jawabannya sebagai berikut:

“Ada, dengan adanya dukungan dana dari pemerintah daerah”. (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan program Pokja II adalah adanya dana, pengurus yang sukarelawan, dan adanya kerjasama dari lintas sektor terkait sehingga memudahkan dalam menjalankan program Pokja II sesuai dengan apa yang telah diprogramkan sebelumnya.

d) Hasil wawancara tentang faktor penghambat pelaksanaan program Pokja II.

Selain faktor pendukung peneliti juga menanyakan apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan program Pokja II selama ini kepada RM sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Terkait dengan sasaran kita masyarakat desa pada umumnya mereka memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah sehingga apabila kita untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru masih sangat sulit untuk di terima. Kemudian jangkauannya

ke desa-desa sehingga menjadikan binaan kita tidak berjalan dengan maksimal. selanjutnya pendanaan, pendanaan sebenarnya sudah ada cuma masih belum cukup memadai sehingga kegiatan kita disana tidak berjalan dengan maksimal". (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 09.00 WIB).

Sedangkan informan DD mengatakan untuk faktor penghambatnya dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

"Satu, kebanyakan ganti-ganti pengurus jadi mereka tidak menularkan ilmunya ke pengurus baru jadi akhirnya terputus, kedua jadwal kegiatan PKK kabupaten tidak bisa dijadwalkan secara rutin". (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 14.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan faktor penghambat kepada SY terkait faktor penghambat dan hasil wawancaranya adalah:

"Ada, salah satunya pergantian pengurus sehingga pembinaan dari nol kembali kemudian jangkauan yang jauh". (wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 08.00 WIB).

Dari hasil wawancara terkait dengan faktor penghambat yang ada di Pokja II adalah pergantian pengurus yang ada di desa, jauhnya jangkauan, dana yang masih belum memadai, jadwal rapat rutin yang tidak terjadwal secara rutin dan pengetahuan para kader di desa masih rendah. Dari berbagai penghambat yang ada selama ini pengurus PKK kabupaten selalu berupaya mengurangi penghambat tersebut melalui rapat rutin selalu di bahas

faktor penghambat untuk di cari solusinya secara bersama-sama.

3) Pokja III

a) Hasil wawancara tentang program pangan.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan SH tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program pangan dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pangan, dengan membudidayakan tanaman lokal sehingga tidak tergantung dengan beras saja bisa dengan jagung. Kegiatan yang ada di Pokja III kita mengadakan lomba TOGA (tanaman obat keluarga), dan pembinaan kedesa-desra terkait dengan kebun TOGA”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama NS selaku anggota Pokja III apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program pangan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Program pangan ini berupa pangan non beras misalnya singkong menjadi makanan pokok jadi tidak hanya dari beras saja jadi kita budidayakan makanan non beras”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada RH selaku anggota Pokja III apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program pangan dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk pangan programnya mengajak/mensosialisasian masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, dan makanan pokok tidak hanya beras tapi bisa dari yang lain seperti jagung dan ubi-ubi tentunya untuk mengangkat makanan yang berasal dari tanaman lokal”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa program pangan yang dilaksanakan oleh Pokja III adalah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan tanaman lokal dan tidak tergantung pada beras untuk makanan pokok tetapi bisa dari ubi-ubian atau jagung bisa menjadi pengganti beras sebagai makanan pokok jadi tidak tergantung pada beras. Karena menurut kesehatan ubi atau jagung juga sangat baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi setiap hari.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program pangan apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan SH menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sejauh ini sudah baik, karena ada dukungan kerja sama yang baik dari seluruh Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dan dukungan lintas sektor selama ini”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program pangan apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada NS sebagaimana dalam pernyataan kepada peneliti sebagai berikut:

“Alhamdulillah sepertinya dari tahun 2013 sampai sekarang sudah mulai berangsur-angsur mengarah ke arah meningkat sudah ada perbaikan. Ini juga dibuktikan dengan tahun ini 2016 TOGA yang di Desa Sungai Kuning mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi sehingga dari situ pembinaan kita itu berhasil”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program pangan apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada RH sebagaimana dalam pernyataan kepada peneliti sebagai berikut:

“Selama ini sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat di lihat dengan hasil-hasil diadakan lomba-lomba TOGA di tingkat kabupaten maupun provinsi”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan peneliti bahwa program pangan sudah dilaksanakan dengan cukup baik hal ini telah dibuktikan dalam hasil pembinaan Tanaman Obat Keluarga tahun ini mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang artinya para keluarga yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sudah mulai memahami tentang pemanfaatan TOGA buat kebutuhan keluarga sehari-hari karena TOGA merupakan tanaman yang memiliki khasiat sesuai jenis dan tanaman yang ada untuk menjaga kesehatan keluarga.

b) Hasil wawancara terkait program sandang.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan SH tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program sandang dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sandang, kita mengarahkan mereka jangan sampai mereka cenderung menggunakan produk luar negeri daripada dalam negeri, program ini kita sampaikan melalui pembinaan maupun penyuluhan di kecamatan, desa maupun di kelurahan”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada NS selaku anggota Pokja III apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program sandang dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sandang juga tidak jauh berbeda dari yang dahulu bahkan kita tetap memakai produksi dalam negeri jangan sampai kita menggunakan produk luar negeri, hal ini kita sampaikan melalui pembinaan dan penyuluhan”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada RH selaku anggota Pokja III apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program sandang dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Sandang untuk menumbuhkan kesadaran mencintai produk dalam negeri, melalui pembinaan kedesa-desa”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa program sandang yang dilaksanakan oleh Pokja III adalah melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk tetap

mencintai produk dalam negeri karena produk-produk yang ada di dalam negeri ini tidak kalah jauh dengan buatan luar negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan tumbuhnya sektor-sektor industri yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program sandang apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan SH menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Program sandang ini kita sampaikan melalui pembinaan dan lomba jambore untuk pengenalan pakaian khas Kotawaringin Barat program-program itu dapat terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dari pengurus sehingga program dapat berjalan dengan baik”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program sandang apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada informan NS sebagaimana dalam pernyataan kepada peneliti sebagai berikut:

“Secara program sudah tersampaikan dengan baik mba mungkin hasil untuk yang kita harapkan itu belum maksimal karena saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan produk dari luar negeri”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program sandang apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada RH sebagaimana dalam pernyataan kepada peneliti sebagai berikut:

“Tentunya disaat kita melakukan pembinaan agar menggunakan produk dalam negeri kita selalu menyampaikan program tersebut sehingga program tersebut kita sudah laksanakan dengan baik tentunya”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas bahwa pelaksanaan program sandang telah dilaksanakan dengan cukup baik melalui pembinaan hanya saja dari hasil yang diharapkan belum maksimal karena masih adanya masyarakat yang menggunakan produk luar negeri sehingga produk yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat belum dapat memberikan kontribusi kemajuan perekonomian di daerah.

- c) Hasil wawancara tentang program tata laksana rumah tangga.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan SH tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program tata laksana rumah tangga dan hasil wawancara sebagai berikut:

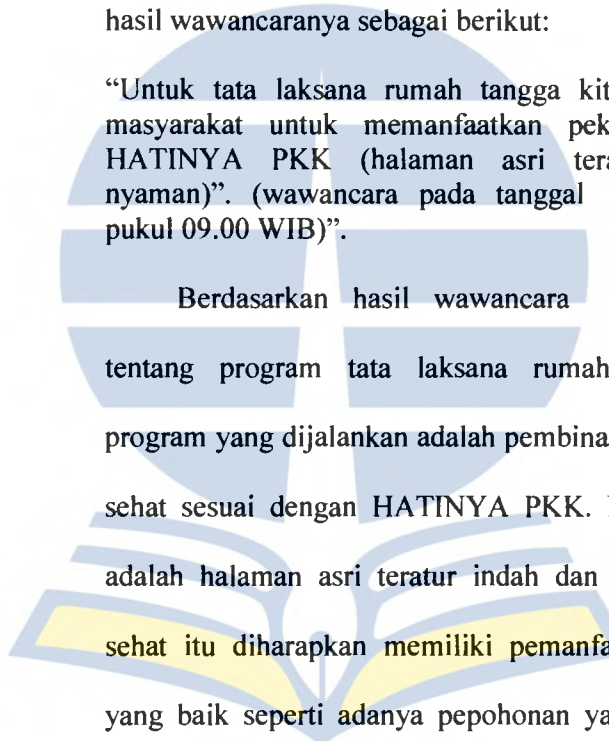
“Untuk program perumahan tata laksana rumah tangga kita membina sesuai dengan HATINYA PKK (halaman asri teratur indah dan nyaman) artinya rumah sehat itu ada pentilasinya, ada ruang untuk keluarga, ada saluran pembuangan air limbah, jadi HATINYA PKK tercipta dari rumah sehat itu”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada NS selaku anggota Pokja III apa saja yang dilaksanakan oleh

Pokja III terkait program tata laksana rumah tangga dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Program perumahan tata laksana rumah tangga kita mengarah ke rumah sehat, meskipun rumah itu sederhana tapi harus sehat tidak harus rumah gedung, tidak harus rumah mewah”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada RH selaku anggota Pokja III apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program tata laksana rumah tangga dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Untuk tata laksana rumah tangga kita menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dengan HATINYA PKK (halaman asri teratur indah dan nyaman)”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB)”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan peneliti tentang program tata laksana rumah tangga bahwa program yang dijalankan adalah pembinaan tentang rumah sehat sesuai dengan HATINYA PKK. HATINYA PKK adalah halaman asri teratur indah dan nyaman. Rumah sehat itu diharapkan memiliki pemanfaatan pekarangan yang baik seperti adanya pepohonan yang menyejukkan rumah sehingga terlihat asri, ada TOGA keluarganya baik menggunakan *pollybag* atau tanah di sekitar pekarangan rumah, ada pentilasi udara, ada saluran pembuangan air limbah, adanya penataan ruangan yang tepat berdasarkan fungsi dan kebutuhan keluarga dan tentunya ada wc atau

kamar mandi di dalam rumah tersebut serta tersedianya kebutuhan protein hewani sehingga diharapkan semuanya teratur dalam penempatannya sehingga menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program tata laksana rumah tangga apakah sudah dilaksanakan dengan baik dan SH menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Alhamdulillah saat ini sudah berjalan dengan baik, ini dapat dilihat disetiap rumah warga sudah mulai tertata dengan apa yang dikatakan dengan HATINYA PKK dan untuk tahun ini Kotawaringin Barat berkomitmen, pemerintah dan masyarakat sudah stop bebas buang air sembarangan (ODF), 2020 ini kita menuju Kabupaten Kotawaringin Barat yang sehat. Artinya kita menggerakkan warga melalui pemahaman atau pola pikir untuk hidup yang sehat”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program tata laksana rumah tangga apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada NS sebagaimana dalam pernyataan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sudah terlaksana dengan baik dari rumah-rumah penduduk sekarang sudah mulai tertata dengan baik”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program tata laksana rumah tangga apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada RH sebagaimana dalam pernyataan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sejauh ini kita sudah melaksanakan program Pokja III dengan baik karena HATINYA PKK ini selalu diikuti lombakan sebagai percontohan rumah sehat”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Hasil wawancara terkait pelaksanaan program perumahan dan tata laksana rumah tangga sudah dilaksanakan dengan cukup baik karena hampir semua rumah sudah memiliki kriteria rumah sehat sesuai dengan HATINYA PKK dengan tujuan rumah yang sehat upaya yang dilakukan oleh PKK Kabupaten sendiri adalah terus melakukan pembinaan untuk melakukan tata laksana rumah tangga yang teratur serta menjalankan program pemerintah untuk stop buang air sembarangan sehingga setiap rumah sekarang dihimbau untuk tidak lagi membuang air sembarangan dan setiap rumah harus sudah memiliki wc masing-masing. Adapun upaya untuk mensukseskan program tersebut adalah dengan memprogramkan baik dari dana ADD maupun dari kegiatan arisan jamban sehat dan meminta bantuan dari pihak ketiga atau perusahaan untuk dapat memberikan toilet atau bahan bangunannya yang kemudian dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat.

- d) Hasil wawancara tentang faktor pendukung pelaksanaan program Pokja III.

Berkaitan dengan pelaksanaan program Pokja III peneliti menanyakan apakah ada faktor pendukung dalam

melaksanakan program. Hal ini peneliti juga menanyakan kepada informan SH dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Sangat ada, adanya kerjasama dalam Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat karena PKK ini sosial dan apa yang telah saya sampaikan tadi tidak ada gaji/sosial jadi di tim ini karena jiwa ini sudah terpanggil tanpa kita berapa kita enjoy aja karena ikhlas untuk berkerja”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Hal yang sama ketika peneliti juga menanyakan faktor pendukung kepada NS dan jawabannya adalah:

“Tentunya pasti ada mba, adanya dukungan lintas sektor terkait”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Sedangkan peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada RH terkait faktor pendukung dan jawabannya sebagai berikut:

“Ada, terkait dana dan pengurus Pokja III yang solid dalam melaksanakan tugasnya”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja III adalah adanya kerja sama yang solid antar pengurus PKK walaupun PKK merupakan social yang tidak digaji namun berkat adanya semangat dari pengurus PKK untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Barat ini sangat tinggi jadi walaupun mereka tidak di gaji mereka tetap melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan hati yang

ikhlas, selanjutnya adanya dukungan dari lintas sektor terkait yang mendukung program-program dari Pokja III seperti dari Dinas Pertanian untuk pelaksanaan program TOGA dan adanya dukungan dana dalam pelaksanaan program Pokja III.

- e) Hasil wawancara terkait faktor penghambat pelaksanaan program Pokja III.

Selain faktor pendukung peneliti juga menanyakan apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan program Pokja III selama ini kepada informan SH sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Kalau kendala pasti ada kendala, pertama akses sangat jauh sehingga memakan waktu, dana, tenaga nah, karena tanpa infrastruktur yang baik tidak akan menekan kelancaran tugas kita di lapangan. Sumber daya manusia di desa sangat terbatas karena kebanyakan cuma tamat SD mungkin bisa baca ngaji ya cukup untuk rumah tangga. Selanjutnya masalah dana yang ada memadai dalam artian sesuai dengan yang kita program tidak ada pemangkasan. Selanjutnya kurang keterlibatan lintas sektor sangat kami rasakan”. (wawancara pada tanggal 24 Agustus 2016 pukul 08.00 WIB).

Sedangkan NS mengatakan untuk faktor penghambatnya dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Kendala tentu ada, kendala itu berkaitan dengan dana, berkaitan dengan situasi dan kondisi”. (wawancara pada tanggal 26 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan faktor penghambat kepada RH terkait faktor penghambat dan hasil wawancaranya adalah:

“Jauhnya jangkauan karena medan jalan yang masih sangat susah untuk dilalui sehingga memperlambat waktu kita sampai ketempat tujuan”. (wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan faktor penghambat di atas bahwa dalam melaksanakan program Pokja III adalah dana yang masih belum memadai untuk Pokja III hal ini dikarenakan untuk pelaksanaan lomba B2SA dana yang di berikan masih terbatas sehingga untuk memaksimalkan persiapan lomba untuk tidak dapat di capai dengan maksimal. selanjutnya faktor jauhnya jangkauan karena infrastruktur yang masih sulit sehingga kegiatan pembinaan ke desa-desa banyak habis di jalan, waktu untuk membina tersebut sangat singkat paling maksimal 4 jam saja. Kemudian pengetahuan kader yang masih rendah menyebabkan penyampaian ilmu yang disampaikan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal oleh para kader maupun masyarakat setempat.

4) Pokja IV.

1) Hasil wawancara tentang program kesehatan.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan AS selaku tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program kesehatan dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Melalui pembinaan-pembinaan kegiatan Posyandu. Kita juga mengadakan pelatihan kader Posyandu dan lomba untuk Posyandu di tingkat kabupaten”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada UM selaku anggota Pokja IV tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program kesehatan dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kita di Pokja IV melakukan pembinaan, pelatihan maupun penyuluhan ke desa-desa seperti Posyandu”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Hasil dari wawancara dan penelitian yang dilakukan dalam melaksanakan program kesehatan adalah kegiatan berupa pembinaan, pelatihan dan penyuluhan bagi kader-kader PKK dan kader kesehatan yang ada di desa, kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kesehatan keluarga melalui kegiatan Posyandu yang ada di lingkungan masing-masing karena dengan PKK menggerakkan warganya untuk dapat aktif di Posyandu sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di lingkungan masing-masing dapat dikontrol dengan baik.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program kesehatan apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada AS dan menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Iya tentunya program itu ada yang bisa berjalan dengan baik ada juga yang mengalami hambatan namun demikian kami sebagai unsur organisasi tetap akan menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi didalam pelaksanaannya melalui upaya monitoring”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program kesehatan apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada UM dan menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun ada kendalanya seperti daerah yang terlalu jauh jangkauannya tapi alhamdulillah itu bisa kita laksanakan, kita memotivasi mereka dengan kegiatan lomba posyandu dan adanya peran lintas sektor terkait program kerja Pokja IV”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pelaksanaan program kesehatan oleh PKK Kabupaten sudah dilaksanakan dengan cukup baik melalui pembinaan, pelatihan para kader-kader Posyandu untuk melaksanakan layanan sosial dasar tentang kesehatan sehingga sebagai bentuk upaya dari PKK untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat yang sehat.

- 2) Hasil wawancara tentang program kelestarian lingkungan hidup.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan AS tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program kelestarian lingkungan hidup dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk program kelestarian lingkungan hidup kita programkan melalui pembinaan dan penyuluhan kedesa-desa yang kita kunjungi agar melestarikan lingkungannya agar tetap bersih hijau dan lestari sesuai dengan HATINYA PKK”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada UM tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program kelestarian lingkungan hidup dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Keterkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup kita mengadakan penyuluhan didesa-desa tentang apa arti lingkungan hidup itu sendiri”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan bahwa program kelestarian lingkungan hidup tersebut dilaksanakan melalui pembinaan dan penyuluhan ke masyarakat agar dapat melestarikan lingkungannya sesuai HATINYA PKK yaitu halaman asri teratur indah dan nyaman. Artinya setiap rumah masyarakat hendaknya memiliki tanaman yang asri sehingga rumah tersebut sejuk karena banyak pohon-pohon yang hijau dan rindang serta pemanfaatan pekarangan untuk TOGA keluarga, tata laksana rumah tangga yang rapi, bersih dan teratur sehingga rumah tersebut bisa di katakan rumah yang sehat bagi keluarga.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program kelestarian lingkungan hidup apakah sudah

dilaksanakan dengan baik kepada AS dan menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Pada dasarnya semua program sudah kita laksanakan dengan baik dengan mengacu pada pedoman PKK yang sudah kita rencanakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada di PKK”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program kelestarian lingkungan hidup apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada UM dan menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Sudah dilaksanakan dengan baik karena ini bisa dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kotawaringin Barat meraih piala Adipura 10 kali berturut-turut yang mana piala ini adalah penghargaan yang diberikan atas kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan baik”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program kelestarian lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat agar melakukan kelestarian di lingkungan rumah masing-masing sehingga di rumah-rumah sudah terlihat hijau dan asri serta saling menjaga kebersihan lingkungan dengan terus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah disembarang tempat. Dari upaya ini telah menghasilkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang 10 kali meraih piala Adipura berturut-turut setiap tahunnya yang merupakan piala kota kecil terbersih di tingkat nasional.

3) Hasil wawancara terkait program perencanaan sehat.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan AS tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program perencanaan sehat dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Melalui pembinaan dan penyuluhan kepada kader-kader PKK untuk dapat menggerakkan warganya untuk dapat mempersiapkan diri melalui penyiapan investasi jika menghadapi suatu masalah dengan kesehatan. Seperti peserta Posyandu para kader kesehatan mengajak para ibu hamil untuk menyiapkan tabungan bersalin sejak dini agar ketika lahir sang ibu tidak bingung terhadap biaya persalinan”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada UM selaku anggota Pokja IV tentang apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program perencanaan sehat dan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk perencanaan sehat memberikan penyuluhan tentang pola hidup yang sehat di lingkungan kita”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa program perencanaan sehat melalui penyuluhan dan pembinaan ke kader-kader kesehatan agar menyampaikan kepada masyarakat untuk mempersiapkan perencanaan keuangan untuk kesehatan dan memberikan arahan mengenai pola hidup sehat yang baik dan benar sehingga dengan upaya yang dilakukan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

ini bisa mewujudkan masyarakat yang menyiapkan dirinya untuk melakukan pola hidup yang sehat dan terencana.

Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program perencanaan sehat apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada AS dan menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Kita sudah melaksanakan dengan baik melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan sampai ke desa-desa”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Peneliti juga menanyakan bagaimana pelaksanaan dari program perencanaan sehat apakah sudah dilaksanakan dengan baik kepada UM dan menjelaskan kepada peneliti sebagai berikut:

“Iya sudah kita laksanakan dengan baik”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program perencanaan sehat udah dilaksanakan dengan cukup baik oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat melalui pembinaan dan penyuluhan.

- 4) Hasil wawancara tentang faktor pendukung dalam pelaksanaan program Pokja IV.

Berkaitan dengan pelaksanaan program Pokja IV peneliti menanyakan apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program. Hal ini peneliti juga menanyakan

kepada AS dan hasil wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Faktor pendukung adalah komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dan PKK menuju goals atau tujuan dari pembangunan kesehatan jadi seperti kegiatan-kegiatan desa siaga kemudian beberapa program seperti ODF (Open Defecation free) menstopkan masyarakat buang air sembarangan itu juga merupakan upaya yang sangat sinergi dengan program Pokja IV”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Hal yang sama ketika peneliti juga menanyakan kepada UM tentang faktor pendukung dan jawabannya adalah:

“Jelas ada, salah satunya kerjasama dengan lintas sektor dengan beberapa instansi terkait”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa faktor pendukung keberhasilan dari program Pokja IV adalah adanya komitmen yang kuat antara pemerintah daerah dan PKK dalam melaksanakan program-program tentang kesehatan sehingga memudahkan PKK Kabupaten dalam melaksanakan program yang ada karena selalu di bantu dari Dinas sektor terkait untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan kedesa-desa tentang kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga.

- 5) Hasil wawancara tentang faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pokja IV.

Selain faktor pendukung peneliti juga menanyakan apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan program Pokja IV selama ini kepada AS sebagaimana dalam wawancara berikut ini:

“Terkadang hambatan itu bisa datang dari internal kader kita sendiri yang secara teknis belum memahami keprograman-keprograman yang harus dilakukan oleh kader PKK. Kemudian Yang kedua dukungan dari pengambil kebijakan ditingkat desa masih dinilai kurang berperan. Ketiga masalah anggaran karena masih ada PKK Kecamatan dan Kelurahan tidak memiliki dana operasional dan PKK kabupaten pun masih terbatas”. (wawancara pada tanggal 16 September 2016 pukul 09.00 WIB).

Sedangkan UM mengatakan untuk faktor penghambatnya dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Penghambat tentu ada tapi kita bisa atasi seperti jauhnya jangkauan dan dana”. (wawancara pada tanggal 4 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor penghambatnya dalam melaksanakan program Pokja IV adalah jauhnya jangkauan antar desa satu kedesa yang lainnya sehingga waktu yang dilaksanakan untuk pembinaan sangatlah di rasa kurang karena medan yang ditempuh sangat berat, dana yang masih di rasa belum memadai di kabupaten sedangkan untuk kecamatan dan kelurahan itu tidak memiliki anggaran untuk operasional sehingga pembinaan itu hanya cukup sampai di kecamatan dan kelurahan saja mereka tidak bisa melanjutkan kedesa

sehingga PKK Kabupaten mengambil inisiatif untuk turun kedesa secara langsung. Selanjutnya masih rendahnya perhatian pemangku kepentingan didesa dengan keberadaan PKK jadi kurang mendukung dalam pelaksanaan PKK yang ada di desa, tingkat pemahaman kader PKK di desa yang masih rendah sehingga diperlukan upaya ekstra untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan para kader kesehatan di lapangan karena kader ini secara teknis harus lebih memahami tentang kesehatan.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

Evaluasi program Menurut Rossi (1979) adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji kembali draf/usulan program yang sudah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji kembali keterandalan program untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan pedoman/patokan yang diberikan. Selain itu juga dimaksudkan agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan program yang mereka rumuskan itu, jika program tersebut kelak akan dilaksanakan. Karena itu, di dalam evaluasi program, selain di evaluasi tentang bagaimana proses perumusan program juga di evaluasi tentang semua unsur program, yang menyangkut: pengumpulan data/informasi, analisis keadaan, perumusan masalah, tujuan, dan cara-cara mencapai tujuan yang menyangkut: kegiatan yang akan

dilaksanakan, metode yang akan diterapkan, penerima manfaat kegiatan, volume kegiatan, tempat (lokasi) dan waktu pelaksanaan kegiatan, serta jumlah dan sumber dana yang akan dipergunakan.

Terkait evaluasi program ini menurut Rossi sangat menekankan pentingnya kegiatan evaluasi terhadap:

- a. Siapa (kelompok) penerima manfaat program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi (kekhususan) kelompok penerima manfaat program tersebut.
- b. Apa metode yang terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- c. Apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan.
- d. Seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan itu.

Berdasarkan teori tersebut peneliti melakukan evaluasi terkait program-program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil penelitian dan data-data yang menunjang dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis sebagai berikut:

- a. Program Pokja I.
 - 1) Pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan Pancasila.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja I terkait penghayatan dan pengamalan pancasila adalah Pelatihan Kadarkum, pengajian, arisan dan pembinaan pola asuh anak. Untuk pelatihan

Kadarkum dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan kader PKK dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan pemahaman para keluarga tentang undang-undang yang berlaku. Pelatihan ini dilaksanakan di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu hari dengan jumlah materi pelatihan ada 4 materi. Jumlah peserta 40 orang yang merupakan kader PKK desa/kelurahan/kecamatan dari masing-masing pengurus Pokja I. Berdasarkan program yang sudah disusun pengurus PKK melakukan persiapan dengan dimulai pembentukan panitia dalam rapat kepanitiaan yang dituangkan dalam notulen rapat. Hasil dari panitia tersebut dilakukan penyiapan sumber daya baik untuk tenaga pelatih maupun panitia yang terlibat untuk melaksanakan pelatihan tersebut sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaannya pelatihan kadarkum ini telah dilaksanakan dengan cukup baik dari mulai awal perencanaan sampai pelaksanaan yang kemudian dituangkan dalam pertanggungjawaban atau laporan kegiatan pelatihan setelah kegiatan tersebut selesai. Hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah terciptanya 40 orang kader PKK yang siap dan paham untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan ini dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2014 untuk 2015 tidak masuk dalam anggaran karena anggaran PKK Kabupaten terbatas

karena terserap di belanja pegawai sehingga pelatihan kadarkum ini tidak masuk dalam anggaran 2015-2016. Hasil dari pelaksanaan pelatihan ini dinilai masih kurang manfaatnya kepada keluarga hal ini disebabkan kurangnya kader yang telah dilatih untuk melakukan penyuluhan karena banyak kader yang sudah dilatih tidak menularkan ilmunya ke yang lain dan ada beberapa pengurus PKK desa yang sudah tidak menjadi pengurus PKK. Selain itu juga karena belum adanya kepercayaan diri para kader PKK yang akan melakukan penyuluhan karena didasarkan tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga program ini dirasakan kurang maksimal bagi kesejahteraan keluarga.

Selanjutnya program pembinaan pengajian, arisan dan pola asuh anak ini dilaksanakan oleh kader PKK Kabupaten dari Pokja I. Pelaksanaan program ini dilaksanakan di kelompok-kelompok pengajian ketika ada kegiatan pengajian, dimana setiap pengajian juga ada kelompok arisan didalamnya sehingga ketika pengurus PKK kabupaten turun ke kelompok pengajian tersebut langsung melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang berkaitan dengan Pokja I terutama tentang peningkatan keimanan dan ketakwaan serta melakukan penyuluhan tentang pola asuh anak dan remaja yang baik sesuai dengan umurnya. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk masyarakat yang tergabung dalam pengajian keagamaan yang mana tujuan dari

program pembinaan ini adalah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola asuh anak dan remaja bagi para orang tua. Pelaksanaan program ini juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan hasilnya dirasakan berguna bagi masyarakat.

2) Pelaksanaan program gotong royong.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja I terkait program gotong royong adalah menjadi juri dalam setiap pelaksanaan lomba gotong royong yang diselenggarakan oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari PKK Kabupaten Kotawaringin Barat selalu di minta 1 (satu) orang untuk menjadi juri menilai pelaksanaan 10 program PKK di kecamatan yang mengikuti lomba. Tentunya hasil yang ingin di capai adalah terpilihnya desa/kelurahan yang layak untuk di ikut lombakan keajang tingkat Provinsi Kalimantan Tengah sehingga program ini bermanfaat bagi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat karena disamping melakukan penilaian PKK kabupaten juga bisa langsung membina ke PKK yang dinilai jadi tidak serta merta melaksanakan penilaian saja namun sekaligus di isi dengan pembinaan kepada kader PKK di desa/kelurahan. Pelaksanaan program tersebut sudah dilaksanakan dengan baik karena Kabupaten Kotawaringin Barat selalu mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam waktu empat tahun

belakangan ini dan ini juga merupakan kegiatan kerja sama lintas sektor dengan PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Program Pokja II.

1) Program pendidikan dan keterampilan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja II terkait pendidikan dan keterampilan adalah melaksanakan pembinaan dan pelatihan PAUD dan UP2K. Adapun program pembinaan dan pelatihan PAUD ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para kader PKK dan guru-guru PAUD untuk mewujudkan program pemerintah satu desa satu PAUD. Pelatihan ini dilaksanakan di 6 kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat yang diawali dengan pembentukan panitia dari PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rapat kepanitian dan didokumenkan dalam notulen rapat. Selanjutnya menyiapkan para pelatih untuk memberikan materi tentang tata mekanismen pendirian PAUD, kurikulum PAUD dan materi pengajaran bagi guru. Jumlah peserta pelatihan di masing-masing kecamatan sebanyak 40 orang yang terdiri dari kader PKK dari Pokja II dan para guru-guru PAUD. Pelatihan ini telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan pedoman PAUD dan Rakernas VII tahun 2010. Hasil dari pelatihan ini bermanfaat bagi para guru dan kader PKK yang mana hasilnya dapat dilihat dari hasil peningkatan jumlah lembaga PAUD yang terbentuk setiap tahunnya mengalami

peningkatan hanya saja bagi daerah pedalaman masih belum terbentuknya PAUD karena minimnya tenaga guru dan wadah untuk membentuk PAUD. Sehingga menurut peneliti program ini masih sangat berguna bagi kemajuan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Selanjutnya untuk pelatihan UP2K program ini bertujuan untuk tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Pelatihan ini ditujukan untuk kader PKK desa/kelurahan dan kecamatan untuk mampu melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok pengrajin keterampilan maupun *home industry* agar mampu mandiri dalam meningkatkan daya saing dari segi produk maupun kemasan. Pelaksanaan program ini diawali dengan pembentukan panitia yang berasal dari pengurus PKK Kabupaten yang di bahas dalam rapat pembentukan panitia dan dituangkan dalam notulen rapat. Pelaksanaan program ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 B Tahun 1993 tentang Pedoman Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK sehingga program tersebut dilaksanakan berdasarkan panduan ataupun pedoman tersebut. Adapun jumlah peserta sebanyak 40 orang. Materi yang diberikan sesuai dengan pedoman UP2K dan setelah pelaksanaan kegiatan di buat laporan pertanggung jawaban

kegiatannya. Hasil dari pelaksanaan pelatihan ini adalah terbentuknya kelompok UP2K di desa/kelurahan yang mendapatkan pelatihan. Dan manfaatnya dari program ini adalah meningkatnya pengetahuan kader PKK di desa/kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan dan mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sehingga menurut peneliti program ini sangat berguna bagi kader dan masyarakat setempat untuk lebih baik lagi dalam memanfaatkan potensi yang ada di desa dan sebagai tindak lanjut dari program pemerintah untuk bisa bersinergi dengan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.

2) Program pengembangan kehidupan berkoperasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja II adalah melakukan pembinaan dalam hal simpan pinjam di kelompok koperasi dan UP2K yang bertujuan untuk meningkatkan kelompok simpan pinjam untuk modal usaha bagi kelompok-kelompok UP2K sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pembinaan ini dilakukan oleh pengurus Pokja II kepada kelompok-kelompok UP2K PKK yang ada di desa agar mengerti dan paham tentang administrasi UP2K sesuai dengan pedoman yang ada. Pembinaan ini rutin dilakukan setiap tahun karena setiap tahun diadakan lomba UP2K PKK dari kabupaten sampai ke tingkat

nasional. Sehingga program ini berguna bagi peningkatan mutu kelompok-kelompok UP2K PKK yang ada di desa.

c. Program Pokja III.

1) Pelaksanaan program pangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja III terkait program pangan adalah melakukan pembinaan untuk mengajak masyarakat untuk memanfaatkan tanaman lokal sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditujukan kepada para kader PKK Pokja III di desa/kelurahan maupun kecamatan serta masyarakat secara langsung yang terlibat dalam kegiatan PKK. Pembinaan ini dilakukan melalui penyuluhan pada saat melakukan pembinaan ke desa-desa. Sehingga hasil yang diharapkan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan tanaman lokal serta membiasakan diri untuk memakan makanan pokok bisa dengan selain beras seperti dari ubi dan jagung. Sehingga program ini bermanfaat bagi masyarakat dan perlu dilakukan secara berkelanjutan karena merubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran masyarakat ini tidaklah mudah sehingga perlu dilanjutkan program ini setiap tahunnya.

2) Pelaksanaan program sandang.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja III terkait program sandang adalah melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk mencintai produk Indonesia sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini juga sama seperti pelaksanaan program pangan bahwa tujuan dari program ini adalah mengubah pola pikir atau meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencintai produk Indonesia sehingga perlu pelaksanaan yang secara terus menerus sehingga masyarakat dapat sadar akan pentingnya cinta produk Indonesia. Dengan menggunakan produksi Indonesia secara otomatis dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga dan akan mencapai taraf kehidupan yang sejahtera. Kegiatan ini dilaksanakan melalui turun ke desa-desa yang akan dilaksanakan pembinaan dengan cara penyuluhan dengan para kader PKK desa dan masyarakat yang langsung terlibat dengan kegiatan PKK. Program ini sangat bermanfaat dan harus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

3) Pelaksanaan program tata laksana rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja III terkait program tata laksana rumah tangga adalah melalui pembinaan tentang rumah sehat sesuai HATINYA PKK (halaman asri teratur indah dan

nyaman) sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir atau meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan tata laksana rumah tangga yang sehat dan sesuai dengan HATINYA PKK. Rumah sehat sesuai dengan HATINYA PKK itu sendiri adalah rumah yang dari halamannya terlihat asri dan sejuk yang memiliki pepohonan rindang, untuk di dalam rumah tersedianya fentilasi udara yang baik, tata ruang yang baik ada kamar untuk anak dan orang tua, tersedianya ruang makan, ruang keluarga, wc, kamar mandi, saluran pembuangan air limbah, TOGA, tersedianya kebutuhan protein hewani di dalam rumah itu sendiri yang tertata dengan rapi dan bersih. Rumah sehat tersebut tidak harus dari beton asalkan rumah tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan HATINYA PKK tersebut. Oleh karena itu, pemahaman ini perlu benar-benar dilakukan secara terus menerus agar kedepan masyarakat mengerti bagaimana rumah yang sehat tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan melalui turun ke desa-desa yang akan dilaksanakan pembinaan dengan cara penyuluhan dengan para kader PKK desa dan masyarakat yang langsung terlibat dengan kegiatan PKK. Sehingga program ini bermanfaat dan harus dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya.

d. Program Pokja IV.

1) Pelaksanaan program kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja IV terkait program kesehatan adalah pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kader Posyandu yang dilaksanakan di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat selama satu hari sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader PKK dan kader kesehatan di lapangan untuk dapat memahami tugas dan fungsi dari Posyandu. Kegiatan ini dilakukan dengan perencanaan yang telah disusun di dalam rencana kerja PKK Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan pelatihan ini diawali dengan dibentuknya panitia pelaksana yang dibahas dalam rapat pembentukan panitia dan didokumentasikan dalam notulen rapat kemudian pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sesuai rencana yang telah disusun dengan menyiapkan para narasumber yang ahli di bidang Posyandu sehingga dari narasumber itu sendiri melibatkan dari dinas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan. Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 40 orang yang terdiri dari kader Posyandu di enam kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat. Kegiatan ini juga telah dibuat laporan hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang disertai dokumentasi kegiatan pelatihan. Hasil yang diharapkan dalam pelatihan ini adalah meningkatnya

pemahaman para kader PKK terutama kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat agar terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera. Sehingga program ini sangat berguna bagi peningkatan sumber daya manusia dalam menambah wawasan tentang kesehatan. Program pelatihan Posyandu ini bermanfaat sekali bagi kemajuan Posyandu yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga perlu dilaksanakan secara terprogram dan terarah.

2) Pelaksanaan program kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja IV terkait program kelestarian lingkungan hidup adalah melalui pembinaan dan penyuluhan ke masyarakat untuk melestarikan lingkungan sesuai HATINYA PKK. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat agar mau melestarikan lingkungan masing-masing dengan menjaga dan melestarikan tanaman yang bermanfaat, menjaga lingkungan agar selalu bersih dan tertata rapi. Program ini telah dilaksanakan dengan baik oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat kepada para kader PKK desa/kelurahan dan kecamatan yang mana para kader ini di minta untuk menggerakkan masyarakat untuk selalu melestarikan lingkungannya agar tetap hijau, rindang dan sejuk. Hasil dari program ini adalah terciptanya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan

dan melestarikan tanaman yang ada disekitar rumah dan dibuktikan dari piala Adipura yang telah di raih Kabupaten Kotawaringin Barat selama 10 kali berturut turut setiap tahunnya sebagai kota kecil terbersih tingkat nasional. Sehingga program ini sangat bermanfaat dan agar dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

3) Pelaksanaan program perencanaan sehat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa program Pokja IV terkait program perencanaan sehat adalah melalui penyuluhan dan pembinaan ke kader-kader kesehatan agar menyampaikan kepada masyarakat untuk mempersiapkan perencanaan keuangan dan memberikan arahan mengenai pola hidup sehat yang baik dan benar sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Artinya program ini menyiapkan masyarakat untuk perencanaan di masa yang akan datang. Dengan adanya perencanaan yang matang maka akan lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi dan kondisi yang diluar dugaan. Hasil yang dicapai dalam program ini adalah terciptanya kader PKK yang mampu melakukan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk membuat perencanaan sehat sejak dini. Program ini lebih mengutamakan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih siap dalam menghadapi masa depan sehingga program ini sangat bermanfaat sekali bagi kemajuan masyarakat agar lebih

memikirkan perencanaan kesehatan untuk bekal hidup dimasa depan.

2. Faktor Pendukung

a. Faktor Pendukung pelaksanaan program Pokja I.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di bahas pada hasil temuan bahwa faktor pendukung dalam melaksanakan Pokja I adalah adanya dukungan dari Ibu ketua dan dana. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh peneliti sebelumnya Effendi Heru Setiawan (2013) bahwa program dapat terlaksana dengan baik apabila ada yang mendukung salah satunya adalah dengan adanya anggaran yang meningkat dari periode sebelumnya. Data tersebut didukung dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2013 sampai tahun 2015 yang mana dari jumlah angka yang ada terdapat peningkatan setiap tahunnya. Meskipun menurut salah satu informan mengatakan tidak ada faktor pendukung.

b. Faktor pendukung pelaksanaan program Pokja II.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang telah di bahas sebelumnya bahwa faktor pendukung dalam melaksanakan Pokja II yaitu adanya dukungan dari pemerintah daerah, dana, lintas sektor terkait, dan pengurus PKK yang secara sukarela berkerja untuk PKK. Hal ini dapat di lihat melalui Peran pendampingan dalam pelaksanaan program-program PKK sebagaimana peran pendampingan yang telah dilakukan dapat di lihat dalam tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Pendampingan Lintas Sektor Terkait

No	Program	Pendampingan
1	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	Kesbangpolinmas/Kepolisian/BNK
2	Gotong Royong	BPMD/PP
3	Pendidikan dan Keterampilan	Dikpora
4	Pengembangan Kehidupan berkoperasi	Dinas Koperasi dan Pasar
5	Perumahan dan tata laksana rumah tangga	BLH/ Dinas PU
6	Kesehatan	Dinas Kesehatan/BPPKB
7	Pangan	Dinas Pertanian dan Peternakan/BPPKP/Dinas Perkebunan
8	Sandang	Dinas Perindag
9	Perencanaan Sehat	Dinas Kesehatan
10	Kelestarian lingkungan hidup	BLH

Sumber: Data TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

c. Faktor pendukung pelaksanaan program Pokja III.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat faktor pendukung dalam melaksanakan Pokja III yaitu adanya kerja sama dalam pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten itu sendiri dengan semangat yang tinggi dan ikhlas mengemban tugas sesuai bidangnya masing-masing, dan adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

d. Faktor pendukung pelaksanaan program Pokja IV.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat faktor pendukung dalam melaksanakan Pokja IV yaitu adanya komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dalam hal ini lintas sektor terkait dengan pengelola

atau pengurus PKK Kabupaten kebawah sampai ke tingkat dasawisma sehingga memudahkan PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan apa yang telah diprogramkan oleh Pokja IV. Komitmen kemitraan itu dituangkan dalam kegiatan ODF di mana masyarakat di upayakan sudah tidak buang air sembarangan lagi melalui penyediaan alat toilet atau bahan bangunan yang sifatnya bantuan untuk melaksanakan program tersebut yang di dukung dari pemerintah desa, lembaga masyarakat, bantuan pihak ketiga, dan swadaya masyarakat setempat.

3. Faktor Penghambat

a. Faktor penghambat pelaksanaan program Pokja I.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas sebelumnya bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan Pokja I adalah kurangnya koordinasi antar pengurus dari Pokja I, tidak adanya arahan dari ketua Pokja I dalam pelaksanaan program, terbatasnya pengetahuan pengurusnya, dana yang masih kurang memadai dan jauhnya jangkauan pembinaan, di mana PKK Kabupaten juga melaksanakan pembinaan kedesa dan kelurahan karena PKK Kecamatan dan Kelurahan tidak mampu melaksanakan program PKK dengan maksimal karena tidak adanya dukungan operasional. Hal tersebut menyebabkan pelaksanaan program yang ada di Pokja I dirasakan kurang maksimal walaupun sudah dilaksanakan dengan baik secara program yang ingin di capai sebelumnya.

Dalam bab sebelumnya telah di bahas untuk melaksanakan proses pemberdayaan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu:

- 1) Para pemimpin harus mempunyai pemahaman yang jelas mengenai konsep pemberdayaan.
- 2) Konsep pemberdayaan mengasumsikan adanya perubahan dalam budaya (*culture change*), termasuk di dalamnya budaya organisasi dan perusahaan.
- 3) Para pemimpin, birokrat, manajer harus, dalam pelaksanaan konsep pemberdayaan, menyadari akan adanya perubahan peran (*role change*), di mana peran mereka mungkin saja berkurang.
- 4) Individu (masyarakat) harus mengubah dirinya dan menghilangkan '*mental conditioning, mental barriers and confort zone*' yang ada dalam diri mereka.
- 5) Proses pemberdayaan bukan suatu yang instan (*quick-fixed approach*). Proses ini membutuhkan waktu dan berbeda dari individu ke individu.

Dari konsep di atas maka diperlukan pemimpin yang paham akan tujuan programnya untuk pemberdayaan masyarakat agar dalam menuangkan programnya dapat dilaksanakan dengan baik. Karena kurangnya koordinasi yang ada di Pokja I sehingga menyebabkan proses pelaksanaan kegiatan masih terkesan masing-masing pengurus tidak ada saling komunikasi didalamnya.

b. Faktor penghambat pelaksanaan program Pokja II.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan Pokja II adalah:

- 1) Pengetahuan kader sasaran pada umumnya masih rendah sehingga apabila kita mengembangkan teknologi-teknologi baru masih sangat sulit di terima.
- 2) Jauhnya jangkauan ke desa-desa sehingga tidak maksimal dalam membina.
- 3) Dana yang belum mencukupi.
- 4) Adanya pergantian pengurus yang selalu baru yang mana pengurus lama tidak menularkan ilmunya kepada pengurus baru sehingga pembinaan dari nol lagi.

c. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pokja III.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa ada faktor penghambat dalam melaksanakan Pokja III yaitu:

- 1) Akses yang sangat jauh

Secara geografis Kabupaten Kotawaringin Barat ini sangat luas sekitar 10.759 Km² sehingga jarang antar kecamatan satu dengan lainnya ataupun desa satu dengan dengan lainnya sangatlah berjauhan sehingga kegiatan pelaksanaan pembinaan maupun pelatihan menyebabkan kurang maksimal dikarenakan waktu yang

banyak terkuras di perjalanan dan waktu pelaksanaan kegiatan hanya satu hari saja.

2) Dana yang belum mengcover semua kebutuhan Pokja III.

Dalam pelaksanaan program Pokja III memang sudah mendapatkan alokasi dana operasional kegiatan PKK namun tidak semua kegiatan yang dapat disampaikan oleh Pokja III ke enam kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat karena keterbatasan dana yang ada di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat yang mana dana tersebut digunakan juga untuk Pokja lainnya.

3) Medan jalan/infrastruktur yang belum memadai.

Kabupaten Kotawaringin Barat yang wilayahnya cukup luas dan masih ada beberapa desa yang masih sangat susah untuk infrastruktur jalan menuju desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat terutama desa-desa di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Arut Utara masih banyak desa yang belum mendapatkan perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan jalan guna memperlancar tujuan menuju desa yang paling ujung. Dengan medan yang berat dan berbahaya sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan PKK tidak maksimal karena ketika sampai di lokasi kondisi fisik pengurus PKK yang sedang melaksanakan tugas kadang-kadang ada yang merasa kurang fit karena kelelahan dalam perjalanan yang jauh. Sehingga perlu

perbaikan infrastruktur jalan menuju kedesa-desa agar menjadi lebih baik.

4) Sumber Daya Manusia di perdesaan yang masih rendah.

Dalam melaksanakan program Pokja III masih terkendala dengan para kader yang ada di desa masih kurang paham atas penyampaian dari pembinaan-pembinaan yang diberikan baik tentang administrasi maupun kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan karena rata-rata masyarakat yang ada di desa itu masih berpendidikan rendah dalam hal ini hanya sampai Sekolah Dasar. Masyarakat di desa masih memiliki pola pikir bahwa yang penting bisa baca, tulis dan mengaji sudah cukup untuk hidup sehari-hari karena mereka masih mengutamakan berkerja mencari uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari.

5) Kurangnya dukungan lintas sektor

Dalam pelaksanaan program Pokja III ini sangat dirasakan kurang mendukung dari pelaksanaan program Pokja III dalam hal kegiatan lomba B2SA (bahan bergizi seimbang dan aman) dan menu serba ikan sehingga kegiatan ini hasil yang dicapai tidak maksimal walaupun telah melaksanakannya sesuai dengan panduan mengikuti lomba.

Dari berbagai kendala ini dapat di sikapi dengan bagaimana metode yang digunakan untuk melaksanakan program pemberdayaan itu sendiri. Dimana menurut Dahama dan Bhatnagar (1980) bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat itu mencakup salah satunya

penggunaan metode yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) sehingga dapat meminimalisir faktor penghambat tersebut.

d. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pokja IV.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah di bahas pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan Pokja IV yaitu secara teknis dari tingkat pemahaman para kader-kader PKK khususnya kader kesehatan masih di nilai kurang, masih adanya anggapan yang kurang terhadap peran PKK di kecamatan, desa maupun kelurahan, kemudian anggaran untuk operasional dalam penggerakan program-program pemerintah belum memadai khususnya di PKK kelurahan dan kecamatan itu tidak memiliki dana operasional bahkan untuk kabupaten pun masih terbatas serta jangkauan yang jauh karena infrastruktur belum menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok sehingga diperlukan upaya ekstra untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan para kader kesehatan di lapangan karena kader ini secara teknis harus lebih memahami tentang kesehatan.

Berdasarkan hasil pembahasan jika dihubungkan dengan teori evaluasi program dan tujuan dari evaluasi program ini adalah bahwa evaluasi ini adalah mengukur sejauh mana pelaksanaan program PKK itu sesuai dengan pedoman Rakernas VII Tahun 2010 yang tujuannya adalah menilai program tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan

kembali. Setelah melakukan evaluasi peneliti mampu melihat hasil dari evaluasi tersebut sesuai dengan teori dari Rossi bahwa Siapa (kelompok) penerima manfaat program, dimana lokasinya, dan bagaimana spesifikasi (kekhususan) kelompok penerima manfaat program tersebut, apa metode yang terbaik yang akan diterapkan, demi tercapainya tujuan yang diinginkan, apakah program tersebut benar-benar konsisten dengan tujuan yang diinginkan, seberapa jauh peluang keberhasilan program yang akan dilaksanakan itu. Sehingga terori ini mampu mendukung dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program yang ada di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dari masing-masing Pokja sebagai berikut:

Pokja I bahwa program penghayatan dan pengamalan Pancasila seperti pembinaan kepada kelompok pengajian, pelatihan Kadarkum, arisan dan pola asuh anak adalah sudah terlaksana dengan cukup baik dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga program ini cukup baik untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam setiap tahunnya. Sedangkan untuk pelatihan Kadarkum masih dinilai kurang membawa dampak perubahan bagi masyarakat dan kader PKK dikarenakan kurangnya pemahaman dan tingkat pendidikan kader yang sama-sama masih rendah sehingga tidak dapat melakukan upaya penyuluhan secara maksimal, jadi untuk program Kadarkum kurang dirasa efektif dalam pelaksanaan program Pokja I. Selanjutnya untuk program gotong royong menjadi juri lomba gotong royong ini merupakan kerja sama dengan lintas sektor dan bermanfaat bagi kemajuan desa/kelurahan yang mengikuti lomba dan telah dilaksanakan dengan baik meskipun kurangnya koordinasi yang terjadi didalam internal pengurus Pokja I namun secara pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan baik. Dari hasil program ini dapat memberikan

memberikan masukan terhadap kekurangan yang ada di desa/kelurahan sehingga program ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya.

Pokja II melalui program pendidikan dan keterampilan dengan programnya pembinaan, pelatihan PAUD dan UP2K sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan memiliki manfaat bagi kader dan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya saja untuk program pelatihan PAUD agar dilaksanakan bagi desa/kelurahan yang belum ada PAUD nya sehingga hasil dari pelatihan tersebut dapat membawa perubahan bagi desa/kelurahan yang belum memiliki PAUD. Selanjutnya program pengembangan kehidupan berkoperasi melalui pembinaan kepada kelompok UP2K ini juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan membawa hasil kelompok yang di bina mendapatkan juara 2 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Program ini dapat di programkan setiap tahunnya karena bermanfaat bagi kemajuan kelompok UP2K di desa/kelurahan.

Pokja III melalui program pangan telah melaksanakan pembinaan untuk memanfaatkan tanaman lokal dan telah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan hanya saja hasil yang diharapkan belum maksimal karena beberapa kendala di lapangan karena merubah pola pikir masyarakat itu butuh waktu yang panjang dan berkelanjutan sehingga program ini sangat baik untuk dilanjutkan ketahun berikutnya. Selanjutnya program sandang juga melaksanakan pembinaan kepada masyarakat tentang meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai produksi Indonesia juga telah dilaksanakan dengan cukup baik hanya saja

hasil yang diharapkan belum maksimal karena mengubah pola pikir masyarakat membutuhkan waktu yang panjang dan berkelanjutan sehingga program ini juga cukup baik untuk diprogramkan setiap tahunnya. Selanjutnya program tata laksana rumah tangga melaksanakan pembinaan tentang rumah sehat sesuai HATINYA PKK sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan kegiatan ini selalu menunjang dalam kegiatan lomba-lomba PKK baik di tingkat kabupaten maupun sampai ke tingkat nasional. Sehingga program ini juga sangat baik untuk tetap diprogramkan pada tahun-tahun berikutnya.

Pokja IV melaksanakan program kesehatan melalui pembinaan, penyuluhan dan pelatihan kader Posyandu ini telah dilaksanakan dengan cukup baik karena dengan adanya dukungan sumber daya manusia yang handal, tersedianya kader-kader kesehatan di lapangan serta dukungan lintas sektor yang kuat sehingga kegiatan ini bermanfaat dan efektif bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Oleh karena itu, program ini baik untuk dilanjutkan dan diprogramkan secara terus menerus. Selanjutnya program kelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan dan penyuluhan ke masyarakat untuk melestarikan lingkungan sesuai HATINYA PKK, program ini juga telah dilaksanakan dengan baik dan bermanfaat bagi keindahan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mewujudkan kota terbersih dan sejuk. Hasil dari program ini PKK memiliki peran dalam mendukung dan mensukseskan program kelestarian lingkungan hidup sehingga Kabupaten Kotawaringin Barat meraih piala Adipura 10 kali

berturut-turut setiap tahunnya. Jadi program ini sangat bermanfaat dan efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan sehingga program ini agar dilanjutkan terus menerus dalam kegiatan Pokja IV. Selanjutnya program perencanaan sehat melalui penyuluhan dan pembinaan ke kader-kader kesehatan untuk mempersiapkan perencanaan keuangan sejak dini telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun hasil yang dirasakan masih belum maksimal karena tidak semua masyarakat yang menyiapkan dirinya untuk melakukan perencanaan sehat, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri sehingga merencanakan untuk kesehatan sering terabaikan. Berdasarkan tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan program perencanaan sehat maka perlu upaya yang lebih keras lagi dan berkesinambungan agar masyarakat sadar dengan pentingnya sebuah perencanaan sehat sehingga program ini sangat perlu diteruskan dalam program tahun berikutnya.

2. Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah:

Pokja I, adanya dukungan dari ibu ketua dan dana dari pemerintah daerah.

Pokja II, adanya dukungan dari pemerintah daerah, lintas sektor terkait, pengurus PKK yang secara sukarela berkerja untuk PKK.

Pokja III, adanya kerjasama dalam Tim PKK Kabupaten, semangat yang tinggi dan ikhlas mengemban tugasnya serta adanya dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Badan PMD Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pokja IV, adanya komitmen kemitraan antara pemerintah daerah dan PKK dalam program ODF.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

Pokja I, kurangnya koordinasi antar pengurus dari Pokja I, tidak adanya arahan dari ketua Pokja I, terbatasnya pengetahuan pengurusnya, dana yang masih terbatas, jauhnya jangkauan dan tidak adanya dukungan operasional PKK kecamatan dan kelurahan.

Pokja II, pengetahuan kader PKK desa masih rendah, jauhnya jangkauan, dana yang masih terbatas, dan adanya pergantian pengurus PKK di desa.

Pokja III, akses yang jauh, dana yang masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih rendah dan kurangnya keterlibatan lintas sektor di Pokja III.

Pokja IV, kurangnya pemahaman kader kesehatan, anggaran operasional untuk PKK kecamatan dan kelurahan belum memadai dan untuk PKK Kabupaten masih terbatas, jauhnya jangkauan dan infrastruktur yang belum memadai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh dari mengevaluasi program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat terkait pelaksanaan program-program PKK dan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan program, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait hasil dari penelitian ini baik terhadap pelaksanaan program maupun faktor pendukung dan penghambatnya sebagai berikut:

1. Pokja I peneliti menyarankan agar perlu pemberian pelatihan bagi pengurus Pokja I untuk meningkatkan pengetahuan kader dari Pokja, untuk pelatihan Kadarkum sebaiknya tidak diprogramkan pada kegiatan selanjutnya karena kurang maksimal hasilnya, kemudian perlunya menjalin komunikasi yang baik antar ketua dan pengurus PKK sehingga terciptanya koordinasi dan kerja sama yang baik.
2. Pokja II peneliti menyarankan agar pelatihan PAUD tidak dilaksanakan di enam kecamatan tetapi hanya bagi desa yang belum memiliki PAUD di desanya sehingga sasaran yang di capai dapat lebih fokus dan maksimal, perlunya pelatihan peningkatan pengetahuan kader PKK, melakukan koordinasi untuk kebijakan arahan antara pemerintah daerah dengan PKK agar setiap pergantian kepala desa/lurah tidak mengganti pengurus PKK di wilayahnya secara total, dan mengajukan anggaran program kerja kepada pemerintah daerah sesuai dengan target yang ingin dicapai.
3. Pokja III peneliti menyarankan tetap selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan lintas sektor terkait program-program Pokja III, dan mengajukan permohonan untuk penambahan anggaran serta mengusulkan ke pemerintah daerah untuk memperhatikan infrastruktur yang ada di desa.
4. Pokja IV peneliti menyarankan agar dilakukan pelatihan berbasis peningkatan pengetahuan kader dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dan mengusulkan ke pemerintah daerah untuk bisa mendukung penuh kegiatan PKK melalui anggaran yang disediakan untuk PKK kabupaten, kecamatan dan kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkin, M.C. K. Dailak, and P. White. (1979). *Using Evaluation Does Evaluation Make a Difference*. Los Angeles: Sage.
- Aminudin, Muhammad. (2007). *Evaluasi Rencana Lokasi Pemandangan Terminal Induk Km. 6 Banjarmasin*. Tesis. Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Aprilia, Hera. (2009). *Evaluasi Pelaksanaan Program Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Bugel, Kec. Panjatan, Kab. Kulon Progo dan Gesing, Kec. Panggang Kab. Gunung Kidul*. Tesis. Yogyakarta: MPKD Universitas Gadjah Mada.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert and Steven J Taylor. (1992). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach in The Social Sciences*, John Wiley and Sons-alih bahasa Arief F. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bryan, Carolie dan Louis G. White. (1987). *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, S.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design Choosing Among Five Tradition*. London: Sage Publication.
- Dahama, O.P. and O.P Bhatnagar. (1980). *Education and Comunication For Development*. New Delhi: Oxford & IBH Publishing CO.
- Foy, Nancy. (1994). *Empowering People at Work*. Grower Publishing Company London.
- Friedman, Jhon. (1992). *Empowerment: The Politics Of Alternatif Development*. Massachusetts: Blackwell Publishers.
- Grindle, Merilee S. (ed.), (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Guba, E.G dan Lincoln, Y. S. (1981). *Effective Evaluation*. San Francisco: jossey Bass Publisher.
- Guijt, Irene. (2000). *Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation*. Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation. Canada: ITDG Publishing.
- Hadi, Sutrisno. (1986). *Statistik*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi.

Lion, Eddy. dan Helmuth Y. Bunu. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya: jenggala Pustaka Utama.

Lofland dan Lofland. (1984). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bima Aksara.

Liotard, Jean F. (1989). *The Postmodernisme and Condition: A Report on Knowledge*. Oxford: Manchester University Press.

Mardikanto, Totok dan Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV.Afabeta.

Martinez, V.A. (1982). *Evaluation of the Effectiveness of Training Programme in The Evaluation of Extension Training Programme. Food and Fertilizer Technology Center. Technical Bulletin No. 68. (agustust)*.

Mikkelsen, Britha. (1995). *Methods of Development Work dan Research : A Guide for Practioners*. Sage Publications Inc.

Miles, Matthew B and A Michael Huberman. (1994). *An Expanded Source Book: Qualitative Data Analysis*, London: Sage Publications.

Moleong, Lexi. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad B dan Suwandi. (2006). *Manajemen Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kronologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Direksi Cipta.

Nugroho D Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pranarka, A.M.W dan Vidhyandika. (1996). "Pemberdayaan (Empowerment)" Dalam Onny Prijono dan Pranaka (ed). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Rossi, P.H., H.E. freeman and S.R. wright. (1979). *Evaluation. A Systematic Approach*. California: Sage Publication, Inc.

Rubin, J.H. (1993). *Understanding, the Ethos of Community Based Development : Ethnographhis Descriptions from Public Administrators*, Public Administration Review Vol. 53.

Santoso, Singgih. (2012). *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Scriven, M. (1991). *Evaluation thesaurus* (4th ed.). Newbury Park, CA: Sage. www.hfrp.org. diakses 1 April 2011.

Soesmono. (1975). *Metode Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: LPP (Diklat).

Stufflebeam, D.L. (1971). *Education Evaluation and Decision Making*. Ithaca: Peacock.

Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin Abdul Jabar, (2004), *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv. Alfabeta.

Sumaryadi, I.N. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Tayibnaps, F.Y. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Todaro, (1981). *Economic Development in The World*. London: Longman.

UNDP. (2002). *Handbook on Monitoring and Evaluating for Result*. New York: United Nation Development Programme.

Venlykawuwung. (22 Agustus 2012). Diambil dari situs World Wide Web: <http://danielkawuwung.blogspot.co.id/2012/08/teori-evaluasi-dalam-penelitian.html>

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.

Yuyun, yulia. (2 September 2012) . Diambil dari situs World Wide Web: <http://yhoen-yulia.blogspot.co.id/2012/09/penelitian-deskriptif-dan-eksplanatif.html>

Pedoman

Hasil Rapat Kerja Nasional VII PKK. (2010). *Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga*. Tim Penggerak PKK Pusat. Jakarta.

Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK.

Sejarah Singkat Kelembagaan PKK.

Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015.

Jurnal

Bandjar, Sitti Bulkis. (2009). *Key- Strategi, Peningkatan Mutu, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Bogor. (Journal. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/5417/2009sbb_abstract.pdf;sequence=1, Date added: June 21, 2016).

Darmawi, Edi. (2014). *Key- partisipasi Masyarakat, PNPM-MP dan Pembangunan Desa*. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Vol. 3 no.1. ISSN : 2252-5270. Kab.Lebong.

Erniyati. (2010). *Key- Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui PPMK*. Jakarta Utara.(repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../625/1/ERNIYATI-FDK.pdf oleh W Nilamsari - 2010).

Muslim, Aziz. (2003). *Key- Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Jurnal PMI. Vol.I No. I, 2003, P.

Setiawan, Efendi Heru. (2013). *Key-Evaluasi PNPM Mandiri Perdesaan*. Desa Selulu. Ejournal Ilmu Pemerintahan, 2013, 1 (2): 784-796. Ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Shalfiah, Ramandita. (2013). *Key-PKK, Program Pemerintah, Kota Bontang*. eJournal Ilmu Pemerintahan 1 (3): 975-984.

Sungkowo E, M. (2011). *Key- Kemiskinan, Pengangguran, Produktif, Pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan-nonformal, Mandiri*. Semarang. (<http://www.docs-engine.com/pdf/1/jurnal-penelitian-pemberdayaan-masyarakat.html>).



Lampiran 1**PEDOMAN WAWANCARA**

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

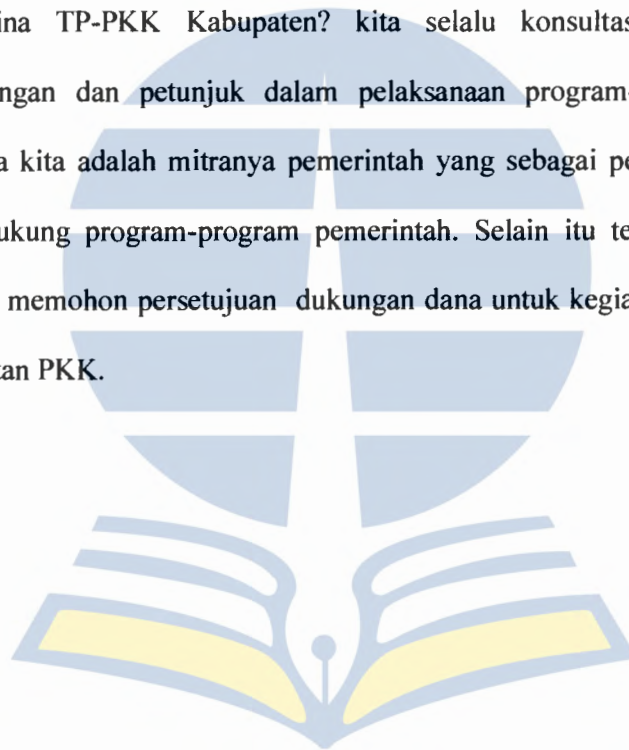
1. Nama : DS
2. Tempat Tanggal Lahir : Batu Raja, 5 Oktober 1962
3. Alamat : Jl. H.M. Rafii BTN Beringin Rindang
4. Jabatan : Ketua TP PKK Kabupaten

b. Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan program yang sudah rencanakan apakah dapat berjalan dengan maksimal? Iya baik, semua program sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal contohnya PAUD satu desa satu PAUD sampai saat ini belum ada semua desa memiliki PAUD, kedua HATINYA PKK rata-rata rumah sekarang ini tidak ada pekarangannya
2. Bagaimana keterlibatan lintas sektor dalam mendukung program-program PKK Kabupaten? Sangat baik, karena selama ini program yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung selama ini dalam melaksanakan program PKK dari tahun 2013, 2014 dan 2015 ? Faktor penghambatnya jauhnya jangkauan, untuk pelatihan UP2K kita tidak memberi modal dan pemasarannya masih susah karena desanya jauh. Untuk kelurahan dan kecamatan mereka susah untuk menindaklanjuti dibawah program-program yang ada karena dukungan operasionalnya tidak ada jadi program itu terhenti di kecamatan. Khusus di desa untuk pengurus nya selalu berganti setiap ada kader baru pengurusnya baru jadi

dari nol ke nol lagi jadi pembinaan berulang-ulang lagi. Sedangkan untuk faktor pendukung PKK Kabupaten Kotawaringin Barat adanya dana, dan adanya keterlibatan lintas sektor.

4. Upaya apa saja yang dilakukan PKK dalam mengatasi segala hambatan dalam pelaksanaan program-program PKK? PKK kabupaten selalu turun ke lapangan dan selalu memberikan kemudahan bagi kader-kader untuk bertanya apa yang belum di ketahui melalui via telepon.
5. Konsultasi kepada Ketua Pembina dan dinas terkait selaku anggota pembina TP-PKK Kabupaten? kita selalu konsultasi dan mohon bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan program-program PKK karena kita adalah mitranya pemerintah yang sebagai penggerak dalam mendukung program-program pemerintah. Selain itu terkait dana kita selalu memohon persetujuan dukungan dana untuk kegiatan operasional kegiatan PKK.



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : SN
2. Tempat Tanggal Lahir :Pangkalan Bun, 19 februari 1963
3. Alamat : Jl. Malijo Gg. Pepaya No. 14 Kelurahan
Madurejo
4. Jabatan : Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten

b. Pertanyaan

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran dan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat? untuk penyusunan anggaran di Kabupaten Kotawaringin Barat diawali dengan rapat pengurus Tim Penggerak PKK dan hasil rapat di buat proposal dan di ajukan ke Bupati dan apabila proposal di setujui, selanjutnya DPKD dapat menganggarkan sesuai persetujuan dari Bupati. Selanjutnya di bahas dalam forum SKPD dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat. Maka selanjutnya di tuangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan di jabarkan dalam DPA/SKPD BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat karena PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dananya tersedia atau di alokasi oleh DPKD kepada BPMD.
2. Bagaimana proses administrasi yang ada di PKK Kabupaten Kotawaringin Barat? di PKK ada staf yang di perbantukan oleh BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat jadi proses administarsi sudah berjalan dengan baik karena kami dari sekretariat itu selalu berpegang kepada

aturan yang ditentukan oleh hasil Rakernas begitu juga dengan PKK kecamatan, desa, dan kelurahan.

3. Apakah ada laporan tahunan terhadap perkembangan PKK Kabupaten Kotawaringin Barat? ada, laporan itu memang kita kirim ke Bupati sebagai Pembina dan PKK Provinsi sebagai pertanggung jawaban kegiatan setiap akhir tahun dan itu merupakan kewajiban berdasarkan hasil Rakernas setiap kegiatan harus di laporkan setiap akhir tahun.
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program PKK Kabupaten Kotawaringin Barat? alhamdulillah untuk dukungan itu ada dana, ada kantor, adanya pengurus PKK yang punya semangat tinggi dan juga koordinasi antar lini sudah berjalan dengan baik jadi apa saja kegiatan yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk penghambat pengetahuan yang masih rendah, dana untuk kelurahan dan kecamatan belum ada dan jauhnya jangkuan.
5. Apakah visi dan misi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terwujud? Berdasarkan visi dan misi yang ada kami menuangkannya melalui program-program yang dilaksanakan di masing-masing Pokja. Jadi visi dan misi ini sudah dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat dengan baik karena program sudah dilaksanakan sesuai target yang ingin dicapai.
6. Untuk tertib administrasi PKK apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? iya, karena PKK merupakan organisasi dari pusat sampai kedesa ada peraturannya jadi kita mengacu pada hasil Rakernas PKK begitu juga di PKK kecamatan, desa, dan kelurahan.

7. Apakah PKK Kabupaten melaksanakan monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan ? untuk pengendalian kita selalu mengadakan monitoring dan evaluasi di tiap-tiap kecamatan maupun di desa dan ada waktu-waktu tertentu yang kita undang PKK kecamatan atau desa untuk melaksanakan kegiatan rapat evaluasi pengendalian kegiatan di masing-masing desa dan kecamatan.
8. Upaya apa saja yang dilakukan untuk peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan Kinerja TP-PKK Kabupaten? kita selalu berupaya dengan maksimal untuk pencapaian target program yang telah di susun baik dari segi peningkatan kader melalui pelatihan, pembinaan dan monitoring serta evaluasi program dengan mengadakan lomba-lomba 10 program pokok PKK.
9. Apakah ada konsultasi dengan Ketua pembina PKK? tentu ada karena PKK kabupaten dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dan berkonsultasi kepada ketua pembina PKK maupun dinas terkait selaku anggota pembina PKK dalam pelaksanaan program-program yang ada di PKK kabupaten karena tanpa adanya dukungan dari pembina PKK maka program PKK tidak dapat berjalan dengan baik.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : SPA
2. Tempat Tanggal Lahir : Malang, 6 Mei 1980
3. Alamat : Perum Akasia Permai blok C.90
4. Jabatan : Wakil Bendahara

b. Pertanyaan

1. Bagaimana proses pertanggung jawaban keuangan oleh PKK Kabupaten? selama ini berjalan dengan baik semua kegiatan yang di programkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jadwal setelah itu baru melengkapi berkas-berkas/dokumennya untuk kelengkapannya untuk persiapan spj atau pertanggung jawaban di kerjakan di BPMD dengan data-data dari PKK atau dari personal yang telah melaksanakan kegiatan setelah itu di ajukan kepada bagian verifikasi di BPMD setelah semua dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada di setujui baru kita masukan lagi ke pembikinan SPM setelah itu barulah diserahkan ke DPKD untuk di proses keuangan selanjutnya.
2. Kendala apa yang ibu hadapi dalam mengelola keuangan PKK? Kendala yang saya hadapi adalah semua kegiatan ini dilaksanakan terlebih dahulu padahal kegiatan itu membutuhkan biaya atau dana sementara itu kegiatan harus tetap dilaksanakan walaupun dananya belum ada jadi entah bagaimana caranya yang pasti program yang sudah diprogramkan oleh PKK harus dilaksanakan.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

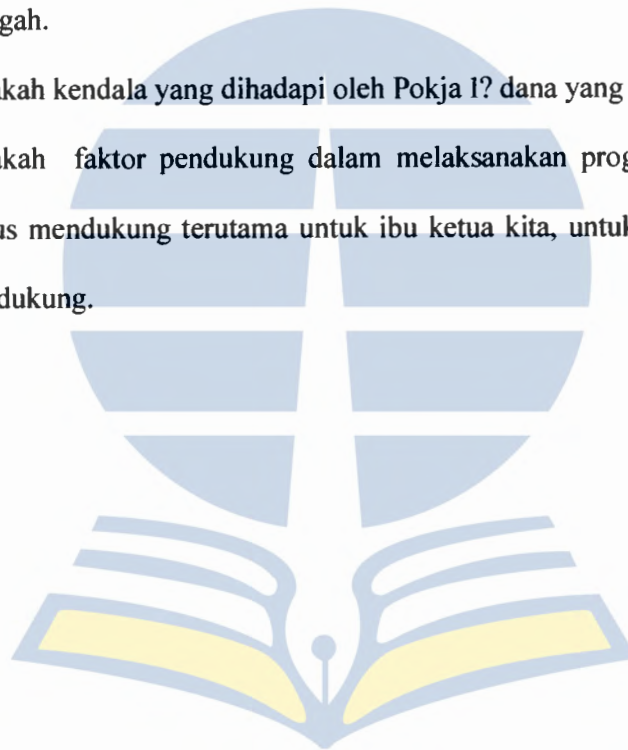
1. Nama : MC
2. Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 22 Juli 1957
3. Alamat : Jl. Padat Karya RT. 03 Kel. Sidorejo
4. Jabatan : Ketua Pokja I TP PKK Kab Ktw Barat

b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja I terkait program penghayatan dan pengamalan Pancasila ? untuk penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah pembinaan PKDRT, pelatihan Kadarkum dan lomba Kadarkum, pengajian, arisan dan pembinaan pola asuh anak.
2. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja I terkait program gotong royong ? untuk program gotong royong kita sekarang keterkaitan dengan program PMD yang setiap tahun di adakan lomba gotong royong jadi kita mengacu pada program PMD.
3. Bagaimana pelaksanaan dari program penghayatan dan pengamalan Pancasila apakah sudah dilaksanakan dengan baik? untuk pelatihan Kadarkum alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik , kegiatan dilaksanakan satu hari dan untuk target peserta sudah terpenuhi, untuk pelatih kita bekerjasama dengan polisi, BPPKB dan dari PKK. Dan ada laporan kegiatan hasil dari pelatihan tersebut sebagai pertanggung jawaban. Sedangkan untuk kegiatan pembinaan kita melakukan pembinaan sesuai dengan tupoksi dari Pokja I yang tentunya berdasarkan

dari Surat Tugas yang diberikan oleh Ketua PKK kabupaten dan hasil dari pembinaan tersebut selalu kita laporkan baik secara tertulis maupun lisan kepada ibu ketua.

4. Bagaimana pelaksanaan program gotong royong apakah sudah berjalan dengan baik? selama ini alhamdulillah berjalan dengan baik seperti kita sebagai tim lomba gotong royong ketika memilih desa/kelurahan yang jadi juara I tingkat kabupaten alhamdulillah dari tahun 2014-2016 juara I tingkat kabupaten mendapatkan juara I tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Adakah kendala yang dihadapi oleh Pokja I? dana yang belum maksimal.
6. Adakah faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja I? ya harus mendukung terutama untuk ibu ketua kita, untuk dari BPMD kan pendukung.



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : SA
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 24 Agustus 1946
3. Alamat : Jl. D.A.H Hamzah Kel. Mendawai
4. Jabatan : Anggota Pokja I TP PKK Kab Ktw Barat

b. Pertanyaan

1. Apakah tugas dan fungsi PKK dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan di PKK kecamatan, desa dan kelurahan sudah dilaksanakan? Sudah hanya untuk desa belum semuanya karena ibaratkan lahan kalau tidak pernah didatanggi ya seperti itulah tapi kalau kita kunjungi maka akan terlihat lahan itu.
2. Apa saja program yang dilaksanakan di Pokja I terkait penghayatan dan pengamalan Pancasila? Penghayatan Pancasila seperti pengajian, pelatihan kadarkum dan lomba kadarkum.
3. Apa saja program yang dilaksanakan di Pokja I terkait gotong royong? Untuk gotong royong mengikuti juri penilaian lomba gotong royong yang bekerja sama dengan lintas sektor untuk khusus program gotong royong dari pokja I sendiri tidak ada.
4. Bagaimana pelaksanaan program Penghayatan dan pengamalan Pancasila apakah sudah berjalan dengan baik ? untuk pelatihan Kadarkum berjalan dengan semestinya saja dan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan untuk pembinaannya dari kita sudah baik hanya

saja para kader yang ada di desa masih susah karena banyak yang masih baru-baru.

5. Bagaimana pelaksanaan program gotong royong apakah sudah berjalan dengan baik ? berjalan dengan baik untuk lomba gotong royongnya karena kita menilai sesuai dengan kriteria penilaian yang ada hanya saja untuk kegiatan gotong royong dalam Pokja I sendiri sepertinya tidak ada.
6. Adakah kendala yang dihadapi oleh Pokja I? kurang koordinasi antara pengurus. Misalnya ketua pokja I tidak ada arahan atau koordinasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
7. Adakah faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja I? tidak ada.
8. Apakah visi dan misi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sudah tercapai? Tercapai, walaupun Pokja I kurang kegiatannya namun target program PKK baik pelatihan dan pembinaan berjalan saja.
9. upaya apa saja yang dilakukan untuk peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan Kinerja TP-PKK? tidak ada untuk Pokja I karena selama ini programnya kami ngikut program yang ada saja.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : TS
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 23-3-1955
3. Alamat : Jl. Sukma Aria Ningrat RT.8 Gg. Kemuring
Kel. Baru
4. Jabatan : Anggota Pokja I TP PKK Kab Ktw Barat

b. Pertanyaan

1. Apa saja program yang dilaksanakan di Pokja I terkait penghayatan dan pengamalan Pancasila? Program penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah pembinaan pengajian, pembinaan kelompok rukun kematian dan pelatihan Kadarkum.
2. Apa saja program yang dilaksanakan di Pokja I terkait gotong royong ? kita mengikuti jadi juri lomba gotong royong dengan lintas sektor.
3. Bagaimana pelaksanaan program penghayatan dan pengamalan Pancasila apakah sudah berjalan dengan baik ? untuk kegiatan yang ada di Pokja I seperti pelatihan dan lomba Kadarkum seta pembinaan-pembinaan sudah berjalan dengan baik karena sudah dilaksanakan dan membuat laporan kegiatan.
4. Bagaimana pelaksanaan program gotong royong apakah sudah berjalan dengan baik? alhamdulillah berjalan dengan baik karena kita bekerja sama dengan tim lainnya dari lintas sektor.

5. Adakah kendala yang di hadapi oleh Pokja I? terbatasnya pengetahuan pengurusnya, pengurus yang mau sosial sekarang susah, SDM yang kurang dan jangkauan yang jauh.
6. Adakah faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja I? ada, dana.



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : RM
2. Tempat Tanggal Lahir : Kandangan, 7 Agustus 1961
3. Alamat : Jl. A. Yani RT.29 Kel. Baru
4. Jabatan : Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten

b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II terkait program pendidikan dan keterampilan? untuk bidang pendidikannya melaksanakan pembinaan ke lembaga-lembaga nonformal seperti PAUD, TPA, TPQ dan untuk keterampilan memberikan kepada ibu-ibu atau masyarakat terkait pemanfaatan limbah misalnya pemanfaatan barang bekas sehingga hasilnya nanti tujuannya untuk meningkatkan penghasilan keluarga.
2. Bagaimana pelaksanaan dari program pendidikan dan keterampilan apakah sudah dilaksanakan dengan baik? iya, berkat adanya dana yang disiapkan pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan dalam hal ini pelatihan PAUD dan UP2K, secara pelaksanaan sudah terlaksana dengan baik sebagaimana capaian target hanya saja untuk capaian sasaran belum mencukupi karena dana yang terbatas peserta kemarin hanya 40 orang saja dan kita sudah pertanggungjawabkan kegiatan tersebut dengan baik.
3. Apa saja yang dilaksanakan oleh pokja II terkait program pengembangan kehidupan berkoperasi? kita melaksanakan pembinaan ke desa-desa

dalam mengelola dana untuk modal simpan pinjam bagi usaha keterampilan yang ada di desa masing-masing.

4. Bagaimana pelaksanaan dari program pengembangan kehidupan berkoperasi apakah sudah dilaksanakan dengan baik? sudah baik, dimana kita sudah membina PKK desa maupun kelurahan dan kecamatan hanya saja untuk hasil yang diharapkan belum maksimal karena pengetahuan para kader untuk melaksanakan program ini masih di rasa susah karena pengetahuan yang masih terbatas dan kesibukan kerja dimasing-masing anggota sehingga tidak bisa fokus dalam menjalankan program yang sudah kita ajarkan.
5. Adakah kendala yang dihadapi oleh Pokja II? tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah kemudian jauhnya jangkauan ke desa-desa, dan pendanaan sebenarnya sudah ada cuma masih belum cukup memadai sehingga kegiatan kita di sana tidak berjalan dengan maksimal.
6. Adakah faktor pendukung dalam melaksanakan program POKJA II? Itu pasti, terutama adanya dukungan dari pemerintah daerah, kemudian kesiapan kita juga sebagai pengurus PKK yang siap bekerja untk membangun masyarakat di desa seperti itu. Dan tenaga PKK adalah sukarelawan.
7. Apakah PKK Kabupaten melaksanakan monitoring, evaluasi, supervise dan bimbingan? sudah dengan melakukan monitoring ke kecamatan, desa dan kelurahan serta melakukan evaluasi terhadap hasil program yang dilaksanakan terkait peningkatan pengetahuan para kader.

8. apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh PKK Kabupaten? tentu ada, karena Pokja II mengarah kependidikan dan keterampilan sehingga program-program yang ada selalu berkerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : DD
2. Tempat Tanggal Lahir : Madiun, 18 November 1968
3. Alamat : Jl. H. Mustalim No. 5 Perum Deltamas Kel.
Madurejo
4. Jabatan : Anggota Pokja II TP PKK kabupaten

b. Pertanyaan

1. Bagaimana penyusunan program kerja? Program disusun berdasarkan program yang sudah ada, untuk program yang belum dapat di anggarkan tahun ini maka akan di usulkan pada tahun berikutnya.
2. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II terkait program pendidikan dan keterampilan ? program yang berbasis pada pendidikan dan keterampilan kita menyusun program pelatihan PAUD dan Pelatihan UP2K yang di sertai dengan pembinaan maupun sosialisasi ke desa-desa tentang program pendidikan dan keterampilan
3. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan dan keterampilan apakah sudah berjalan dengan baik ? untuk pelatihan PAUD dan Pelatihan UP2K kita sudah laksanakan dengan baik karena apa yang kita targetkan sudah terpenuhi sesuai kebutuhan. Dan data-datanya dapat di lihat di sekretariat hasil kegiatan tersebut
4. Apa saja yang dilaksanakan oleh pokja II terkait program pengembangan kehidupan berkoperasi ? kita melakukan pembinaan ke desa-desa maupun

di lingkungan sekitar kita yang kita bisa sampaikan tentang pengelolaan keuangan untuk dapat di simpan pinjamkan sesama anggota agar mampu berusaha secara mandiri.

5. Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja II? Dari lintas sektor yang membantu bahwa program-program yang diprogramkan PKK itu sangat membantu sekali bahwa program PKK ini bisa tercapai.
6. Apakah ada faktor penghambat/kendala dalam melaksanakan program Pokja II? Satu, untuk di PKK kecamatan kebanyakan ganti-ganti pengurus jadi mereka tidak menularkan ilmunya ke pengurus baru jadi akhirnya terputus sehingga program-program yang seharusnya berjalan secara berantai sehingga terputus kadang-kadang PKK desanya tidak menularkan kepengurusan yang baru, kedua jadwal kegiatan PKK Kabupaten tidak bisa di jadwalkan secara rutin.
7. Apakah visi dan misi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah terwujud? Sudah tercapai hanya belum maksimal karena terkendala pembinaan yang kurang ke kecamatan.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : SY
2. Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi,27-7-1956
3. Alamat : Jl. Kawitan II no. 59 Kelurahan Sidorejo
4. Jabatan : Anggota Pokja II TP PKK kabupaten

b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh pokja II terkait program pendidikan dan keterampilan? Program pendidikan kaitannya dengan PAUD. Untuk keterampilan memberikan keterampilan kepada warga terutama anggota PKK dari kabupaten sampai ke desa yang mana fokusnyaa adalah home industry.
2. Bagaimana pelaksanaan dari program pendidikan dan keterampilan apakah sudah dilaksanakan dengan baik ? Alhamdulillah sudah, hanya sebagian kecil yang di masuki PKK kabupaten memang belum hanya beberapa persen. Untuk tingkat kecamatan sudah keseluruhan namun untuk desa belum seluruhnya karena pengurusnya kadang-kadang ada yang ganti.
3. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja II terkait program pengembangan kehidupan berkoperasi? Program pengembangan kehidupan koperasi adalah di awali dengan adanya jimpitan diwarga-warga di kelompok yasinan, arisan-arisan pra koperasi yang di bina untuk menjadi koperasi berbadan hukum.

4. Bagaimana pelaksanaan dari program pengembangan kehidupan berkoperasi apakah sudah dilaksanakan dengan baik? secara kecamatan sudah terlaksana semua, untuk ke desa tergantung kecamatannya melakukan pembinaan apa tidak karena kalau dari PKK kabupaten tidak mungkin mampu semua desa terjangkau dan juga karena desa-desa banyak pengurusnya berganti-ganti sehingga pembinaan itu dari nol lagi.
5. Apakah ada kendala dalam melaksanakan program Pokja II? Ada, salah satunya pergantian pengurus sehingga pembinaan dari nol kembali kemudian jangkauan yang jauh.
6. Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja II? Ada, dengan adanya dukungan dana dari pemerintah daerah.
7. Apakah PKK Kabupaten sudah melaksanakan pembinaan, petunjuk dalam melaksanakan program-program PKK ? Iya sampai ke desa.
8. Apakah PKK kabupaten melakukan monitoring dan memberikan umpan balik ke PKK kecamatan? Iya, itu dilaksanakan dengan kegiatan lomba-lomba, disamping itu juga dari kabupaten memberikan peluang kepada warga atau anggota PKK desa/kecamatan untuk bertanya langsung kepada masing-masing pokja secara terbuka.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : SH
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 13 Mei 1958
3. Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 57 Kelurahan Sidorejo
4. Jabatan : Ketua Pokja III TP PKK kabupaten

b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program pangan ? Pangan, dengan membudidayakan tanaman lokal jadi kita menggalakan tanaman lokal tidak lagi ketergantungan dari luar jadi makanan pokok itu tidak tergantung dengan beras saja bisa dengan jagung. Kegiatan yang ada di Pokja III kita mengadakan lomba TOGA (tanaman obat keluarga), dan pembinaan ke desa-desa terkait dengan TOGA.
2. Bagaimana pelaksanaan dari program pangan apakah sudah dilaksanakan dengan baik? sejauh ini sudah baik.
3. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program Sandang? sandang, kita mengarahkan mereka jangan sampai mereka cenderung menggunakan produk luar negeri daripada dalam negeri, program ini kita sampaikan melalui pembinaan maupun penyuluhan di kecamatan, desa maupun di kelurahan.
4. Bagaimana pelaksanaan dari program sandang apakah sudah dilaksanakan dengan baik? program sandang ini kita sampaikan melalui pembinaan dan event-event lomba B2SA, lomba masak serba ikan,

jambore, jadi program-program itu dapat terlaksana dengan baik dengan adanya dukungan dari pengurus sehingga program dapat berjalan dengan baik.

5. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program tata laksana rumah tangga? untuk program perumahan tata laksana rumah tangga kita membina sesuai dengan HATINYA PKK artinya rumah sehat itu ada pentilasinya, ada ruang untuk keluarga, ada SPAL, jadi HATINYA PKK tercipta dari rumah sehat itu.
6. Adakah kendala yang di hadapi oleh Pokja III? kalau kendala pasti ada kendala, pertama akses sangat jauh sehingga memakan waktu, dana, tenaga nah, karena tanpa infrastruktur yang baik tidak akan menekan kelancaran tugas kita di lapangan. Sumber daya manusia di desa sangat terbatas karena kebanyakan cuma tamat SD mungkin bisa baca ngaji ya cukup untuk rumah tangga. Selanjutnya masalah dana yang ada memadai dalam artian sesuai dengan yang kita program tidak ada pemangkasan. Selanjutnya kurang keterlibatan lintas sektor sangat kami rasakan.
7. Adakah faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja III? sangat ada, adanya kerjasama dalam Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat karena PKK ini sosial dan apa yang telah saya sampaikan tadi tidak ada gaji/sosial jadi di tim ini karena jiwa ini sudah terpanggil tanpa kita berapa kita enjoy aja karena ikhlas untuk berkerja.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : NS
2. Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Nusa, 1 Nopember 1956
3. Alamat : Jl. Jend Sudirman gg. Cendraesih RT.10 Kel.
Sidorejo
4. Jabatan : Anggota Pokja III TP PKK kabupaten

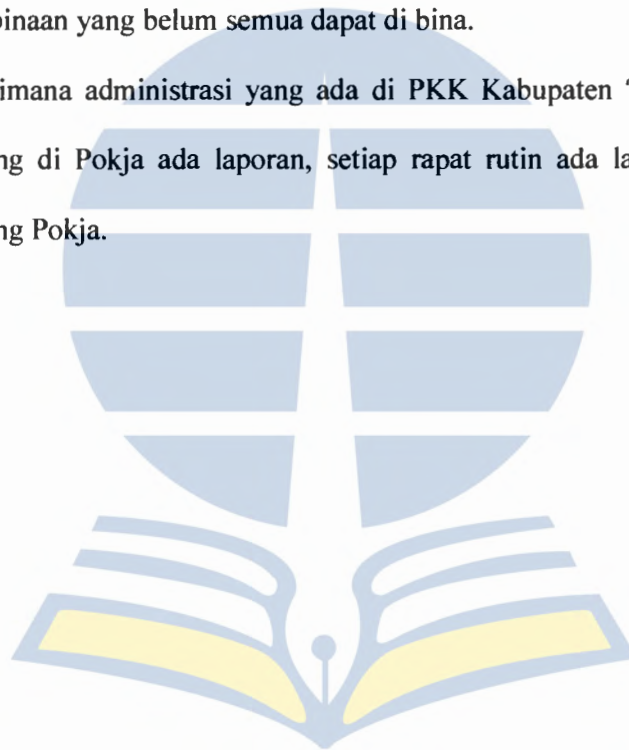
b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh pokja III terkait program pangan ?
Program pangan ini kita terus terang kita mengupayakan pangan ini berupa pangan non beras misalnya singkong menjadi makanan pokok jadi tidak hanya dari beras saja jadi kita budidayakan makanan non beras.
2. Bagaimana pelaksanaan dari program pangan apakah sudah dilaksanakan dengan baik? alhamdulillah sepertinya dari tahun 2013 sampai sekarang sudah mulai berangsur-angsur mengarah ke arah meningkat sudah ada perbaikan. Penyampaian program ini melalui penyuluhan, pembinaan dari PKK kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan sampai tingkat provinsi. Ini juga dibuktikan dengan tahun ini 2016 TOGA yang di Desa Sungai Kuning mendapatkan juara 1 tingkat Provinsi sehingga dari situ pembinaan kita itu berhasil.
3. Apa saja yang dilaksanakan oleh pokja III terkait program Sandang?
Sandang juga tidak jauh berbeda dari yang dahulu bahkan kita tetap

memakai produksi dalam negeri jangan sampai kita menggunakan produk luar negeri, hal ini kita sampaikan melalui pembinaan dan penyuluhan.

4. Bagaimana pelaksanaan dari program sandang apakah sudah dilaksanakan dengan baik? secara program sudah tersampaikan dengan baik mba mungkin hasil untuk yang kita harapkan itu belum maksimal karena saat ini masih banyak masyarakat yang menggunakan produk dari luar negeri.
5. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program tata laksana rumah tangga? Program perumahan tata laksana rumah tangga kita mengarah ke rumah sehat, istilah rumah sehat artinya ventilasi udara mencukupi, kamar kecil juga ada, pembuangan limbah juga ada dikatakan rumah sehat harus ada saluran air pembuangan limbah juga harus ada, meskipun rumah itu sederhana tapi harus sehat tidak harus rumah gedung, tidak harus rumah mewah.
6. Bagaimana pelaksanaan dari program tata laksana rumah tangga apakah sudah dilaksanakan dengan baik? sudah terlaksana dengan baik dari rumah-rumah penduduk sekarang sudah mulai tertata dengan baik.
7. Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja III? Tentunya pasti ada mba, dari dinas terkait itu pasti misalnya dari kantor PMD yang jelas membina secara langsung karena yang tanpa adanya bimbingan dari pemerintah daerah tidak akan berjalan juga dukungan dari dinas-dinas lain yang terkait.
8. Apakah ada faktor penghambat/kendala dalam melaksanakan program Pokja III? Kendala tentu ada, kendala itu berkaitan dengan dana, berkaitan dengan situasi dan kondisi.

9. Apakah TP-PKK Kabupaten sudah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendalian dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK? Saya rasa sudah terlaksana dengan baik bahkan kita sudah sering dapat juara-juara di tingkat provinsi seperti kaya TOGA kemarin kita dapat juara I sehingga terbukti bahwa pembinaan itu sudah berhasil.
10. Apakah visi dan misi PKK Kabupaten Kotawaringin Barat ini sudah terwujud? Sudah tercapai tapi belum maksimal ya salah satunya pembinaan yang belum semua dapat di bina.
11. Bagaimana administrasi yang ada di PKK Kabupaten ? Untuk masing-masing di Pokja ada laporan, setiap rapat rutin ada laporan dimasing-masing Pokja.



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : RH
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 5 Juli 1962
3. Alamat : Jl. Pasanah gg. Beringin RT.25 Kel. Sidorejo
4. Jabatan : Anggota Pokja III TP PKK kabupaten

b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program pangan?
Untuk pangan programnya mengajak/mensosialisasian masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, dan makanan pokok tidak hanya beras tapi bisa dari yang lain seperti jagung dan ubi-ubi tentunya untuk mengangkat makanan yang berasal dari tanaman lokal.
2. Bagaimana pelaksanaan dari program pangan apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Selama ini sudah dilaksanakan dengan baik dan dapat di lihat dengan hasil-hasil diadakan lomba-lomba TOGA di tingkat kabupaten maupun provinsi.
3. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program Sandang?
Sandang untuk menumbuhkan kesadaran mencintai produk dalam negeri, melalui kalau kita pembinaan ke desa-desa.
4. Bagaimana pelaksanaan dari program sandang apakah sudah dilaksanakan dengan baik? selama ini kita selalu berupaya untuk menyampaikan program dari Pokja III khususnya sandang ini melalui pembinaan dan penyuluhan, tentunya di saat kita melakukan pembinaan

kita selalu menyampaikan program tersebut sehingga program tersebut kita sudah laksanakan dengan baik tentunya.

5. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja III terkait program tata laksana rumah tangga? Untuk tata laksana rumah tangga kita menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan dengan HATINYA PKK.
6. Bagaimana pelaksanaan dari program tata laksana rumah tangga apakah sudah dilaksanakan dengan baik? sejauh ini kita sudah laksanakan program Pokja III dengan baik karena HATINYA PKK ini selalu di ikut lombakan sebagai percontohan rumah sehat dalam kriteria berbagai event lomba-lomba baik lomba desa maupun lomba gotong royong yang pernah diadakan.
7. Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja III? Ada, terkait dana dan pengurus Pokja III yang solid dalam melaksanakan tugasnya.
8. Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan program pokja III? jauhnya jangkauan karena medan jalan yang masih sangat susah untuk di lalui sehingga memperlambat waktu kita sampai ketempat tujuan.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : AS
2. Tempat Tanggal Lahir : Purworejo, 16 Desember 1972
3. Alamat : Jl. H.M. Rafi'I Perum Bambu Kuning
4. Jabatan : Ketua Pokja IV

b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program kesehatan? melalui pembinaan-pembinaan kegiatan Posyandu. Kita juga mengadakan pelatihan kader Posyandu dan lomba untuk Posyandu di tingkat kabupaten.
2. Bagaimana pelaksanaan dari program kesehatan apakah sudah dilaksanakan dengan baik? iya tentunya program itu ada yang bisa berjalan dengan baik ada juga yang mengalami hambatan namun demikian kami sebagai unsur organisasi tetap akan menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaannya melalui upaya monitoring
3. Apa saja yang dilaksanakan oleh pokja IV terkait program kelestarian lingkungan hidup? untuk program kelestarian lingkungan hidup kita programkan melalui pembinaan dan penyuluhan ke desa-desa yang kita kunjungi agar melestarikan lingkungannya agar tetap bersih hijau dan lestari sesuai dengan HATINYA PKK.

4. Bagaimana pelaksanaan dari program kelestarian lingkungan hidup apakah sudah dilaksanakan dengan baik? pada dasarnya semua program sudah kita laksanakan dengan baik dengan mengacu pada pedoman PKK dan apa yang sudah kita rencanakan dan kita laksanakan sesuai dengan prosedur yang ada di PKK.
5. Apa saja yang dilaksanakan oleh pokja IV terkait program perencanaan sehat? melalui pembinaan dan penyuluhan kepada kader-kader PKK untuk dapat menggerakkan warganya untuk dapat mempersiapkan diri melalui penyiapan investasi jika menghadapi suatu masalah dengan kesehatan. Seperti peserta Posyandu para kader kesehatan mengajak para ibu hamil untuk menyiapkan tabungan bersalin sejak dini agar ketika lahir sang ibu tidak bingung terhadap biaya persalinan.
6. Bagaimana pelaksanaan dari program perencanaan sehat apakah sudah dilaksanakan dengan baik? kita sudah melaksanakan dengan baik melalui pembinaan, pelatihan dan penyuluhan sampai kedesa-desa.
7. Adakah kendala yang dihadapi oleh POKJA IV? terkadang hambatan itu bisa datang dari internal kader kita sendiri yang secara teknis belum memahami keprograman-keprograman yang harus dilakukan oleh kader PKK. Kemudian yang kedua dukungan dari pengambil kebijakan ditingkat desa masih dinilai kurang berperan. Ketiga masalah anggaran karena masih ada PKK kecamatan dan kelurahan tidak memiliki dana operasional dan PKK kabupaten pun masih terbatas.
8. Adakah faktor pendukung dalam melaksanakan program Pokja IV? faktor pendukung adalah komitmen kemitraan antara pemerintah daerah

dan PKK bahwa kita sudah mempunyai satu persepsi untuk meningkatkan derajat kesehatan menuju goals atau tujuan dari pembangunan kesehatan jadi seperti kegiatan-kegiatan desa siaga kemudian beberapa program seperti ODF (Open Defecation free) menstopkan masyarakat buang air sembarangan itu juga merupakan upaya yang sangat sinergi dengan program PKK karena memang di Pokja IV juga akan mengukur bagaimana kita bisa meningkatkan akses jamban sehat, air bersih dan sanitasi masyarakat.

9. Apakah ada kerja sama yang dilakukan oleh PKK kabupaten? iya, komitmen kemitraan antara pemerintah daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan tidak terlepas dari dukungan kebijakan dari dinas kesehatan atau pemerintah daerah di dalam menuju goals atau tujuan dari pembangunan kesehatan jadi seperti kegiatan-kegiatan desa siaga kemudian beberapa program seperti ODF (Open defecation free) stop buang air besar sembarangan.



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

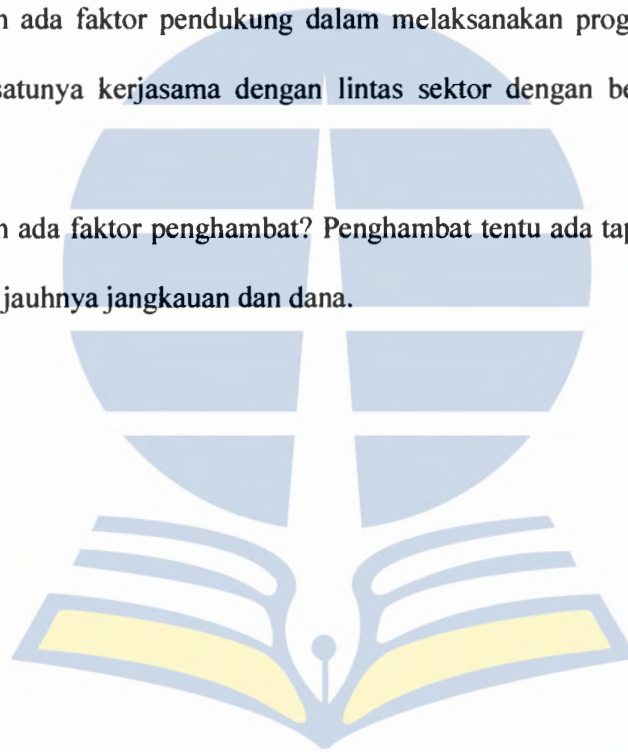
1. Nama : UM
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 13-8-1970
3. Alamat : Jl. Prakusumayudha RT.8 No.29 Kel. Raja
4. Jabatan : Anggota Pokja IV

b. Pertanyaan

1. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program kesehatan? Kita di Pokja IV melakukan pembinaan, pelatihan maupun penyuluhan ke desa-desa agar tujuan kita tercapai. Untuk kesehatan kita mengadakan pembinaan dan pelatihan kader-kader Posyandu.
2. Bagaimana pelaksanaan dari program kesehatan apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Alhamdulillah berjalan dengan baik walaupun ada kendalanya seperti daerah yang terlalu jauh jangkauannya tapi alhamdulillah itu bisa kita laksanakan, kita memotivasi mereka dengan kegiatan lomba posyandu dan adanya peran lintas sektor terkait program kerja Pokja IV.
3. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program kelestarian lingkungan hidup? Keterkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup kita mengadakan penyuluhan di desa-desa tentang apa arti lingkungan hidup itu sendiri.
4. Bagaimana pelaksanaan dari program kelestarian lingkungan hidup? Sudah dilaksanakan dengan baik karena ini bisa dilihat dari keberhasilan

Kabupaten Kotawaringin Barat meraih piala Adipura 10 kali berturut-turut yang mana piala ini adalah penghargaan yang diberikan atas kebersihan dan menjaga kelestarian lingkungan dengan baik.

5. Apa saja yang dilaksanakan oleh Pokja IV terkait program perencanaan sehat? untuk perencanaan sehat memberikan penyuluhan tentang pola hidup yang sehat di lingkungan kita.
6. Bagaimana pelaksanaan dari program perencanaan sehat apakah sudah dilaksanakan dengan baik? iya sudah kita laksanakan dengan baik.
7. Apakah ada faktor pendukung dalam melaksanakan program? Jelas ada, salah satunya kerjasama dengan lintas sektor dengan beberapa instansi terkait.
8. Apakah ada faktor penghambat? Penghambat tentu ada tapi kita bisa atasi seperti jauhnya jangkauan dan dana.



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : RE
2. Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 19 Februari 1963
3. Alamat : Jl. Malijo Gg. Pepaya No. 14 Kel. Madurejo
4. Jabatan : Kepala BPMD Kab Ktw Barat

b. Pertanyaan

1. Bagaimana proses pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini? Selama ini cukup bagus, PKK telah melaksanakan administrasi dengan baik terutama menyangkut hal pertanggung jawaban keuangan sebagaimana kita ketahui bahwa sesuatu yang keluar apapun bentuknya rupiah tetap harus ada pertanggung jawaban secara transparan dan akuntabel. Jadi alhamdulillah PKK selama ini berjalan dengan tertib dalam hal administrasi.
2. Kendala apa yang dihadapi dalam mendukung program-program PKK? Masalah klasik menyangkut dana, kadang-kadang program-program PKK yang sudah di program jauh tidak dapat di akomodir semua karena pagu yang diberikan BPMD juga terbatas di bagi dalam kegiatan lima bidang.

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : SK
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Mei 1968
3. Alamat : Desa Pandu Sanjaya RT.1 RW. 5
4. Jabatan : Sekretaris TP PKK Kecamatan Pangkalan Lada

b. Pertanyaan

1. Apakah ada fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program-program PKK? Tidak ada yang mendukung kecuali sekretariat PKK saja.
2. Apakah PKK Kecamatan memiliki dana operasional dalam melaksanakan program-program yang ada? Kalau PKK kecamatan tidak ada.
3. Apakah PKK Kecamatan pernah dapat pembinaan dari PKK Kabupaten? Ada, tapi tidak setiap bulan.
4. Apakah bermanfaat bagi peningkatan kader yang ada diwilayah ibu? Bermanfaat.
5. Dari segi biaya, waktu dan manfaat sudah efisien atau belum atas pelatihan dan pembinaan yang diberikan? Untuk materinya manfaatnya sudah efisien tapi waktunya kurang keterbatasan waktu.
6. Apakah program yang disampaikan para kader benar-benar berguna bagi masyarakat setempat?berguna

PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : YL
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 6 Juli 1971
3. Alamat : Jl. Abdul Ancis Perum Bukit Asri No.3 RT.10
Kelurahan Madurejo
4. Jabatan : Ketua PKK Kecamatan Arut Selatan

b. Pertanyaan

1. Apakah ada fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program-program PKK? Kalau pembukuan bisa minta di kantor kecamatan. Kalau PKK kecamatan ada meja, kalau komputer tidak ada, kendaraan tidak ada.
2. Apakah PKK Kecamatan memiliki dana operasional dalam melaksanakan program-program yang ada? Kalau dana dari kantong sendiri(tidak ada).
3. Apakah PKK Kecamatan pernah dapat pembinaan dari PKK Kabupaten? pernah, dan juga apabila PKK Kabupaten mengundang kedesa wilayah binaan kami juga laksanakan pembinaan.
4. Apakah PKK Kecamatan pernah mendapatkan pelatihan berupa pelatihan PAUD, Pelatihan UP2K, Pelatihan LP3PKK, Pelatihan Kadarkum, Lomba-Lomba HKG-PKK, Lomba Kadarkum dan lomba cerdas cermat PKK pada tahun 2013-2015? pernah
5. Apakah bermanfaat bagi peningkatan kader yang ada diwilayah ibu? Bermanfaat bagi pengetahuan untuk menambah wawasan.

6. Apakah pelatihan dan pembinaan yang diberikan PKK kabupaten sudah efektif sesuai dengan kebutuhan kader di PKK Kecamatan? Alhamdulillah kalau untuk 10 Program Pokok PKK kami ingin ada pengisian papan data atau buku-buku perpokja.
7. Apakah program yang disampaikan para kader benar-benar berguna bagi masyarakat setempat? Jelas berguna



PEDOMAN WAWANCARA

Mohon diisi dengan benar setiap pertanyaan ini

a. Data Informan

1. Nama : RT
2. Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 2 Mei 1983
3. Alamat : Desa Sungai Melawen RT.2
4. Jabatan : Ketua PKK Desa Sungai Melawen

b. Pertanyaan

1. Bagaimana pelaksanaan program yang sudah rencanakan apakah dapat berjalan dengan maksimal? Sudah berjalan cuma kadang ada yang aktif ada yang tidak contohnya pertemuan. Pas arisan tapi yang ada cuma sebagian. Arisannya tgl 8 setiap bulan di sekretariat PKK desa.
2. Apakah ada fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan program-program PKK? Belum ada, kalau sekretariat ada. Kalau komputer dan lain-lain belum ada cuma kita pakai punya sendiri/pribadi.
3. Apakah PKK desa pernah dapat pembinaan dari PKK kabupaten? ada, PKK kabupaten pernah membina tentang administarsi PKK di Desa Sungai Melawen.
4. Apakah PKK Kecamatan pernah mendapatkan pelatihan berupa pelatihan PAUD, Pelatihan UP2K, Pelatihan LP3PKK, Pelatihan Kadarkum, Lomba-Lomba HKG-PKK, Lomba Kadarkum dan lomba cerdas cermat PKK pada tahun 2013-2015? Belum, cuma pelatihan administrasi saja. Untuk pelatihan dari kabupaten ada pelatihan Kadarkum.

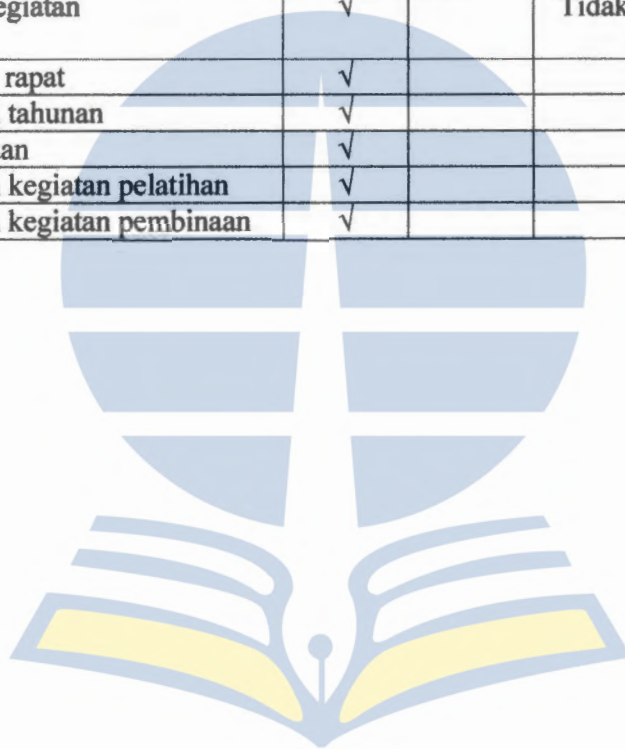
5. Apakah bermanfaat bagi peningkatan kader yang ada di wilayah ibu? Iya ada peningkatan.
6. Apakah pelatihan dan pembinaan yang diberikan PKK kabupaten sudah efektif sesuai dengan kebutuhan kader di PKK desa? Iya insyaallah sudah karena setiap bulan itu ada laporan jadi administrasinya berjalan.
7. Apakah hasil pelatihan dan pembinaan memberikan kepuasan bagi para kader di Desa? Iya insyaallah puas



Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

NO	PENGAMATAN	ADA	TIDAK	KETERANGAN
1	SK Pengurus	√		
2	Papan Data	√		
3	Program Kerja	√		
4	Struktur Pengurus	√		
5	Fasilitas Kantor	√		
6	Adminstrasi 6 buku	√		
7	Dokumentasi kegiatan	√		
8	Buku pedoman PKK	√		
9	Rapat kegiatan	√		Tidak rutin setiap bulan
10	Notulen rapat	√		
11	Laporan tahunan	√		
12	pendanaan	√		
13	Laporan kegiatan pelatihan	√		
14	Laporan kegiatan pembinaan	√		



Lampiran 3



Foto Kegiatan Menjadi Pelatih pada kegiatan P2WKSS



Foto Ketua TP PKK Kabupaten saat melakukan kunjungan ke PKK Kecamatan Arut Utara



Foto pembinaan kepada kader Posyandu di Kelurahan Mendawai



Pembinaan dan kunjungan ke Posyandu di Kelurahan Mendawai



Foto kelompok UP2K yang ada di Desa Batu Belaman



Foto kegiatan pelatihan UP2K



Foto wawancara dgn Ketua Pokja II TP PKK Kabupaten



Foto wawancara dengan Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten



Foto kegiatan penilaian lomba TOGA tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016



Foto Ketua PKK Kabupaten saat membina di Posyandu Desa Teluk Bogam



Foto Pembinaan PKK Kabupaten ke PKK Kecamatan Pangkalan Lada



Foto wawancara dengan Wakil Sekretaris TP PKK Kabupaten



Foto wawancara dengan Wakil Bendahara TP PKK Kabupaten



Foto wawancara dengan Kepala BPMD Kabupaten Kotawaringin Barat



Foto pembinaan PKK Kabupaten ke PKK Desa Pangkalan Dewa





BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : **11** / II / TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MASA BAKTI 2011-2016

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- barwa, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat perlu dibentuk pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat masa bakti 2011-2016;
 - barwa, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu penambahan personil pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat masa bakti 2011-2016;
 - barwa, nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas menjadi pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat masa bakti 2011-2016;
 - barwa, untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah ;
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor :125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :414-401 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010 ;
 - Keputusan Rakernas VII PKK Nomor 01/KEP/PKK P5.T/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010 ;
 - Keputusan Rakernas VII PKK Nomor 02/KEP/PKK P5.T/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Pedoman Kelembagaan PKK ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kotawaringin Barat (Lampiran Daerah Tahun 2000 Nomor 14 Seri D);
9. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01/Kep/PPK Prov/II/2012 Tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Pengangkatan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kotawaringin Barat tentang Perubahan Pertama Kali Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Bakti Tahun 2011-2016.
- Pertama** : Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Bakti Tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab kepada Bupati Kotawaringin Barat selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Ketiga** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Keempat** : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 33/IV/TAHUN 2012 Tentang Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Bakti 2011-2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Pangkalan Bun
Pada Tanggal Pebruari 2013

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

UJANG ISKANDAR

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri
Selaku Dewan Penyantun TP PKK Pusat di Jakarta
2. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Tengah
Selaku Dewan Penyantun TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah di P.Raja.
4. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun
5. Kepala Badan Kewasanaan Kabupaten Kotawaringin Barat di P. Bun.

No.	Nama	Jabatan
1.	Ny. Hj. Yustina Ujang Iskandar, SH	Ketua TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
2.	Ny. Desmalasanti Bambang Purwanto	Wakil Ketua I TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
3.	Ny. Siti Fatimah Masradin	Wakil Ketua II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
4.	Ny. Hj. Ir. Yurniah Wisman	Wakil Ketua III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
5.	Ny. Hj. drg. Ratna Serbini, M.Kes	Wakil Ketua IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
6.	Ny. Hj. Norzainah Suikarman A.Gani	Badan Penasehat TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
7.	Ny. Hj. Maslihati Masrukan	Badan Penasehat TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
8.	Ny. Dwita Setyawati Arma, S.STP.	Sekretaris TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
9.	Sañitro, S.Sos	Wakil Sekretaris TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
10.	Ny. Muji Asweni Tengku Akhmadi	Bendahara TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
11.	Ny. Sri Puji Astutik, S.Sos	Wakil Bendahara TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
12.	Ny. Hj. Muhayah Habib	Ketua Pokja I TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
13.	Ny. Hj. Muslimah Arliansyah, S.Ag.MPdI	Sekretaris Pokja I TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
14.	Ny. Hj. Sundari Masrun	Anggota Pokja I TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
15.	Ny. Martina Anis Rumpa, SE	Anggota Pokja I TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
16.	Ny. Hj. Tengku Salarah	Anggota Pokja I TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
17.	Ny. Hj. Siti Asni Ruhum Sanadin	Anggota Pokja I TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
18.	Ny. Hj. Ir. Ratnawati Masrun, M.St.	Ketua Pokja II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
19.	Ny. Hj. Nurhayati Zulkarnaen	Sekretaris Pokja II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
20.	Suyono, B.Sw	Anggota Pokja II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
21.	Ny. Marey Yohanes	Anggota Pokja II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
22.	Ny. Rahajeng Triyani	Anggota Pokja II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
23.	Ny. Dra. Eny Puji Rahayu	Anggota Pokja II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
24.	Ny. Dra. Dyah Joko Kuncoro	Anggota Pokja II TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
25.	Ny. Hj. Supiati Harun	Ketua Pokja III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
26.	Ny. Sunarsih Irham Junardi, SH	Sekretaris Pokja III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
27.	Hj. Siti Wahidah Abul Khaer, S.Ag	Anggota Pokja III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
28.	Ny. Kusana Sufatadi Sugiarto	Anggota Pokja III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
29.	Iwan Sutrisno, STP	Anggota Pokja III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
30.	Ny. Romiah	Anggota Pokja III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
31.	Ny. Yuliantini Maman Wiharja	Anggota Pokja III TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
32.	dr. H. Samsudin, M.Kes.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
33.	Ny. Ratna Willis Suriansyah, S.Sos	Sekretaris Pokja IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
34.	Drs. Siswanto	Anggota Pokja IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
35.	Ny. Dr. Rita Way Manad	Anggota Pokja IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
36.	Arif Susanto, SKM	Anggota Pokja IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
37.	Ny. Hj. Artiah Bakhtian Busra	Anggota Pokja IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat
38.	Ny. Utin Marhumah, SE	Anggota Pokja IV TP-PKK Kab. Kotawaringin Barat


 BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 UJANG ISKANDAR



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 31 /Skr/PPK.KTB/II/2015

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan PKK.
 3. Hasil Rakemas VII PKK Nomor : 02/KEP/PPK.PST/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2015 Tentang Pedoman Kelembagaan PKK.
 4. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 11/II/Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Kali Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Bakti 2011-2016.

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
MENUGASKAN**

Kepada : Nama : Nv. TITIEK SRIYANTI
Jabatan : Anggota Pokja II TP-PKK Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk : Untuk melaksanakan tugas sebagai Anggota Pokja II Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Kotawaringin Barat terhitung mulai tanggal 2 Januari 2015.

1. Surat tugas ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan berakhir pada Tahun 2016
2. Penugasan ini agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
3. Melaporkan hasilnya kepada ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, Januari 2015

**KETUA TIM PENGGERAK PKK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Ny. Hj. YUSTINA UJANG ISKANDAR, SH, MH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun
2. Kepala BPMD Kab. Ktw. Barat di P. Bun
3. Kepala DPKD Kab. Ktw. Barat di P. Bun
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 9 /ST/PPK.KTB//2016

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK.
 3. Hasil Rakernas VII PPK Nomor : 02/KEP/PPK.PST/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 Tentang Pedoman Kelembagaan PPK.
 4. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Kali Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Bakti 2011-2016.

**KETUA TP-PKK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
MENUGASKAN**

Kepada : Adi Budiarto, SP.

Untuk : Melaksanakan Tugas sebagai Anggota Pokja III Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat. Surat Tugas ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PANGKALAN BUN
Pada tanggal : 5 JANUARI 2016

**KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT**
Ny. DESMALASANTI BAMBANG PURWANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun
2. Kepala BPMD Kab. Ktw. Barat di P. Bun
3. Kepala DPKD Kab. Ktw. Barat di P. Bun
4. Kepala DISTANAK Kab. Ktw. Barat di P. Bun
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.



SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 10 /ST/PPK.KTB//2016

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK.
 3. Hasil Rakernas VII PKK Nomor : 02/KEP/PPK.PST/VII/2010 Tanggal 30 Juli 2010 Tentang Pedoman Kelembagaan PKK.
 4. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 11 Tahun 2013 Tentang Perubahan Pertama Kali Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat Masa Bakti 2011-2016.

KETUA TP-PKK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MENUGASKAN

Kepada : Samsudin, SKM.,M.Si.

Untuk : Melaksanakan Tugas sebagai Anggota Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat. Surat Tugas ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PANGKALAN BUN
Pada tanggal : 5 JANUARI 2016

KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT


Ny. DESMALASANTI BAMBANG PURWANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kotawaringin Barat di P. Bun
2. Kepala BPMD Kab. Ktw. Barat di P. Bun
3. Kepala DPKD Kab. Ktw. Barat di P. Bun
4. Kepala DINKES Kab. Ktw. Barat di P. Bun
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 25/SP/PKK Prov/XI/2015

Kepada
Yth. Ibu Ketua TP PKK Kab. Kotawaringin
Barat

di -
Pangkalan Bun

No	Yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat Keputusan No. - 04/KEP/PKK Prov/X/2015	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat Untuk menjadi bahan pelaksanaan lebih lanjut
2.	Berita acara Serah Terima Jabatan Ketua TP PKK Kab. Ktw. Barat	1 (satu) lembar	Terima kasih

Dikeluarkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 November 2015

An. Ketua
Sekretaris,
Ny. Titik Sundari, SH., MM

Tembusan, disampaikan kepada :
Yth. Ibu Ketua TP PKK Prov. Kalteng
(sebagai laporan)



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KEPUTUSAN

Nomor : 04 /KEP/PKK PROV/X/2015

TENTANG

PENGGANGKATAN KETUA TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP PKK)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62 / 5488 Tahun 2015 tanggal 1 Oktober 2015, tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa, berdasarkan butir a sebagaimana tersebut di atas maka perlu memberhentikan dengan hormat Ny. Desmalasanti Bambang Purwanto sebagai Plt. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Surat Tugas Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 54/ST/PKK Prov/IX/2015 tanggal 25 September 2015;
- c. bahwa, untuk tersebut diatas, perlu mengangkat Ny. Desmalasanti Bambang Purwanto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414-401 Tahun 2010 Tanggal 30 Juli 2010 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VII PKK Tahun 2010.
 2. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 01/Kep/PKK PST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Rumusan Hasil Rakernas VII PKK Tahun 2010.
 3. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 02/Kep/PKK PST/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan PKK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Mengangkat Ny. Desmalasanti Bambang Purwanto sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2011-2016.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan Bupati Kotawaringin Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2011- 2016 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

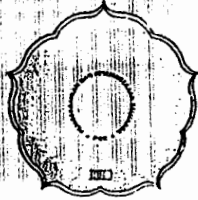
Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Oktober 2015

PJ. KETUA,

Ny. Ayuk Hadi Prabowo

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina TP PKK Pusat di Jakarta
2. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah selaku Ketua Pembina TP PKK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ibu Ketua Umum TP PKK di Jakarta
4. Bapak Bupati Kotawaringin Barat selaku Ketua Pembina TP PKK Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



PEMBERDAYAAN KESKIPERKERJAAN DAN KESUKSESRAJIAN KELUARGA

(P K K)

TIM PENGGERAK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Sekretariat : Jalan Pangetan Amami No. 127 ☎ (0532) 23292

PANGKALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH 74114

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Hj. Yustina Ismiati Ujang Iskandar, S.H., M.H.**
Jabatan : **Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kotawaringin Barat yang lama yang selanjutnya disebut Pihak Pertama**
2. Nama : **Desmalasanti Bambang Purwanto**
Jabatan : **Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kotawaringin Barat yang baru yang selanjutnya disebut Pihak Kedua**

Berdasarkan Surat Tugas Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 54/ST/PPKK.Prov/IX/2015 tanggal 25 September 2015 maka :

- a. Pihak Pertama menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kotawaringin Barat kepada Pihak Kedua,
- b. Pihak Kedua menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Kotawaringin Barat dari Pihak Pertama,
- c. Mulai saat penanda tangan Berita Acara Serah Terima ini, tugas dan tanggung jawab beralih dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua,
- d. Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap lima.

Yang menerima,

PIHAK KEDUA

Ny. DESMALASANTI BAMBANG PURWANTO

Yang menyerahkan,

PIHAK PERTAMA

Ny. Hj. YUSTINA ISMIATI UJANG ISKANDAR, S.H., M.H.

Disaksikan oleh

Drs. HADI PRABOWO, M.M.
Pj. Ketua Pembina TP-PKK
Provinsi Kalimantan Tengah

NY. A. HADI PRABOWO
Pj. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalteng